



PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Direktorat
Budayaan

7

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Cadangan

**PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH DALAM UPAYA
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan**



**PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH DALAM UPAYA
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tim Peneliti/Penulis :

Sumardi

Sukarjo

Sukari

Sudarmo Ali Murtolo

Hisbaron Muryantoro

Konsultan :

Drs. Gatut Murniatmo



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN	
DITJEN NIBI DAYAAN	
TGL. TERIM	17-01-00
TGL. CATAT	17-01-00
NO. INDIA	949 / 00
NO. CLAS	305.9 . PER . P .
NO. SER.	2

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY pada tahun anggaran 1997/1998 dapat menerbitkan buku berjudul **"Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di DIY"**. Buku ini merupakan hasil proyek tahun anggaran 1996/1997, penelitiannya dilakukan oleh Drs. Sumardi dkk, staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Maksud dan tujuan diterbitkannya buku ini selain untuk menambah khasanah dunia pustaka, juga sebagai upaya dalam ikut menyebarkan informasi tentang pentingnya peranan nilai budaya dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu aspek pembangunan nasional.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penelitian hingga diterbitkannya buku ini berkat kerja keras dari tim penyusun dan juga adanya kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kulonprogo dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, sebagai pelaksananya. Untuk itu kepada semua pihak yang telah turut membantu usaha penelitian hingga diterbitkannya buku ini, kami mengucapkan terima kasih, semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 1997

Pemimpin Bagian Proyek,



YULI ASTUTI, BA.

NIP. 130531496

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diiringi rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa saya menyambut baik diterbitkannya naskah hasil perekaman **"Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di DIY"** oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY Tahun Anggaran 1997/1998.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 secara terperinci menguraikan bahwa pembangunan lingkungan hidup yang merupakan ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dengan pola pembangunan berkelanjutan merupakan suatu gerak pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun juga memperhatikan atau mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, karena tanpa ada kemauan untuk mempertimbangkan lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya malapetaka bagi umat manusia.

Penelitian ini mencoba menggali dan mengungkapkan sejauh mana nilai-nilai budaya daerah mempunyai peranan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dan dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam membuat kebijakan untuk pelestarian lingkungan hidup.

Saya menghargai karya dan kreativitas Bagian proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY Tahun Anggaran 1997/1998 dalam upaya menggali, meneliti dan menerbitkan naskah berjudul "Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta", semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi DIY
TTD

Drs. Rusli Rachman
NIP. 130253385

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR PETA	XV
DAFTAR GAMBAR/FOTO	XV
ABSTRAK	XVII
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Ruang Lingkup	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Laporan	11
BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH HARGOREJO	13
A. Lokasi Dan Komunikasi	13
B. Lingkungan Alam	15
C. Sistem Administrasi Dan Pemerintahan	19
D. Kependudukan	20
E. Sistem Matapencarian	29
F. Sistem Pengetahuan	31
G. Sistem Tehnologi	33
H. Sistem Kepercayaan	34

BAB III. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN HUTAN	37
A. Pertanian	38
1. Pertanian di Kawasan Hutan	38
2. Pertanian Wanatani	47
B. Kayu Bakar	56
1. Pengambilan Kayu Bakar di Kawasan Hutan	56
2. Pengambilan Kayu Bakar Dalam Wanatani	61
C. Sumber Hutan Non Kayu	63
1. Sumber Hutan Non Kayu di Kawasan Hutan	64
2. Sumber Hutan Non Kayu dalam Wanatani	70
D. Tahap-Tahap Pengolahan Lahan	73
E. Lama Tanam dan Masa Bero	79
 BAB IV. PERSEPSI DAN SIKAP PENDUDUK TERHADAP HUTAN ...	83
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan	83
B. Sikap Masyarakat Terhadap Hutan	94
C. Nilai Budaya Pelestarian Hutan	110
D. Kepercayaan Terhadap Hutan	125
E. Tradisi Masyarakat Yang Berkaitan dengan Hutan	133
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
 DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	
A. Daftar Responden	153
B. Daftar Informan	156
C. Peta Penelitian Desa Hargorejo Tahun 1996	157
D. Gambar / foto	159

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
II. 1. Luas dan Bentuk Penggunaan Lahan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	14
II. 2. Luas dan Klasifikasi Lereng Desa Hargorejo Tahun 1996	15
II. 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Desa Hargorejo Tahun 1996	23
II. 4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Hargorejo Tahun 1996	25
II. 5. Komposisi Penduduk Menurut Matapencaharian Desa Hargorejo Tahun 1996	27
II. 6. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Desa Hargorejo Tahun 1990 - 1996	28
II. 7. Penduduk dan Agama Yang Dianut Di Desa Hargorejo	35
III. 1. Alasan Responden Melakukan Usaha Tani .Di Kawasan Hutan Desa Hargorejo Tahun 1996	39
III. 2. Alasan Responden Memilih Jenis Tanaman Pangan Di Kawasan Hutan Desa Hargorejo	41
III. 3. Luas Lahan Garapan Usaha Tani Di Kawasan Hutan Menurut Pemilikan Lahan Pertanian Desa Hargorejo Tahun 1996	43
III. 4. Luas Lahan Garapan Dalam Kawasan dan Taksiran Rata-Rata Jam Kerja Selama 6 Bulan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	44
III. 5. Luas Lahan Garapan Kawasan Hutan dan Rata-Rata Pendapatan Pertanian Desa Hargorejo Tahun 1996	45
III. 6. Luas Pemilikan Lahan, Jumlah Responden dan Persentase Sumbangan Pendapatan dari Usaha Tani di Kawasan Hutan terhadap	

	Pendapatan Total Keluarga Desa Hargorejo Tahun 1996	46
III. 7.	Alasan Responden melakukan Usaha Tani Di Kawasan Hutan Desa Hargorejo Tahun 1996	48
III. 8.	Alasan Responden Melakukan Usaha Tani Dalam Wanatani Di Desa Hargorejo Tahun 1996	49
III. 9.	Luas Lahan Garapan Wanatani Desa Hargorejo Tahun 1996	50
III.10.	Luas Lahan Garapan Wanatani Menurut Luas Pemilikan Lahan Desa Hargorejo Tahun 1996	51
III.11.	Luas Lahan Garapan dan Taksiran Rata-Rata Jam Kerja Selama 6 Bulan Desa Hargorejo Tahun 1996	52
III.12.	Luas Lahan Garapan Wanatani dan Rata-Rata Pendapatan Per- tanian Desa Hargorejo Tahun 1996	53
III.13.	Luas Pemilikan Lahan, Jumlah Responden dan Persentase sum- bangan Pendapatan Usaha Wanatani Terhadap Pendapatan Ke- luarga Desa Hargorejo Tahun 1996	55
III.14.	Luas Pemilikan Lahan, Jumlah Responden dan Rata-Rata Jam Kerja Selama 6 Bulan Mencari Kayu Bakar Di Desa Hargorejo Tahun 1996	58
III.15.	Jenis Kayu Bakar Yang Diambil Responden dari hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	59
III.16.	Alasan Responden Tidak Mengambil Kayu Bangunan Di Kawa- san Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	61
III.17.	Luas Pemilikan Lahan, Jumlah Responden dan Rata-Rata Jam Kerja Mencari Kayu Bakar Selama 6 Bulan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	62
III.18.	Jumlah Pemilikan Ternak Sapi dan Kambing Di Desa Hargorejo Tahun 1996	65
III.19.	Jenis Rumput Yang Diambil Responden dari Kawasan Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	67

III.20.	Jumlah Ternak dan Rata-Rata Jam Kerja Mencari Rumput Selama 6 Bulan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	68
III.21.	Jenis Rumput Yang Diambil Responden Dari Wanatani Di Desa Hargorejo Tahun 1996	72
IV. 1.	Persepsi Responden Terhadap Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	85
IV. 2.	Tanggapan Responden Terhadap Masyarakat Yang Merusak Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	87
IV. 3.	Tindakan Responden Andaikata Diberi Kebebasan Di Kawasan Desa Hargorejo Tahun 1996	90
IV. 4.	Fungsi Hutan Menurut Responden Di Desa Hargorejo Tahun 1996	92
IV. 5.	Alasan Responden Tentang Pentingnya Penghijauan Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	97
IV. 6.	Alasan Responden Terhadap Peraturan Yang Mewajibkan Masyarakat Menjaga Kelestarian Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	100
IV. 7.	Alasan Responden Tentang Pelestarian Hutan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Di Desa Hargorejo Tahun 1996	104
IV. 8.	Alasan Responden Tentang Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Cara Terasiring Di Desa Hargorejo Tahun 1996	107
IV. 9.	Alasan Responden Terhadap Responden UULH Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan Diperketat Di Desa Hargorejo Tahun 1996	109
IV.10.	Alasan Responden Memelihara Lingkungan Hutan Sebagai Ibadah Di Desa Hargorejo Tahun 1996	114
IV.11.	Alasan Responden Yang Menyatakan Setiap Orang Wajib Menjaga Lingkungan Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	115
IV.12.	Tindakan Terbaik Menurut Responden Dalam Menjaga Lingkungan Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	118

IV. 13.	Alasan Responden Yang Menyatakan Bahwa Menjaga Kelestarian Hutan Dilakukan Bersama-sama Masyarakat Di Sekitar Hutan Di Desa Hargorejo Tahun 1996	119
IV. 14.	Alasan Responden Yang Setuju Terhadap Ungkapan Memayu Hayuning Bawono Di Desa Hargorejo Tahun 1996	121
IV. 15.	Sikap Responden Terhadap Penguasa Bumi/Hutan Sing Mbau Reksa Di Desa Hargorejo Tahun 1996	124

DAFTAR PETA

1. Peta Lokasi Penelitian Desa Hargorejo 157

DAFTAR GAMBAR/FOTO

Gambar	Halaman
1. Bentuk hutan produksi di Gunung Jeruk	159
2. Hutan produksi di Gunung Roto	159
3. Bentuk terrassering dalam kawasan hutan	160
4. Bentuk lahan pertanian dalam kawasan hutan	160
5. Petani sedang tabur benih jagung di lahan dalam hutan	161
6. Bentuk wanatani/lahan milik dihutankan	161
7. Aktivitas petani dalam kawasan hutan	162
8. Jenis kayu bakar dalam kawasan hutan	162
9. Aktivitas penduduk mengambil legen dari pekarangan	163
10. Kegiatan pembuatan gula kelapa, mendorong pengambilan kayu bakar dalam kawasan hutan	163
11. Sumber air bersih di lembah Gunung Jeruk	164
12. Jenis tanaman jati, sonokeling dan kelapa hutan wanatani	164
13. Jenis tanaman yang beragam hutan wanatani	165

ABSTRAK

Penelitian tentang peranan nilai budaya daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup umumnya, dan khususnya lingkungan hutan dilaksanakan di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1). Perilaku penduduk dalam upaya menjaga lingkungan hidup atau hutan, dan 2). Nilai budaya yang dijadikan pedoman dalam usaha melestarikan lingkungan hutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut digunakan metode survai. Pengambilan responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK) yang dilakukan secara purposive yang bermukim di kawasan hutan produksi atau kemasyarakatan. Pengambilan daerah penelitian ini dengan pertimbangan bahwa penduduk di sekitar hutan produksi dimungkinkan melakukan aktivitas formal dan informal di kawasan hutan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan-catatan pada instansi pemerintah. Selain itu penelitian ini dilengkapi dengan wawancara beberapa tokoh masyarakat, baik pamong desa maupun tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa penelitian ini menggunakan tabel frekuensi, tabel silang, dan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan hutan produktif, terlibat dalam aktivitas, baik formal maupun informal di kawasan hutan, yaitu melakukan aktivitas pertanian lahan kering sebesar 76,66 persen, mencari kayu bakar sebesar 81,66 persen, dan mencari rumput untuk makanan ternak sebesar 85 persen. Selain itu, mendapatkan persepsi penduduk terhadap hutan, yaitu sebagian besar menyatakan hutan merupakan lahan milik pemerintah yang banyak tumbuh tanaman keras dan liar yang hasilnya menjadi milik pemerintah dan penduduk tidak boleh merusak yang proporsinya sebesar 45 persen. Kemudian tentang sikap penduduk terhadap hutan, sebagian besar menyatakan bahwa penghijauan hutan merupakan hal yang sangat penting, karena dapat memberikan rasa sejuk, tenang kepada masyarakat di sekitar hutan yang proporsinya sebesar 25 persen.

Disamping itu, sebagian besar penduduk di sekitar kawasan hutan yakin bahwa memelihara ekosistem hutan merupakan ibadah yang proporsinya sebesar 46,67 persen, dan sebesar 35 persen mengatakan bahwa manusia merupakan

makhluk yang berakal wajib memelihara keseimbangan alam sekitar. Selanjutnya terhadap ungkapan mamayu hayuning bawono, sebagian besar responden memahami sebagai suatu kesadaran untuk menjaga keselarasan, menghormati hutan. Masyarakat di sekitar hutan masih mempercayai kepada kekuatan gaib yang menempati pada tempat-tempat tertentu atau pohon tertentu di kawasan hutan, dan masih mempertahankan tradisi yang berkaitan dengan hutan, seperti baritan, bersih desa dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan ekonomi yang berjalan saat ini biasanya disebut dengan pembangunan konvensional, yang diakui telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan pola pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakan sebelum tahun 1990-an, yang juga membuktikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia. Karakteristik pembangunan konvensional umumnya dititik beratkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan dan terjaminnya stabilitas nasional. Namun oleh Emil Salim (1991) dikatakan bahwa pembangunan pola tersebut sudah ketinggalan jaman, karena banyak menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian untuk menanggulangi berbagai dampak yang sangat merugikan masyarakat tersebut, perlu diterapkan pola pembangunan berkelanjutan.

Pola pembangunan berkelanjutan merupakan suatu gerak pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga memperhatikan atau mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini nampaknya sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (1993) yang menyatakan:

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua diarahkan untuk tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk peran secara aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat mantap dan dinamis, melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pernyataan tersebut mengingatkan kepada pengambil kebijakan pembangunan dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap langkah kegiatan pembangunan dituntut untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup. Tanpa ada kemauan untuk mempertimbangkan lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya malapetaka bagi manusia.

Secara terperinci, kebijakan pembangunan lingkungan hidup ditujukan sebagai salah satu sasaran bidang pembangunan ekonomi. Hal ini tertuang dalam

Garis-garis Besar Haluan Negara, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan mahluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dengan demikian pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi keseluruhan kelestarian lingkungan hidup yang terjamin dan terjaga dengan baik dalam setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan penduduk merupakan salah satu kunci penting untuk melanjutkan proses pembangunan selanjutnya.

Menurut Emil Salim (1986:37), bahwa pembangunan lingkungan hidup harus meliputi sasaran, yaitu membina hubungan yang selaras antara manusia dengan lingkungan, melestarikan sumberdaya alam supaya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, mencegah kemerosotan mutu sekaligus mengusahakan meningkatkan mutu lingkungan, sehingga kualitas hidup penduduk semakin baik, dan membimbing manusia dari kedudukan merusak lingkungan menjadi pembina lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran tersebut, meliputi : menyelamatkan hutan, tanah dan air; mengendalikan pencemaran sektoral terhadap lingkungan; mengembangkan lingkungan permukiman yang baik atau sehat dan mengembangkan kesadaran lingkungan dalam masyarakat.

Salah satu unsur lingkungan hidup yang langsung berkaitan dengan kehidupan penduduk adalah sumber daya hutan. Dengan demikian hutan merupakan suatu kawasan yang mempunyai peranan yang bersifat multidimensi. Disamping dimensi ekonomi dan ekologis, hutan juga memiliki dimensi sosial budaya. Dari aspek dimensi ekonomis, hutan dapat berperan sebagai sumber utama pemenuhan komoditi kayu. Selain itu di kawasan hutan juga tidak jarang terdapat sumberdaya alam yang berupa bahan tambang, yang kesemuanya dapat menghasilkan devisa penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Di sisi ekologis, sumberdaya hutan berperan penting terhadap iklim lokal ataupun global, tata air (*hidrologis*), konservasi kahan, kekayaan hayati serta plasma

nutfah, yang semuanya berperan sangat penting dalam kehidupan manusia (Ramli, A. 1994:2).

Dari aspek historis telah memperlihatkan bahwa sejak awal peradaban manusia, antara manusia dengan hutan memiliki kaitan yang berdimensi sosial budaya. Dalam masyarakat tradisional, jalinan hubungan tersebut tampak dalam perilaku sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan keberadaan hutan di sekitar mereka bermukim. Dari hutan masyarakat hutan mendapatkan sumber daya pangan yang merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi kehidupan mereka. Selain itu, sumberdaya hutan juga merupakan lahan cadangan bagi perluasan permukiman dan usaha tani, tatkala masyarakat sekitarnya membutuhkan lahan karena pertumbuhan penduduk. Banyaknya manfaat yang diperoleh masyarakat dari hutan, maka dapat dipahami andaikata tidak jarang hubungan berlangsungnya secara selaras dan seimbang.

Berdasarkan Leuherry, D (1989:1), hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka dan hutan wisata. Disamping itu hutan juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang berada disekitar hutan produksi, sehingga bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan memberikan manfaat seperti kayu, hasil hutan ikutan dan jasa hutan, misalnya hutan wisata.

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya memiliki sumberdaya hutan yang luas. Selain luasnya, hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis yang memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tertinggi di dunia. Dipihak lain Indonesia memiliki ciri-ciri dengan jumlah penduduk yang besar dan sebagian besar tersebut bertempat tinggal di kawasan hutan. Seiring dengan konsep pembangunan yang berkawasan lingkungan dan keseimbangan yang dilakukan dewasa ini dan masa mendatang, maka pengelolaan hutan agar dapat mengkomodasikan berbagai kepentingan telah lama menjadi arahan dalam pembangunan sektor hutan di Indonesia.

Pertambahan penduduk yang demikian pesat akan menyebabkan meningkatkannya kebutuhan dasar masyarakat. Simon (1987:10) mengemukakan empat kebutuhan dasar masyarakat pedesaan khususnya dikawasan hutan, perlu untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan hutan produksi (kemasyarakatan / rakyat) adalah: bahan makanan, kayu bakar, makanan ternak dan kayu untuk kepentingan perkakas atau bangunan. Selain itu, juga menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam, khususnya tanah hutan dan air. Hal ini dapat terjadi karena perbandingan penduduk dengan luas tanah semakin rendah, sehingga akan berakibat meluasnya penggunaan tanah

pada lahan marginal, seperti lereng gunung dan penebangan liar hutan untuk kepentingan penduduk, Eksploitasi sumberdaya alam yang berupa tanah dan hutan yang berlebihan akan mengakibatkan dampak yang merugikan kehidupan penduduk di kawasan hutan, seperti lahan gundul dan banjir (Soedjatmoko, 1983:80; Sumitro Djoyohadikusumo, 1994:268). Di samping itu penggunaan sumberdaya hutan dan tanah yang jauh melebihi daya dukungannya, tanpa menghiraukan kelestariannya menyebabkan rusaknya sumberdaya alam bersangkutan yang padaakhirnya menuju kepada kerusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjaga sumberdaya hutan tidak rusak dan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk serta meningkatkan kesejahteraan penduduk, terutama penduduk desa yang bermukim di sekitar hutan telah dilaksanakan suatu strategi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dalam aktivitas kehutanan. Strategi pengelolaan hutan bertujuan menghasilkan kayu, juga menghasilkan bahan makanan dan makanan ternak untuk penduduk di sekitar hutan yang biasanya disebut dengan hutan produksi atau kemasyarakatan (*social forestry*).

B. PERMASALAHAN

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang atau sedang membangun menghadapi dua masalah tentang lingkungan hidup, yaitu masalah lingkungan hidup yang disebabkan kemiskinan sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang sering disebut dengan pembangunan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah akan meningkatkan kebutuhan dasar, sehingga dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut penduduk berupaya keras mengusahakan lahan marginal seperti lereng-lereng pegunungan dan lahan hutan, akibatnya lingkungan hidup menjadi semakin kurang mendukung kehidupan manusia. Selanjutnya pengrusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan, tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, baik kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kemiskinan maupun proses pembangunan perlu segera mendapatkan pemecahan, agar pembangunan dapat berjalan terus, dan tidak memberi beban kepada generasi yang akan datang.

Mengingat begitu pentingnya lingkungan hidup, dalam hal ini sumberdaya hutan yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap fauna, flora, tanah dan tata air, maka hutan didaerah ini perlu dilindungi dari kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berujud penebangan liar

ataupun aktivitas lain yang dapat menimbulkan rusaknya sumberdaya hutan yang berakibat rusaknya lingkungan hidup. Berkaitan dengan kepentingan tersebut pihak kehutanan di daerah ini mengizinkan kepada sebagian masyarakat memanfaatkan lahan dikawasan hutan yang hasilnya dapat diperoleh penduduk bersangkutan. Sebagai imbalan penduduk dikawasan hutan memiliki kewajiban menjaga dan memelihara hutan agar tetap lestari.

Masyarakat pedesaan yang tinggal dikawasan hutan yang umumnya mempunyai pekerjaan di bidang pertanian memperlihatkan hubungan yang erat dengan lingkungan hidupnya. Disamping itu masyarakat dikawasan hutan umumnya mengenai sikap dan pola berfikir serta bertindak masih berpegang teguh pada norma, adat serta tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Hal ini tidak saja dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, namun juga nampak dari perilakunya dalam menghadapi lingkungan hidup (hutan). Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan untuk menjawab pertanyaan, sebagai berikut :

1. Nilai Budaya yang berkaitan dengan upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup?
2. Pola-pola perilaku masyarakat setempat yang diwariskan nenek moyang dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perilaku penduduk dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup (hutan)
2. Nilai budaya yang dijadikan pedoman dalam usaha melestarikan lingkungan hidup.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam mempertahankan kehidupannya manusia tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan hidupnya. Dengan demikian manusia selalu bergantung dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya secara terus-menerus (Bintarto, 1983:74). Dari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan hidupnya, dalam hal ini ekosistem hutan, manusia memperoleh pengalaman, sehingga ia akan mendapatkan gambaran atau citra lingkungan hidup. Dari perjalanan dan pengamatan manusia, seseorang akan mendapat petunjuk

tentang berbagai hal yang diharapkan dari lingkungan hidupnya, tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat terhadap lingkungan sekitarnya, dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang baik, (Soemarwoto, 1983; Sasongko Triyoga, 1991:4).

Selain itu, Suseno (1984:85) mengemukakan bahwa melalui lingkungan hidup manusia belajar tentang seluruh keberadaannya bergantung dari alam yang dihayati sebagai kekuasaan yang dapat menentukan keselamatan dan kehancuran manusia. Dengan demikian andaikata lingkungan alam mengalami kerusakan maka ia akan mendapat penderitaan, sehingga walaupun lingkungan alam merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, manusia akan mengupayakan atau membudidayakan secara hati-hati. Interaksi manusia dengan lingkungan alam tidak bersifat eksploitatif, supaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, namun cenderung bersifat saling menjaga agar tercipta keselarasan. Hal ini disebabkan pada manusia khususnya Jawa masih percaya andaikata melanggar hubungan manusia akan memperoleh sanksi baik dalam masyarakat maupun dari kekuatan dari alam adikodrati.

Hubungan antara sesama manusia, pandangan manusia terhadap dirinya dan lingkungan hidupnya serta perilaku manusia terhadap sesamanya dan perilakunya terhadap lingkungan hidup menggunakan norma-norma yang terdapat dalam kebudayaannya (Sasongko Triyoga 1991:5). Hal ini lebih jelas dikemukakan oleh Suparlan (1983:6), gayutan antara aktivitas manusia dengan lingkungan hidupnya dijembatani oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Melalui kebudayaan yang dimiliki, seseorang bertindak dengan menyesuaikan terhadap: tetap bertahan dalam dan menggunakan lingkungan hidupnya dalam rangka untuk melangsungkan kehidupannya.

Berbagai batasan tentang kebudayaan, salah satu diantaranya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang dipergunakan untuk memahami dan mengintegrasikan lingkungan hidupnya dan pengalamannya, dan menjadi kerangka dasar untuk mewujudkan dan terwujudnya kelakuan (Suparlan 1983:3). Dengan demikian pemahaman tersebut mendudukkan kebudayaan berfungsi sebagai sistem aturan dari kelakuan manusia atau pola kelakuan seseorang, sehingga kebudayaan merupakan nilai budaya yang bersumber pada etika dan pandangan hidup manusia.

Koentjaraningrat (1990) menyatakan bahwa sistem nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam pikiran mayoritas warga masyarakat.

Dengan demikian sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat adapat berfungsi sebagai pedoman yang menempati kedudukan tertinggi bagi kelakuan manusia, sehingga merupakan wujud ideal kebudayaan yang seolah-olah berada di luar serta di atas individu sebagai bagian warga masyarakat. Setiap pribadi atau individu sejak kanak-kanak melalui budaya yang hidup dalam masyarakat luas. Berkaitan dengan proses yang berlangsung dalam waktu yang panjang pada setiap jiwa warga masyarakat. Dengan demikian nilai budaya tersebut sangat sukar diganti dengan nilai budaya lain atau baru dalam waktu yang singkat.

Dalam masyarakat terdapat sejumlah nilai budaya tertentu, dimana antara nilai budaya satu dengan lainnya berkaitan membentuk suatu sistem. Kumpulan berbagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat merupakan pedoman dari konsep ideal dalam kebudayaan sebagai pendorong terhadap arah kehidupan warga masyarakat terhadap obyek tertentu, dalam hal ini lingkungan hidup. Dengan demikian nilai budaya menentukan sikap seseorang terhadap obyek seperti manusia, hewan atau benda yang dihadapinya (Koentjaraningrat 1980:204).

Kluckhohn mengemukakan bahwa setiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan terdapat lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Masalah mengenai hakekat dan sifat hidup manusia
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia
3. Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu
4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya
5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Dengan demikian salah satu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini menyangkut hakekat hubungan manusia dengan alam, yang memiliki orientasi nilai budaya tiga jenis, yaitu tunduk terhadap alam, mencari keselarasan dengan alam dan menguasai alam. Dari ketiga jenis orientasi nilai budaya mentalitas yang selalu menguasai alam.

Wujud manusia yang selalu, yang selalu mencari keselarasan dengan alam ini dilandasi dengan pemahaman bahwa manusia merupakan salah satu unsur dalam ekosistem. Yang menduduki tempat terpenting. Namun dengan akal yang dimiliki, manusia dalam memenuhi kebutuhan disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Koentjaraningrat (1990) dan Sumarwoto (1978), yang menyatakan bahwa or-

ang timur terdapat kecenderungan untuk mencapai keselarasan dengan lingkungan. Sekalipun dalam masyarakat Jawa terdapat pemahaman tentang lingkungan secara terbatas, ada usaha untuk mempengaruhi kekuatan supernatural dengan menggunakan upacara tertentu, seperti sesaji, berkorban dan sebagainya. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam lingkungan. Disamping itu dalam masyarakat Jawa terdapat kepercayaan tertentu yang berkaitan dengan kekuatan supernatural (Soehardi, 1982). Dalam kepercayaan tersebut andaikata direnungkan akan maknanya menggambarkan petuah-petuah supaya manusia jangan selalu merusak alam lingkungan yang ada disekitarnya.

Hubungan timbal-balik antara penduduk desa dengan lingkungan hidup, umumnya mempunyai pandangan yang imanen. Sistem biofisik merupakan sumberdaya yang menyediakan semua kebutuhan hidup seseorang namun cara pengambilannya untuk kepentingan sosial harus disertai dengan usaha menjaga keserasian ekosistem (Sumarwoto, 1978). Dengan demikian salah satu persepsi orang desa tentang kebutuhan dasar, bukan terletak pada kemakmuran materi melainkan lebih dalam keserasian manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya aturan religius yang mengatur eksploitasi sumber daya alam telah melahirkan tradisi-tradisi, yang intinya untuk menjaga kelestarian ekosistem, walaupun keterangan tersebut tidak diberikan secara rasional melainkan melalui mitos.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian dilakukan di desa Hargorejo, kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, dengan pertimbangan di wilayah desa ini terdapat hutan produksi dan lindung terbatas yang dalam pemeliharannya masih mengikut sertakan masyarakat dikawasan hutan bersangkutan. Selain itu, diwilayah Desa Hargorejo merupakan salah satu desa yang memiliki hutan terluas dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Kokap yaitu seluas 243,88 ha.

Yang dimaksud lingkungan hidup dalam penelitian ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 4 tahun 1982). Dalam hal ini, lingkungan hidup dititik beratkan pada ekosistem hutan.

Bentuk hutan produksi/kemasyarakatan adalah suatu bentuk penggunaan, lahan yaitu suatu kombinasi antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan atau tananaman kehutanan dengan tanaman makanan temak.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini mencakup kepercayaan, tradisi, nilai budaya, persepsi umum dan sikap masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya ekosistem hutan. Selanjutnya juga akan membahas hubungan manusia dengan hutan, yang meliputi pertanian, kayu bakar, sumber hutan non kayu, tahap-tahap pertanian lahan kering di kawasan hutan, dan periode penggarapan lahan dan benih yang dilakukan masyarakat di kawasan hutan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode survei, merupakan suatu penelitian untuk memperoleh keterangan dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Singarimbun (1982) menjelaskan bahwa survei, pengertiannya terbatas kepada survei sampel, dimana informasi dikumpulkan dan sebagian populasi responden untuk memiliki seluruh populasi sasaran. Dengan mengambil sebagian dari populasi atau sampel responden yang bersangkutan diharapkan mendapatkan gambaran dari populasi keseluruhan (Mantra, 1982:105).

1. Pemilihan Daerah penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, dengan pertimbangan dalam wilayah administrasi kecamatan Kokap terdapat areal hutan seluas 807,12 ha atau 72,38% dari luas keseluruhan hutan di Kabupaten Kulon Progo. Hutan di Wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagian besar merupakan hutan produksi dan hutan lindung terbatas. Dalam penelitian ini dipilih Desa Hargorejo, dengan alasan bahwa desa tersebut memiliki hutan seluas 243,88 ha dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Dengan demikian diduga masyarakat yang bermukim disekitar hutan dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia dalam hutan, baik secara formal maupun informal, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Selain itu, alasan lain terutama Desa Hargorejo keadaan alamnya tidak memungkinkan digunakan untuk lahan sawah, dan oleh masyarakat disekitar hutan telah melakukan aktivitas reboisasi pada lahan miliknya, baik berupa lahan tegalan maupun pekarangan dengan berbagai jenis tanaman kayu-kayuan, tanaman buah-buahan atau tanaman perkebunan.

Di samping itu, penghijauan pada lahan pekarangan maupun lahan tegalan, juga ditanami tanaman pangan, sehingga pekarangan dan tegalan telah

dikembangkan oleh pemiliknya dengan sistem wanatani (*agroforestry*). Pemanfaatan lahan milik dengan berbagai tanaman kehutanan, tanaman pertanian dan tanaman makanan ternak, sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan cara menanam tanaman bahan makanan dan rumput-rumputan dibawah tanaman tegak dalam kawasan hutan. Dengan demikian wilayah Desa Hargorejo telah diterapkan jenis hutan produksi atau hutan kemasyarakatan, baik dalam kawasan hutan maupun pada lahan milik penduduk disekitar hutan.

2. Pengambilan Sampel dan Informan

Dalam penelitian ini digunakan sampel responden yang dimaksudkan penggalan data tidak didapatkan dari keseluruhan populasi sasaran, namun yang hanya diambil sebagian saja. Untuk memudahkan pelaksanaan dilapangan, sampel diambil sebanyak 60 KK. Selain itu, dalam penelitian ini dilengkapi wawancara dengan beberapa informan kunci yang banyak mengetahui keadaan lapangan sesuai dengan topik penelitian. Pengambilan informan dipertimbangkan kepada seseorang yang sungguh-sungguh memahami kejadian dan mengetahui seluk-beluk keadaan lapangan, yang dapat berasal dari warga masyarakat maupun seseorang yang duduk dalam pemerintahan desa.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. data yang bersifat primer diperoleh langsung dari sampel responden dengan wawancara berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan, dan pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya data yang bersifat sekunder diperoleh dari arsip yang tersedia di kantor atau instansi yang berkaitan dengan daerah penelitian, misalnya kantor desa, kecamatan dan kantor statistik.

4. Analisa Data

Untuk kepentingan analisa data dalam penelitian ini digunakan analisa univariat yang disajikan dalam bentuk tabel. data yang diperoleh dari semua responden diolah, kemudian dibuatkan kriteria jawaban responden terutama untuk pertanyaan terbuka. Setelah pengolahan data keseluruhan terkumpul dibuatkan

tabulasi frekuensi, dan untuk mengetahui distribusi data digunakan analisa yang bersifat deskriptif.

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Suatu gambaran ringkas dari isi laporan penelitian ini mencakup :

- a. Bab I. menguraikan tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika laporan.
- b. Bab II. Menguraikan mengenai Gambaran Umum Daerah Penelitian yang meliputi lokasi dan komunikasi, lingkungan alam, Sistem administrasi dan pemerintahan, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan sistem kepercayaan.
- c. Bab III. menguraikan tentang Hubungan Penduduk dengan Hutan yang mencakup pertanian, kayu bakar, sumber hutan non kayu, tahap-tahap pertanian lahan kering dikawasan hutan, dan periode penggarapan lahan dan bero dikawasan hutan.
- d. Bab IV. membahas tentang Persepsi dan Sikap Terhadap Hutan terdiri dari persepsi masyarakat terhadap hutan, sikap masyarakat terhadap hutan, nilai budaya pelestarian hutan, kepercayaan masyarakat terhadap hutan, dan tradisi masyarakat terhadap hutan.
- e. Bab V. uraian tentang Kesimpulan dan Saran yang merupakan rangkuman keseluruhan hasil penelitian di lapangan dan saran yang perlu dipertahankan untuk melestarikan lingkungan hutan di daerah penelitian khususnya dan dapat diterapkan untuk pelestarian hutan di daerah lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH HARGOREJO

Di dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum daerah penelitian secara umum, yang mencakup lokasi dan komunikasi, lingkungan alam, kependudukan, sistem administrasi dan pemerintahan, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan sistem kepercayaan.

A. LOKASI DAN KOMUNIKASI

Desa Hargorejo terletak didalam wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjarak kurang lebih 45 Km, Sebelah Barat kota Yogyakarta. Dengan ibu kota Kabupaten Kulon Progo berjarak kurang lebih 8 Km kearah Barat laut, sedangkan dengan ibu kota kecamatan berjarak kurang lebih 2 Km daerah Selatan. Secara astronomis desa hargorejo terletak antara 7° 48' 33" - 7° 63' 13" Lintang Selatan dan 110° 03' 51" - 110° 10' 04" Bujur Timur.

Desa Hargorejo yang merupakan salah satu dari desa dari 5 desa di wilayah Kecamatan Kokap, terdiri dari 16 dusun, yang mencakup seluas 1453,29 hektar, terdiri dari perumahan dan pekarangan 734,78 hektar, 25,10 hektar berupa sawah, pertanian tanah kering seluas 349,60 hektar, 243,86 hektar berupa hutan, pangan seluas 36,45 hektar dan sisanya untuk kepentingan lain-lain seluas 63,50 hektar.

Dari tabel II.1. nampak bahwa sebagian besar lahan di Desa Hargorejo digunakan untuk perumahan dan pekarangan sebesar 50,56 persen, kemudian disusul lahan yang berupa pertanian kering sebesar 24,06 persen dan hutan negara sebesar 16,78 persen. Lahan yang digunakan untuk perumahan dan pekarangan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan, sebab seiring dengan pertambahan penduduk yang memerlukan lahan untuk perumahan. Di samping itu lahan hutan yang dikuasai negara dalam hal ini perhutani, dalam rangka mengantisipasi kerusakan tanaman hutan, kurang lebih tahun 1967, membuka lahan untuk dikerjakan penduduk disekitar hutan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Kemudian juga untuk menanggulangi kerusakan dan sekaligus menambah pendapatan petani dikawasan hutan, lahan milik petani yang berdekatan dengan hutan yang berfungsi sebagai zone penyangga hutan telah

diupayakan antara penduduk pemilik dengan perhutani dihutankan dengan sistem wanatani (agroforestry).

Tabel II.1
BENTUK PENGGUNAAN LAHAN
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Bentuk penggunaan lahan	Luas	Persentase
1.	Perumahan dan pekarangan	734,78	50,56
2.	Sawah sederhana	25,20	1,74
3.	Pertanian lahan kering dan ladang / tegalan.	349,60	24,06
4.	Hutan negara	243,85	16,78
5.	Pangonan	36,35	2,50
6.	Lain-lain	63,51	4,36
J u m l a h		1453,29	100,00

Sumber : Data sekunder, 1996.

Hubungan antar dusun di Desa Hargorejo walaupun hanya jalan tanah biasa dan jalan berbatu relatif baik, sedangkan jalan dusun disekitar hutan berupa jalan setapak. Secara umum komunikasi sarana transportasi umum, alat transportasi milik pribadi lebih dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi penduduk di pedesaan ini. Berdasarkan monografi Desa Hargorejo menunjukkan bahwa terdapat pemilikan pribadi sebagai berikut: mobil 10 buah, oplet 11 buah, truk 15 buah, sepeda motor 243 buah dan sepesa 251 buah. Disamping itu terdapat sarana komunikasi yang lain yaitu : radio 487 buah dan TV 107 buah.

Secara administrasi Desa Hargorejo berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hargowilis, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Sebelah Selatan Desa berbatasan dengan Desa Tawangsari Kecamatan Temon, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hargomulyo serta Desa Kulur Kecamatan Temon.

B. LINGKUNGAN ALAM

1. Topografi

Topografi wilayah merupakan gambaran kenampakan permukaan bumi atau sebagai permukaan bumi. Salah satu faktor penting dalam topografi adalah relief, yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya permukaan bumi terhadap permukaan air laut dan terhadap satu sama lainnya. Perbedaan tinggi tempat di permukaan bumi sangat berpengaruh pada berbagai macam aktivitas manusia. secara keseluruhan wilayah Desa Hargorejo memiliki topografi kasar yang berkisar 50 sampai 500 meter diatas permukaan air laut, yang lebih rinci dapat dibedakan 12,16 persen kurang 100 meter, 85,25 persen antara 100-499 meter dan sisanya sebesar 2,57 persen diatas 500 meter, dan rata-rata memiliki ketinggian 115 meter diatas permukaan air laut.

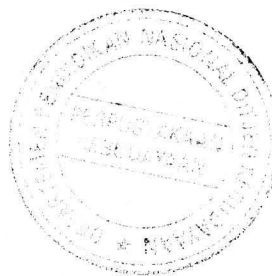
2. Kemiringan Lereng

Lereng merupakan salah satu faktor pembatas utama untuk menilai kesesuaian lahan guna kepentingan aktivitas manusia, khususnya dalam bidang pertanian. intensitas pengikisan air hujan sangat tergantung pada kemiringan lahan atau lereng. Dengan demikian semakin terjal keadaan lereng makin cepat pengikisan. Pada wilayah yang tidak berlereng atau relatif datar relatif tidak terjadi pengikisan, namun sebaliknya yang terjadi adalah proses pengendapan (Sandi : 1977).

Tabel II.2
LUAS DAN KLASIFIKASI LERENG DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Lereng	Luas (ha)	Persentase
1.	0 - 2 %	30,53	2,10
2.	2 - 15 %	194,74	13,40
3.	15 - 40 %	715,59	49,24
4.	> 40 %	512,43	35,26
	Jumlah	1453,29	100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional DIY, 1990.



Berdasarkan tabel II.2 nampak bahwa sebagian besar lahan di Desa Hargorejo memiliki kemiringan antara 15-40% sebesar 49,24 persen. Kemudian disusul lebih dari 40 persen sebesar 35,26 persen, antara 2 - 15 % sebesar 13,40 persen, dan sisanya sebesar 2,10 persen memiliki kemiringan lereng antara 0 - 2 %. Dengan demikian lahan di daerah penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daerah yang merupakan dataran seluas 30,53 hektar atau sebesar 97,90 persen. Dari data kemampuan lahan dapat diketahui bahwa pada daerah dataran memiliki kriteria kemampuan lahan sebagai berikut: lereng 0 - 2%, kedalaman efektif lebih 90 cm, tekstur halus, drainage baik dan tidak pernah tergenang, sedangkan pada daerah yang merupakan perbukitan atau pegunungan mempunyai kriteria kemampuan lahan yang beraneka, yaitu lereng landai sampai terjal kedalaman efektif antara 30 - 90 cm, tekstur halus sampai halus, tidak pernah tergenang dan pada daerah tertentu terdapat erosi, baik erosi gully dan permukaan.

3. Iklim

Secara global, daerah penelitian termasuk beriklim tropis seperti halnya daerah-daerah lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Curah Hujan tertinggi sebesar 540 mm yang terjadi pada bulan Nopember dan terendah sebesar 101 mm yang terjadi pada bulan Pebruari. Seperti halnya dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung pada bulan April sampai September, dan musim penghujan atau hujan berlangsung pada bulan Oktober sampai Maret. Untuk curah hujan rata-rata tahunan sebanyak 2560 mm. Selain itu, temperatur tertinggi di daerah penelitian sebesar 31°C dan terendah sebesar 23°C. Mengacu pada ciri-ciri diatas, menurut pembagian iklim dari Koppen, daerah penelitian termasuk pada tipe iklim A atau hujan tropika.

4. Flora dan Fauna

a. Flora

Tumbuhnya berbagai jenis faktor, yaitu jenis tanah, iklim, dan campur tangan manusia. Selain itu, tinggi rendahnya dataran tempat tanaman bersangkutan, karena hal ini langsung berhubungan dengan suhu udara khususnya dan iklim pada umumnya serta jenis tanah sebagai media tanaman sangat berkaitan dengan iklim karena akan menentukan tingkat kesuburan tanah. Dengan demikian andaikata faktor iklim, jenis tanah sudah mendukung tumbuhnya jenis tanaman yang diusahakan petani, tanaman bersangkutan akan tumbuh dengan baik (Triyogo, 1995:19)

Masyarakat atau penduduk dikawasan hutan di desa Hargorejo, mempunyai pandangan yang tidak sama terhadap berbagai jenis tanaman yang ada didaerahnya, khususnya tanaman dikawasan hutan dan lahan milik penduduk yang dihutankan dengan sistem wanatani (agroforestry). Pertama, penduduk mempunyai pandangan terhadap tanaman yang dapat ditanam dilahan kawasan hutan, yaitu tanaman pangan seperti jagung (*zea mays*), ketela (*manihot utilisima*) dan kacang tanah, dan tanaman keras seperti jati, mahoni, aksia, sengon dan orak-arik. Kedua, untuk lahan milik yang dihutankan, tanaman bahan makanan terdiri jagung, ketela, kacang tanah, kara, tanaman obat-obatan terdiri kunyit, cengkeh, temu, laos dan sebagainya. Untuk tanaman keras terdiri dari nangka, randu, durian, kopi dan coklat.

Penduduk disekitar kawasan hutan di desa Hargorejo juga mengenal jenis tanaman liar yang terdapat dikawasan hutan, meliputi alang-alang (*imperata cylindrica*), suket grinting (*cinoda doctyla*), suket teki (*cipen ritundas*) dan sebagainya. Jenis tanaman liar yang berupa rumput-rumputan di kawasan hutan, oleh penduduk disekitarnya banyak diambil untuk dimanfaatkan untuk makanan ternak sapi dan kambing yang dilakukan petani pada musim penghujan atau rendeng. Sedangkan keperluan makanan ternak pada musim kemarau, petani mencari makanan diluar. Bahkan diluar propinsi, seperti Purworejo secara rombongan dengan tetangga.

Berdasarkan keterangan penduduk disekitar hutan dilingkungannya, hutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer merupakan jenis hutan yang tanamannya tumbuh secara liar dengan pepohonan belum pernah ditebang untuk kegiatan pertanian, sedangkan hutan sekunder merupakan jenis hutan yang telah dibuka penduduk untuk kegiatan pertanian yang kemudian dihutankan kembali. Konon dahulu kurang lebih sebelum tahun 1960, baik jenis hutan primer maupun sekunder dihutankan kembali tanpa mengikut sertakan penduduk disekitarnya, namun banyak menimbulkan masalah bagi petani setempat, yang disebabkan banyak menimbulkan masalah bagi petani setempat, yang disebabkan banyak penduduk kehilangan matapencaharian bertani. Usaha pemerintah dalam hal ini Perhutani untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira mulai 1967, penduduk disekitar kawasan hutan. Penduduk khususnya yang bermatapencaharian sebagai petani diberi peluang atau kesempatan untuk mengerjakan lahan didalam kawasan hutan dengan sistem kontrakan.

Pemahaman penduduk tentang hutan primer dan sekunder di Desa hargorejo untuk waktu ini, secara nyata atau riil nampaknya sudah tidak mengenal lagi. Pengertian penduduk tentang hutan primer dan hutan sekunder sudah menunjukkan perubahan, yaitu hanya mengenal *alas tutupan* dan *alas*

kontrakan. hutan tutupan (alas tutupan) oleh penduduk disekitar hutan dikenali dari berbagai jenis tanaman yang berukuran besar-besar dibandingkan dengan *alas kontrakan*. Selanjutnya dari sudut letaknya, *alas tutupan* umumnya terdapat pada daerah yang memiliki kemiringan tanah relatif tinggi di atas 40 %, sebaliknya untuk daerah *alas kontrakan* umumnya terletak pada tanah yang agak datar dengan kemiringan kurang 20%.

b. Fauna

Kawasan hutan di Desa Hargorejo seluas 234 hektar banyak dijumpai berbagai hewan atau binatang, baik bersifat merugikan maupun menguntungkan kehidupan penduduk disekitar hutan, seperti buruan, lebah dan sebagainya. Sedangkan jenis hewan yang sering merugikan kehidupan penduduk, seperti ayam alas, (*acromis mornasus*); tikus, tupai (*bambusa*), ular dan macan (*pantera pardus*). Namun demikian hutan di daerah penelitian banyak ditemukan berbagai jenis binatang, masyarakat Desa Hargorejo tidak memiliki kebiasaan berburu dalam kawasan hutan.

Penduduk disekitar kawasan hutan di daerah penelitian, walaupun tidak memiliki kebiasaan berburu, seperti halnya masyarakat disekitar hutan di daerah lain, bukan berarti penduduk menyangkut jenis binatang yang merusak tanaman pangan yang diusahakan petani, baik dalam kawasan hutan maupun diluar hutan, seperti burung, ayam alas, tikus dan sebagainya. Hal ini dilakukan penduduk dengan menggunakan racun, perangkap dan umpan, umumnya dilakukan pada daerah berbatasan antara tegalan/pekarangan dengan kawasan hutan.

5. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di daerah penelitian adalah latosol, grumusol dan aluvial (Bappeda Kab. Kulon Progo, 1990). Jenis tanah latosol merupakan tanah mineral yang sedikit mengalami perkembangan diatas batuan kukuh dengan kedalaman profil kurang dari 50 cm. Selain itu juga memiliki ciri-ciri: warna merah hingga kuning, liat, sifat masam, gembur, struktur remah hingga gumpal, bahan induk tuf vulkan hingga bantuan vulkan, erosi kecil, terdapat pada daerah bergelombang dan berbukit. Vegetasi yang cocok dengan jenis tanah tersebut, sesuai keadaan permukaan di daerah berbukit, adalah polowijo atau untuk daerah tertentu lebih baik dihutankan. Penyebaran jenis tanah latosol di daerah penelitian terdapat pada daerah lereng vulkan dan daerah berbukit diseluruh wilayah desa, utamanya di wilayah hutan milik perhutani.

Jenis tanah grumusol merupakan tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agak tebal, kelabu hingga hitam, liat, berstruktur kersai dilapisan atas dan gumpal dilapisan bawah, teguh, lekat, umumnya berkongkresi kapur agak masam hingga alkalis. Tanah grumusol merupakan tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agak tebal, kelabu hingga hitam, liat berstruktur kersai dilapisan atas dan gumpal dilapisan bawah, teguh, lekat, umumnya berkongkresi kapur agak masam hingga alkalis. Tanah grumusol berasal dari bantuan induk napal, liat dan tuf volkan, yang penyebarannya terdapat pada daerah landai, bergelombang dan berombak, utamanya bagian timur desa yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pengasih dan berupa hutan milik pemerintah. Hutan dengan jenis tanah grumusol sesuai dengan perkembangannya, mengalami perubahan setiap saat karena kadar Mg dan Na mempunyai sifat mudah retak dan pada saat panas memuai makin jelas. Sedangkan pada musim penghujan tanah lekat dan mirip seperti bubur, sehingga jenis tanah ini mudah tererosi oleh aliran air.

Wilayah daerah penelitian dibagian selatan umumnya berjenis tanah aluvial yang merupakan tanah berwarna kelabu hingga coklat, sifat masam beraneka, bahan induk aluvial dan koluviat, tanpa solum hingga sedang. Tekstur beraneka bahan organik rendah serta kepekaan terhadap erosi besar. Penyebarannya pada daerah yang datar sampai sedikit bergelombang, yang biasanya jenis tanah ini dimanfaatkan untuk persawahan pada musim penghujan dan untuk tanaman polowijo (jagung, kacang) pada musim kemarau.

Jenis tanah dan perkembangannya di daerah penelitian ini tidak lepas dari sifat geologis wilayah bersangkutan. Berdasarkan peta Geologi 1 : 250.000 Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Desa Hargorejo dapat dibedakan menjadi tiga wilayah geologi yaitu Andesit Tua formasi Bammellen, Formasi Nanggulan, Formasi Sentolo, dan Endapan Aluvium. Dengan demikian wilayah ini mempunyai latar belakang geologis yang berbeda-beda, akibatnya dalam perkembangan selanjutnya memiliki jenis tanah yang tidak sama, yaitu latosol, grumusol dan aluvial, umumnya terdapat pada daerah yang memiliki fisiografi datar hingga bergelombang.

C. SISTEM ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, Desa Hargorejo, secara administrasi langsung dibawah wewenang Kepala Wilayah Kecamatan, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terendah dan memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa dapat dibedakan menjadi Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dimana Kepala Desa dalam tugas sehari-hari dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan Kepala-Kepala Dusun. Tugas Sekretaris desa dalam membantu tugas Kepala Desa dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum.

Selain Kepala Desa, pemerintahan desa terdapat Lembaga Musyawarah desa, merupakan lembaga permusyawaratan atau permufakatan yang anggota-anggotanya berasal dari Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan serta Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa bersangkutan. LMD secara periodik menerima laporan Kepala Desa mengenai penyelenggaraan dan pertanggung jawaban bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum dan kegiatan gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam rangka menyukseskan pembangunan tingkat Desa, di daerah pedesaan berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 1971 jo Kepres No. 28 Tahun 1980, merupakan lembaga yang bersifat lokal dan secara organisator berdiri sendiri. Lembaga ini memiliki tugas membantu pemerintah Desa dibidang perencanaan pembangunan yang diambil berdasarkan musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan meumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa. Keanggotaan LKMD, terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat serta pimpinan lembaga masyarakat yang ada di desa.

D. KEPENDUDUKAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang penduduk di Desa Hargorejo, Kecamatan kokap Kabupaten Kulon Progo, diuraikan mengenai jumlah dan kepadatan, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk menurut pendidikan, komposisi penduduk menurut matapencaharian dan pertumbuhan penduduk. Hal ini sangat penting karena aspek penduduk merupakan faktor utama terjadinya perubahan di daerah bersangkutan. Disamping itu, dengan mengetahui keadaan penduduk dalam suatu wilayah dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan saat ini maupun untuk kepentingan masa mendatang atau pembangunan daerah bersangkutan dapat direncanakan dengan baik. Khususnya pembangunan

yang menyangkut sumberdaya hutan yang relatif luas bila dibandingkan dengan wilayah desa lain di Kecamatan Kokap, sehingga kelestarian lingkungan hidup umumnya dan hutan khususnya dapat dipertahankan. Kesemuanya ini dapat terwujud dengan baik kalau didukung partisipasi penduduk disekitar hutan milik pemerintah.

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk dan perkembangannya di suatu daerah sangat penting untuk diketahui. Hal ini disebabkan aspek jumlah penduduk erat berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan masalah lain serta dapat untuk memperkirakan kebutuhan saat ini dan saat mendatang. Berdasarkan data monografi Desa Hargorejo tahun 1996, jumlahnya sebesar 9770 jiwa. Jumlah penduduk sebanyak itu terdiri 4767 jiwa laki-laki dan 5003 jiwa wanita, sedang 2138 Kepala keluarga yang rata-rata memiliki 5 anggota keluarga.

Penduduk sebanyak 9770 jiwa menempati wilayah seluas 1453,29 hektar, sehingga kepadatan penduduknya sebesar 3,96 jiwa per hektar atau 396 jiwa per kilometer persegi. Apabila kepadatan penduduk Desa Hargorejo tidak mencakup luas hutan negara didapat sebesar 12,05 jiwa per hektar. Dengan demikian baik dilihat dari kedua-duanya, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk daerah penelitian relatif masih rendah. Namun demikian dengan perkembangan penduduk dari waktu yang menunjukkan kenaikan, akan selalu meningkat. Salah satu akibatnya adalah penduduk disekitar hutan akan memanfaatkan lahan hutan sebagai lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di daerah penelitian relatif masih rendah. Namun demikian dengan perkembangan penduduk dari waktu ke waktu yang menunjukkan kenaikan, akan meningkatkan kepadatan penduduk sehingga kebutuhan lahan akan selalu meningkat. Salah satu akibatnya adalah penduduk disekitar hutan akan memanfaatkan pendapatan keluarga. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di daerah penelitian dibandingkan kepadatan penduduk Kecamatan Kokap sebesar 546 jiwa per kilometer persegi dapat disebabkan banyak penduduk usia produktif pergi ke luar desa untuk mencari pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena lahan pertanian di Desa Hargorejo memiliki tingkat produktifitas lahan yang rendah atau tidak subur, sehingga akibatnya mendorong penduduk ke luar desa.

2. Komposisi Penduduk

Dengan memperhatikan komposisi penduduk disuatu wilayah mempunyai arti yang sangat penting, karena berbagai komposisi dapat dijadikan landasan untuk berbagai kebijakan. Munir (1982:5) menyatakan bahwa komposisi penduduk dapat diartikan sebagai distribusi atau penyebaran frekuensi sejumlah individu yang meliputi dalam jumlah penduduk tertentu yang memperlihatkan keadaan demografi. Komposisi penduduk dapat diartikan sebagai pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti biologis yang mencakup usia dan jenis kelamin; ekonomi meliputi penduduk aktif melakukan aktivitas ekonomi, lapangan pekerjaan dan tingkat pendapatan; sosial mencakup pendidikan, status perkawinan, dan geografis meliputi tempat tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan (Nurdin, 1981:20).

a. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan ciri dasar berbagai kelompok demografi. Hal ini disebabkan faktor umur dan jenis kelamin secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja seseorang sehingga dapat untuk mengetahui jumlah penduduk usia kerja, beban tanggungan dan struktur penduduk di Desa Hargorejo. Di samping itu, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dijadikan alat analisa perkembangan tingkat kelahiran, pertambahan penduduk, penduduk usia sekolah dan angkatan kerja. Dengan demikian misalnya angka tingkat kelahiran tinggi akan berpengaruh jumlah dan beban tanggungan keluarga pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan perkapita. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nurdin (1981:10) yang mengatakan bahwa struktur penduduk mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap aspek demografi dan sosial ekonomi penduduk.

Dalam penelitian ini yang dimaksud golongan usia kerja adalah usia 14 tahun keatas, karena pada umumnya usia penduduk Desa hargorejo pada usia diatas 14 tahun rata-rata sudah ikut melakukan aktivitas ekonomi membantu orang tua dalam kegiatan bertani di dalam kawasan hutan maupun diluar hutan. Dengan demikian faktor usia penduduk dalam suatu wilayah sangatberperan terhadap produktivitas angkatan kerja keluarga. Berdasarkan usia penduduk di Desa Hargorejo dapat diklasifikasikan menjadi usia (0 - 14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia sudah tidak produktif lagi (65 tahun keatas). dengan demikian dilihat dari klasifikasi tersebut, secara umum penduduk di daerah penelitian mempunyai struktur usia muda dan sebagian

besar penduduk berada di daerah penelitian mempunyai struktur usia muda dan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia produktif.

Tabel II.3
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	396	393	789
2.	5 - 9	350	330	680
3.	10 - 14	435	376	811
4.	15 - 19	426	347	773
5.	20 - 24	489	450	939
6.	25 - 29	448	477	925
7.	30 - 34	415	470	885
8.	35 - 39	270	297	567
9.	40 - 44	245	275	520
10.	45 - 49	257	335	592
11.	50 - 54	195	316	511
12.	55 - 59	235	307	542
13.	60 - 64	304	286	590
14.	65+	302	344	646
Jumlah		4767	5003	9770

Sumber : Data sekunder, 1996.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia kerja atau penduduk produktif (10-64 tahun) sebesar (78,35), dimana sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Di samping itu, dapat pula diketahui golongan umur produktif atau penduduk yang berusia antara 15 - 64 tahun di Desa Hargorejo sebanyak 6844 jiwa atau 70,05 %; golongan umur belum produktif sebanyak 2280 jiwa atau 23,33 %, dan golongan umur tidak produktif sebanyak 646 jiwa atau 6,61 %. Berdasarkan pengelompokan penduduk menurut umur tersebut, maka beban tanggungan penduduk di Desa Hargorejo pada tahun 1996 sebesar :

DR = jumlah penduduk belum produktif ditambah jumlah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk produktif

$$DR = \frac{\text{penduduk umur (0 - 14 tahun)} + \text{penduduk umur 65 + x k}}{\text{penduduk produktif (15 - 64 tahun)}}$$

$$DR = \frac{2280 + 646 \times 100\%}{6844} = \frac{292600}{6844} = 42,75\%$$

Dari perhitungan di atas, beban tanggungan penduduk Desa Hargorejo sebesar 42,75 persen, artinya bahwa setiap 100 orang yang dianggap aktif secara ekonomis menanggung 42,75 orang (44 orang) yang tidak berproduktif atau belum produktif secara ekonomi. Angka beban tanggungan tersebut dibandingkan dengan beban tanggungan Kabupaten Kulon Progo sebesar 51 persenden Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 49,20 persen (Biro Pusat Statistik DIY, 1990:35), angka beban tanggungan di Desa Hargorejo lebih rendah atau secara teoritis dari sudut pandang ekonomi keadaan penduduk Kabupaten Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Angka beban tanggungan tersebut dibandingkan dengan klasifikasi yang diajukan JE, Ismail (1960:206), termasuk rendah, karena termasuk kurang dari 60 persen. Dengan demikian secara teoritis angka beban tanggungan sebesar itu sangat menguntungkan penduduk dari aspek ekonomi desa secara keseluruhan.

b. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kemajuan suatu wilayah ditentukan beberapa faktor penting yang mencakup kualitas sumberdaya manusia. Salah satunya untuk mengetahui kualitas sumberdaya manusia indikatornya adalah tingkat pendidikan penduduk. Tingkat pendidikan penduduk, baik formal maupun non formal dapat mencerminkan tingkat kecerdasan dan ketrampilan sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat perkembangan kemajuan suatu wilayah. Dikaitkan dengan kelestarian sumberdaya alam, khususnya hutan, untuk penduduk yang tinggi tingkat pendidikannya memiliki respon yang positif dan selalu berusaha melestarikan lingkungan hutan. Disamping itu, secara individual tingkat pendidikan dapat mencerminkan status sosial seseorang dan menunjukkan kualitas tenaga kerja. Walaupun diakui bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak merupakan satu-satunya indikator yang memadai.

Tingkat pendidikan penduduk yang mendiami suatu wilayah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu penduduk berpendidikan rendah, menengah dan tinggi (Amin Dien, 1974:20). Penduduk dapat dikatakan berada pada kelompok pendidikan rendah meliputi tingkat sekolah dasar, pendidikan menengah meliputi SLTP sederajat dan pendidikan tinggi mencakup SLTA keatas. Berdasarkan tabel II.4 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk sebagian besar penduduk Desa mempunyai tingkat pendidikan telah menyelesaikan SD ke atas yang proporsinya sebesar 58,62 persen. Dilihat dari jumlah dan tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, proporsi tertinggi SLTP berada pada tamat SD sebesar 25,71 persen, disusul tamat SLTP sebesar 22,06 persen, belum sekolah dan proporsi terendah berada pada kelompok tamat akademik/perguruan tinggi sebesar 1,07 persen. tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan di Desa Hargorejo, dapat diperkirakan berkaitan dengan tersedianya sarana pendidikan di dalam desa. Selain itu, juga fasilitas pendidikan yang terdapat di daerah kota Yogyakarta.

Tabel II.4
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN
DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum sekolah	2155	22,06
2.	Tidak sekolah	767	7,85
3.	Tidak tamat SD	1121	11,47
4.	Tamat SD	2512	25,71
5.	Tamat SLTP	2134	21,84
6.	Tamat SLTA	977	10,00
7.	Akademi/PT	104	1,07
	Jumlah	9770	100,00

Sumber : Data sekunder, 1996.

Menurut Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa (1973:81) bahwa tingkat pendidikan penduduk di daerah pedesaan dapat digolongkan menjadi :

- Pendidikan rendah, jika penduduk yang tamat SD keatas kurang dari 30 persen
- Pendidikan sedang, jika penduduk yang tamat SD keatas antara 30 persen - 60 persen; dan
- Pendidikan tinggi, jika penduduk yang tamat SD keatas lebih dari 60 persen.

Dengan melihat angka-angka tersebut, maka tingkat pendidikan penduduk di daerah penelitian termasuk dalam katagori sedang. Relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat diduga disebabkan di daerah penelitian sangat minim tersedia sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan data di Kantor Desa Hargorejo, sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia terdiri dari Sekolah Tk 3 buah, SD sebanyak 8 buah, SLTP sebanyak 2 buah, dan SMTA sebanyak 1 buah. Sarana dan prasarana pendidikan ini relatif baru, sehingga generasi yang agak tua memperoleh pendidikan di luar desa.

c. Komposisi Penduduk Menurut Matapencaharian

Dari komposisi penduduk menurut matapencaharian akan dapat dilihat jenis aktivitas ekonomi penduduk dan jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Disamping itu, dari komposisi penduduk menurut matapencaharian juga berguna untuk mengetahui struktur ekonomi wilayah. Jenis pekerjaan penduduk merupakan suatu aktivitas manusia memanfaatkan potensi lingkungan yang tersedia, baik menyangkut lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Aktivitas ini dilakukan penduduk dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan untuk memperoleh taraf hidup yang sesuai dengan keinginannya. Namun disebabkan keadaan lingkungan alam dan sosial wilayah satu dengan lainnya sangat berbeda, maka lapangan pekerjaan yang dilakukan penduduk sangat dimungkinkan beraneka ragam. Di samping itu, lapangan pekerjaan yang ditekuni penduduk tidak sama, karena ditentukan oleh faktor individu, khususnya yang menyangkut pemilihan dari beberapa pilihan jenis pekerjaan. Dengan demikian disebabkan faktor individu penduduk satu dengan lainnya berbeda, maka peluang seseorang memperoleh jenis pekerjaan juga tidak sama. Perbedaan jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk dapat terjadi karena masing-masing individu memiliki tingkat adaptasi atau penyesuaian yang berbeda-beda. Hal ini untuk daerah penelitian dapat ditunjukan oleh pekerjaan sebagai petani yang dilakukan dalam kawasan hutan,

Tabel II.5
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATAPENCAHARIAN
DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Matapencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	4685	69,52
2.	Buruh tani	449	6,66
3.	Pedagang	296	4,29
4.	Tukang kayu/batu	289	4,27
5.	PNS / ABRI	531	7,88
6.	Industri kecil	285	4,23
7.	Lain-lain	204	3,02
Jumlah		6739	100,00

Sumber : Data sekunder, 1996.

Pada tabel II.5. terlihat bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah penelitian mempunyai mata pencaharian sebagai petani yang proporsinya sebesar 69,53 persen. Penduduk yang matapencahariannya sebesar 6,66 persen. Dengan demikian penduduk yang bekerja dibidang pertanian secara keseluruhan proporsinya sebesar 76,19 persen. Sedangkan sisanya sebesar 23,81 persen penduduk bekerja dibidang non pertanian yang mencakup pedagang (4,39 persen), tukang kayu/batu (4,27 persen), Pegawai Negeri/ABRI (7,88 persen) dan lain-lain (3,02 persen).

Tingginya proporsi penduduk yang bekerja dibidang pertanian, umumnya berupa pertanian lahan kering, berupa tegalan, pekarangan dan kebun. Akan tetapi ada beberapa penduduk untuk menambah pendapatan keluarga melakukan pekerjaan di luar pertanian seperti berdagang, tukang kayu dan industri kecil. Selain itu, khususnya penduduk disekitar kawasan hutan produksi milik Perhutani, banyak penduduk yang melakukan sistem pertanian lahan kering didalam kawasan hutan. Hal ini banyak dilakukan penduduk berdasarkan sistem kontrak dengan pihak perhutani selama 2 tahun. Selama tersebut, petani dapat menggarap lahan kawasan hutan yang hasilnya dapat dinikmati sendiri, dan penduduk/petani berkewajiban menanam dan merawat tabnaman hutan bersangkutan. Banyaknya penduduk yang

bekerja ganda, baik sektor pertanian maupun non pertanian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sunaga dan White (1980) yang menyatakan bahwa salah satu ciri penduduk desa di Pulau Jawa adalah mereka memperoleh tambahan penghasilan dari luar sektor pertanian pokok milik sendiri. Aktivitas ekonomi yang bersifat ganda ini bagi penduduk di daerah pedesaan, khususnya di daerah penelitian cukup besar artinya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari petani dan keluarganya.

3. Pertumbuhan Penduduk

Perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor demografis (Mantra, 1982). Faktor demografis tersebut meliputi kematian, kelahiran, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Dengan demikian pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah dapat dibedakan menjadi pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk bersih. Dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alami adalah merupakan selisih antara tingkat kelahiran dengan tingkat kematian kasar, sedangkan pertumbuhan penduduk bersih atau netto, dasar perhitungan dari jumlah penduduk tahun ke tahun tertentu yang didalamnya sudah memperhitungkan faktor migrasi, sehingga merupakan angka pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel II.6
JUMLAH DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK
DESA HARGOREJO TAHUN 1990 - 1996

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	1990	4549	4775	9324
2.	1991	4586	4810	9396
3.	1992	4615	4843	9458
4.	1993	4639	4869	9508
5.	1994	4718	4952	9670
6.	1995	4723	4957	9680
7.	1996	4767	5003	9770

Sumber : Data sekunder, 1996.

Pada tabel II.6. nampak bahwa selama 7 tahun terakhir ini mengalami kenaikan sejumlah 446 jiwa, atau rata-rata per tahun mengalami penambahan sejumlah 64 jiwa. Disamping itu pertumbuhan penduduk selama 7 tahun terakhir dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 P_t &= P_o \cdot e^{rt} \\
 9770 &= 9324 \cdot e^{rt} \\
 \frac{9770}{9324} &= 2,7182818^t \\
 \log 1,0478335548 &= rt \log 2,7182818 \\
 0,020292298 &= r \cdot 7 \times 0,434294477 \\
 r &= \frac{0,020292298}{3,040061339} = 0,006674 \text{ atau } 0,67 \%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian pertumbuhan penduduk di daerah penelitian rata-rata per tahun sebesar 0,67 %. Angka pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo sebesar 1,7 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,52 persen, jauh lebih rendah. Sekalipun pertumbuhan penduduk Desa Hargorejo dapat digolongkan rendah, namun melihat keadaan alam yang kurang subur dan sebagian besar merupakan hutan milik perhutani, maka dengan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut berpengaruh pada kepadatan penduduk serta naiknya angkatan kerja di waktu mendatang. Semakin padatnya penduduk di daerah penelitian akan mengakibatkan semakin tinggi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Dengan demikian agar lingkungan hutan tidak rusak dan terkendali pemanfaatan lahan kawasan hutan tidak rusak dan terkendali pemanfaatan lahan kawasan hutan diperlukan perencanaan yang matang dimasa mendatang.

E. SISTEM MATAPENCAHARIAN

Berdasarkan Biro Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (1995) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah Kulon Progo mempunyai matapencaharian dibidang pertanian dan terdapat di daerah

pedesaan. Hal ini nampaknya juga terjadi di Desa Hargorejo, sebagian besar penduduk terserap di bidang pertanian sebagai petani, yang mencakup petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani. Sedangkan lainnya memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin atau industri kecil, tukang kayu/batu dan sebagainya. Namun disebabkan wilayah desa Hargorejo, merupakan daerah kering, sehingga bentuk pertanian yang paling dominan adalah sistem pertanian lahan kering, yang mencakup lahan tegalan, perkebunan dan pekarangan. Kegiatan usaha tani lahan kering yang dilakukan petani di daerah penelitian berdasarkan pemilikan lahan pertanian dapat dibedakan pertanian lahan milik dan lahan pertanian lahan milik negara/Perhutani. Aktivitas pertanian lahan kering yang dilakukan sebagian selama 2 tahun, hasil dirasakan petani sendiri. Selain itu, petani mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menanam tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, kayu putih, orak-arik, yang bibitnya diberi oleh Perhutani, untuk menjaga kelestarian hutan produksi di Desa Hargorejo.

Pertanian lahan kering di dalam kawasan hutan yang sebagian besar dilakukan petani berupa jagung (*Zea mays*), ketela pohon (*Manihot utilissima*) dan kacang tanah. Pada awalnya jenis tanaman ini merupakan petunjuk dari Perhutani, karena jenis tanaman tersebut tidak mengganggu tanaman kehutanan. Selain itu, jenis tanaman tersebut bersifat musiman dan hanya dapat dilakukan pada musim penghujan atau *rendeng*. Dengan demikian kelestarian tanaman karena yang menjadi program pemerintah/Perhutani akan menjaga sepanjang musim, sedangkan tanaman keras yang menjadi program Perhutani terdiri dari kayu putih, mahoni, jati, orak-arik dan sebagainya. Sebaliknya tanaman kayu-kayuan untuk lahan milik yang dihutankan (*wanatani*) dilakukan secara tumpang sari, yaitu dibawah tanaman tegak berupa jagung, kacang tanah ketela, kacang tanah, koro, temu ireng dan sebagainya, sedangkan tanaman keras terdiri sengon, nangka, jambu atau *karang kitri*.

Disamping itu, penduduk khususnya petani disekitar kawasan hutan mengerjakan lahan milik dan lahan milik orang lain, dengan cara bagi hasil maro dan mertelu. Bagi petani yang memiliki lahan pertanian relatif sempit, umumnya kepala keluarga dan anggota keluarganya melakukan kegiatan non pertanian seperti buruh tani atau menjual tenaga. Kegiatan tani umumnya dilakukan antara jam 06.00 - 09.30 pagi dan sore hari antara 13.00 - 16.00 atau menurut istilah mereka *kesuk* dan rata-rata upah per kesuk sebesar Rp 1500,-

Kegiatan non pertanian lain, yang dilakukan sebagian petani di Desa Hargorejo adalah buruh *nderes* lahan milik orang lain, dengan cara bagi hasil. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah pendapatan keluarga, karena minimnya pendapatan dari aktivitas pertanian, baik lahan milik dan lahan dikawasan hutan. Minimnya pendapatan petani dari sektor pertanian di daerah penelitian disebabkan tanah umumnya tidak subur, bidang lahan miring dan terbatas untuk ditanami pada musim penghujan.

F. SISTEM PENGETAHUAN

Setiap bangsa di dunia baik yang hidup dinegara maju dengan kebudayaannya yang sangat kompleks, maupun bangsa atau suku bangsa yang masih hidup dengan budaya sederhana, semuanya itu mempunyai sistem pengetahuan. Koentjaraningkrat (1990:373), membagi sistem pengetahuan menjadi 7 kelompok. Dari ke 7 kelompok itu diantaranya adalah pengetahuan tentang alam sekitarnya dan alam flora di daerah tempat tinggalnya.

Pengetahuan tentang alam sekitarnya misalnya tentang musim, sifat atau gejala alam, dan sebagainya. Pengetahuan tersebut biasanya berasal dari kebutuhan praktis yang berhubungan dengan matapencaharian hidup, seperti bertani. Selain itu pengetahuan tentang alam flora kiranya juga cukup penting bagi kehidupan manusia, khususnya yang bermatapencaharian pokok sebagai petani. Mereka harus bisa mengetahui tentang alam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya.

Menurut Otto Sumarwoto, persepsi orang desa tentang kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh pandangan orang terhadap ekosistemnya. Dalam hubungannya dengan lingkungan hidup orang desa pada umumnya memiliki pandangan yang holistik. Oleh karena itu salah satu persepsi orang desa tentang kebutuhan dasar bukan mengutamakan pada kemakmuran materi, melainkan lebih dalam yaitu keserasian dirinya dengan lingkungan hidup (Sumarwoto, 1978: 12-15).

Di dalam masyarakat pedesaan yang pada umumnya matapencaharian pokoknya sebagai petani, pada usaha taninya memiliki sistem pengetahuan tersendiri. Para petani, khususnya di Jawa biasanya mengenal kalender atau sistem penanggalan yang disebut *pranotomongso*. Pengenalan tersebut didasarkan pada peredaran musim dari tahun ke tahun. Dalam satu musim pada penanggalan itu dibagi menjadi 12 *mongso*, yang masing-masing bernama: kali = 41 hari, karo = 23 hari, kalu = 24 hari, kapat = 25 hari, kalima = 27 hari = kanem = 43 hari, kapitu = 43 hari, kawolu = 26 hari,

kasongo = 25 hari, sasodo = 24 hari, sawelas = 23 hari, karolas = 41 hari (Daldjoeni, 1978: 67).

Pengetahuan tentang pranotomongso ternyata juga masih dimiliki dan secara tidak sadar dilaksanakan pula oleh masyarakat di daerah Hargorejo. Seperti yang dikemukakan oleh informan,

sak meniko nanem jagung utawi kacang wonten tegal utawi wono mboten saged dipun temtoaken wekdalipun, anargi wontenipun jawah mboten temtu. Mboten kados rumiyin wiwit wontenipun jawah mboten temtu. Mboten kados rumiyin wiwit wonten jawah meniko mongso kapat utawi kalima, nanging sak meniko saget majeng utawi malah mundur

(Sekarang menanam jagung atau kacang di tegal atau di hutan tidak dapat ditentukan waktunya secara pasti, sebab datangnya hujan tidak menentu. Tidak seperti pada masa dahulu mulai ada hujan saat mongso kapat atau kelima, tetapi sekarang bisa maju atau malah mundur).

Kalau kita amati pada saat sekarang memang sering kali musim hujan tidak seperti yang diperhitungkan oleh petani Jawa. Hal itu dikarenakan dimungkinkan adanya perubahan alam yang mempengaruhi datangnya musim hujan. Namun cara umum perhitungan pranotomongso ternyata sesuai dengan perhitungan musim, mongso kapat/kalima dapat jatuh pada bulan Oktober/ Nopember di mana musim hujan mulai tiba. Pada *mongso* itulah para petani umumnya mulai mengolah lahannya, baik membuat persemaian benih maupun mempersiapkan lahan untuk ditanami. Kemudian ada *mongso* dimana curah hujannya menurun terjadi pada mongso kapitu. Di mongso ini ada waktu beberapa hari hujan tidak turun, dan ini disebut dengan istilah *kendat* tidak hujan beberapa hari di saat musim hujan. Hal itu ternyata sangat bermanfaat bagi petani. Waktu tidak turun hujan beberapa hari tersebut akan memulihkan keseimbangan alam, kebutuhan tanaman secara alami dapat terpenuhi. Menurut informan petani kalau terjadi hujan terus menerus justru kurang baik untuk pertumbuhan tanaman terhalang oleh air. Dengan kata lain, adanya selang waktu tidak turun hujan beberapa hari tersebut, membuat pemulihan keseimbangan lingkungan hidup secara alami, dimana curah hujan di saat itu frekuensinya cukup tinggi.

Kecuali itu, sebagian petani/responden masih *ngugemi* (memegang/ menggunakan) pranotomomgso dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Mereka menggunakan hitungan tersebut tidak hanya diwaktu akan mengolah lahan pertanian, tetapi juga di bidang lainnya. Para orang tua di pedesaan biasanya sangat paham bagaimana cara menebang atau waktu kapan pohon jenis tertentu bisa ditebang. Pohon-pohon yang ditebang dengan menggunakan perhitungan

itu, adalah jenis yang dapat digunakan untuk keperluan bangunan seperti mahoni, jati, bambu, dan kelapa. Menurut mereka kalau menebang pohon untuk kepentingan bangunan yang salah perhitungan mongsonya akan merugikan. Sebab kayu atau pohon yang ditebang itu bila digunakan untuk keperluan bangunan akan diserang hama (insek), akan mudah keropos atau lapuk. Menurut informasi menebang pohon yang baik adalah pada saat mongso kasonga (kesembilan). Pada saat tersebut memang kalau kita lihat maka jatuh pada bulan Maret (Kamajaya, 1992: 9). Di bulan itu menurut perhitungan musim (di mana Indonesia hanya mengenal 2 musim yaitu kemarau dan penghujan) adalah sudah mendekati kemarau atau musim kering. Jadi dapat dimengerti mengapa menebang pohon untuk keperluan bangunan di mongso kasonga. Pada mongso itu diperkirakan curah hujan mulai menurun dan hujan mulai jarang, sehingga wajar bila mereka menebang pohon untuk bangunan. Oleh karena menjelang musim kemarau, maka kayu yang ditebang itu diperkirakan akan lebih cepat kering dan nantinya tentu akan mudah diolah untuk keperluannya. Selain itu pada musim menjelang kemarau ditandai pula dengan adanya gejala alam seperti munculnya cengkerik, gangsir dan garempung. Gejala alam tersebut menandakan musim penghujan akan segera berakhir dan musim kering atau kemarau akan tiba.

Dari data tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa sistem pengetahuan masyarakat tentang alam flora di sekitar tempat tinggalnya masih cukup dikenal. Walaupun secara sadar, terutama generasi mudanya juga mengikuti pranotomongso dalam hal-hal tertentu, yang sudah lama diterapkan oleh para orang tuanya. Menurut informasi para petani menanam tanaman seperti kacang dan jagung, baik yang ada di sekitar tempat tinggal (pekarangan) maupun di kebun atau hutan, dilakukan pada bulan September-nopember, dimana musim hujan mulai tiba. Perhitungan tersebut sesuai dengan pranotomongso (kapat-kalima), yang menurut orang tua mongso tersebut adalah saat yang baik untuk mulai menaburkan benih tanaman.

G. SISTEM TEKNOLOGI

Berdasarkan data monografi Desa Hargorejo, bahwa sebagian besar penduduk mempunyai matapencaharian di bidang pertanian. Usaha pertanian yang dilakukan penduduk disekitar kawasan hutan meliputi usaha tani lahan kering, baik berupa tegalan maupun kebun atau pekarangan. Disamping itu, aktivitas pertanian yang dilakukan sebagian besar penduduk disekitar hutan, baik pada lahan milik, juga banyak penduduk melakukan usaha pertanian lahan kering dalam kawasan hutan milik pemerintah/Perhutani. Penggarapan

lahan dalam kawasan hutan yang dilakukan petani hanya dilakukan pada musim penghujan, karena lahan dalam kawasan hutan sangat kering dan tidak subur yang ditunjukkan tanah yang berkrak. Dengan demikian lahan pertanian dalam kawasan hutan dan hutan wanatani, pada musim kemarau tidak dapat ditanami secara baik, untuk semua jenis tanaman bahan pangan, seperti jagung, kacang tanah dan ketela pohon.

Sangat terbatasnya air untuk berbagai jenis tanaman di musim kemarau, umumnya petani disekitar hutan mulai mengolah lahan dan menanam tanaman polowijo sebelum tiba hujan dan hujan pertama. Minimnya persediaan air lahan pertanian di daerah penelitian, menyebabkan lahan pertanian lebih panjang waktu “beronya” dibandingkan waktu tanam. Panjangnya waktu berolah lahan pertanian menyebabkan lahan kurang produktif, sehingga petani dan keluarganya pada musim kering banyak mencari tambahan penghasilan di luar desa. Selain itu, banyak aktivitas petani yang dilakukan di luar desa untuk mencari rumput untuk persediaan makanan ternak.

Dengan demikian secara umum teknologi pengolahan lahan pertanian di Desa Hargorejo masih bersifat tradisional, sehingga belum atau tidak terjadi mekanisasi pertanian modern. Peralatan yang umumnya digunakan petani dalam pengolahan lahan pertanian terdiri pacul, parang/arit, dandang dan sebagainya. Namun yang paling utama digunakan petani dikawasan hutan berupa cangkul dan “dandang”. Upaya petani dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian kering relatif kurang subur, sebagian besar memanfaatkan pupuk kandang yang berupa kotoran sapi dan ternak lainnya. Penggunaan teknologi pengolahan yang masih tradisional di daerah penelitian tidak terbatas pada aktivitas pertanian lahan kering, namun juga mencakup berbagai bidang seperti industri kecil, industri genteng dan industri kecil pembuatan gula kelapa. Disamping itu teknologi tradisional meliputi peralatan transportasi antar dusun, yang umumnya belum banyak dimanfaatkan penduduk di daerah penelitian atau Desa Hargorejo.

H. SISTEM KEPERCAYAAN

Dilihat dari segi agama yang dianut di Desa Hargorejo bahwa sebagian besar memeluk agama Islam yang proporsinya sebesar 93,18 persen. Sisanya penduduk agama protestan sebesar 2,33 persen dan Katholik sebesar 4,49 persen tabel II.7. Sekalipun proporsi pemeluk agama Islam sangat besar, sebagian kecil khususnya generasi tua masih menjalankan tradisi-tradisi, seperti membakar kemenyan dan membuat sesaji di tempat-tempat tertentu yang oleh sebagian masyarakat dianggap *angker* atau *wingit*. Hal ini dilakukan karena masyarakat

masih percaya bahwa kekuatan diluar manusia, terdapat kekuatan lain atau supranatural pada tempat-tempat yang dianggap wingit. Masih tebalnya kepercayaan tersebut, sebagian masyarakat menyelenggarakan upacara selamatan. Kegiatan ritual itu dikerjakan penduduk berdasarkan bahwa suatu usaha untuk memperoleh kedamaian dan keselarasan, baik untuk kepentingan bagi dirinya maupun keluarganya.

Tabel II.7
PENDUDUK DAN AGAMA YANG DIANUT DI DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	9104	93,18
2.	Katholik	439	4,49
3.	Kristen	227	2,33
	Jumlah	9770	100,00

Sumber : Data sekunder, 1996.

Tradisi daur hidup yang masih banyak dilakukan penduduk Desa Hargorejo, antara lain kehamilan, kelahiran, kematian, sunatan dan selamatan lainnya. Upacara tradisional yang menyangkut daur hidup bagi keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, selamatan diselenggarakan secara besar-besaran, sedangkan untuk keluarga yang kurang mampu umumnya dilakukan secara kecil-kecilan atau sederhana atau menurut istilah mereka disebut *climen*. Menurut penduduk selamatan yang diselenggarakan secara besar-besaran umumnya dilakukan keluarga yang memiliki status sosial tinggi, seperti Kepala Desa dan Pamong. Bagi masyarakat pada umumnya selamatan diselenggarakan secara sederhana dan ringkas. Untuk jenis upacara tradisional yang diselenggarakan bersama-sama anggota masyarakat lainnya, seperti *bersih desa* dan *baritan*, keperluan penyelenggaraannya ditanggung bersama secara gotong royong. Hal ini dilakukan masyarakat, ujudnya ditujukan kepada leluhur yang telah meninggal dan tempat yang dianggap *wingit* agar memberi perlindungan dan keselamatan kepada semua warga masyarakat, sehingga upacara bersangkutan mengandung makna simbolis yang suci dan dirasakan warga masyarakat.

Kegiatan upacara-upacara berhubungan erat dengan tingkat religius dan emosi keagamaan yang dianut anggota masyarakat. Kesemuanya timbul dari rasa takut dan perasaan kurang tentram (kemrungsung) dalam mengarungi kehidupan, apabila tidak melakukan seperti yang dilakukan nenek moyang atau orang tuanya. Kepercayaan yang sudah berakar kuat dalam diri anggota masyarakat, bila tidak menyelenggarakan upacara tradisional akan menimbulkan perasaan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang diyakini datang dari roh leluhur. Dalam rangka penduduk mengatasi hal tersebut, sebagian penduduk membuat sesaji dan membakar *kemenyan* pada tempat-tempat *angker*, misalnya tempat bekas pohon serut, tempat hutan jati kerdil di Gunung Jeruk yang dilakukan setiap malam Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon.

Berdasarkan pengakuan penduduk di Desa Hargorejo, khususnya golongan tua setiap tahun melakukan kegiatan upacara tradisional tersebut mengungkapkan bahwa setelah menyelenggarakan upacara hajatnya menjadi tenang, sebaliknya andaikata belum atau tidak melakukan kewajiban ada perasaan *was-was*, takut akan timbul suatu petaka bagi dirinya dan keluarganya. Dengan demikian upacara tradisional dalam masyarakat merupakan fenomena sosial dalam masyarakat merupakan fenomena sosial untuk masyarakat pendukungnya dan dapat berfungsi sebagai pengendali sosial (sosial kontrol) yang dapat dijadikan landasan dalam mengadakan hubungan sosial kemasyarakatan, dan dengan lingkungan alam. Kesemuanya ini dilakukan sebagian masyarakat, bertujuan untuk mendapatkan keselarasan hubungan manusia dengan makrokosmos.

BAB III

HUBUNGAN PENDUDUK DENGAN HUTAN

Dalam rangka untuk mengetahui keterkaitan antara penduduk dengan ekosistem hutan di daerah penelitian dapat ditelusuri dari kegiatan formal dan informal penduduk dalam kawasan hutan. Aktivitas penduduk dalam hutan yang bersifat formal dapat ditelusuri dari waktu curahan jam kerja petani dalam kawasan hutan. Di samping itu, hubungan penduduk dengan hutan juga dapat ditunjukkan pendapatan keluarga yang berasal dari aktivitas pertanian dalam kawasan hutan.

Dengan demikian secara teoritis petani disekitar hutan menguasai lahan pertanian luas mempunyai rata-rata curahan jam kerja dalam kegiatan di dalam kawasan hutan lebih tinggi dibandingkan dengan curahan jam kerja petani yang berlahan sempit. Begitu pula dari segi pendapatan keluarga, bagi petani yang berlahan luas, sumbangan pendapatan petani yang berlahan sempit. Petani yang mempunyai lahan pertanian yang berlahan sempit mempunyai pendapatan dari sektor pertanian relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan pertanian lahan kering dalam kawasan hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan total keluarga, maka semua kebutuhan sehari-hari petani dan keluarganya relatif tercukupi.

Aktivitas penduduk disekitar hutan di daerah penelitian sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan pertanian lahan kering dikawasan hutan, dan ada sebagian petani yang lahan miliknya, baik berupa kebun maupun pekarangan yang dihutankan dengan sistem wanatani (*agroforestry*). Lahan pertanian milik penduduk disekitar kawasan hutan yang di tanami jenis kayu-kayuan, seperti bambu, jati, mahoni, dan kayu akasia, dan dibawah tanaman tegak ditanami bahan makanan (polowijo). Hal ini dimaksudkan sebagai wilayah penyangga, agar hutan pokok tidak rusak serta terjaga dari gangguan yang dapat mengancam kelestarian hutan. Selain itu, wanatani dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani atau penduduk disekitar kawasan hutan milik Perhutani, melalui hasil hutan seperti kayu-kayuan, rumput dan bahan makanan dibawah tanaman tegak.

Untuk memberikan gambaran tentang hubungan penduduk dengan hutan di daerah penelitian berikut ini diuraikan antara lain : pertanian di dalam kawasan hutan, kayu bakar, hasil hutan non kayu, tahap-tahap pertanian dalam

kawasan hutan dan periode kegiatan pertanian dan *bero* dalam kawasan hutan dan wanatani.

A. PERTANIAN

1. Pertanian Dalam Kawasan Hutan

Kawasan hutan di daerah penelitian merupakan hutan produksi dan lindung terbatas yang dikuasai pemerintah (PERHUTANI), sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan produksi dan lindung terbatas berhubungan dengan PERHUTANI. Sehubungan hutan di daerah penelitian berfungsi sebagai hutan produksi dan lindung terbatas merupakan hutan yang melibatkan masyarakat disekitar hutan, maka masyarakat sekitar hutan, maka masyarakat sekitar hutan mempunyai peluang bekerja didalam kawasan hutan.

Ditinjau dari topografinya hutan produksi dan lindung terbatas di Desa Hargorejo merupakan kawasan pegunungan dengan kondisi tanah miring hingga sangat terjal. Selain itu, ditinjau dari jenis tanahnya kawasan hutan mempunyai jenis tanah yang peka terhadap erosi dan merupakan tanah yang hanya cocok untuk tanaman keras dan pertanian lahan kering, sehingga air tanah dapat dikatakan merupakan penghambat utama untuk kegiatan pertanian. Melihat keadaan alam tersebut memungkinkan terjadinya ancaman bahaya erosi musim penghujan. Untuk menanggulangi ancaman bahaya erosi dan meningkatkan kandungan air limpasan, pihak PERHUTANI setempat mencanangkan sistem terasering dan melaksanakan persiapan tanam kembali dengan cara menanam tanaman tumpangsari dan kacang-kacangan. Kegiatan tersebut dengan mengikut sertakan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan melakukan kegiatan usaha tani di kawasan hutan. Mereka tidak dipungut biaya, melainkan diharuskan menanam tanaman hutan dari PERHUTANI serta diharuskan menjaga dan merawat tanaman tersebut sebagai imbalannya pihak perhutani memberi kesempatan usaha pertanian dalam kawasan hutan untuk dipetik hasilnya guna keperluan petani dan keluarganya.

a. Alasan Responden Melakukan Usaha Tani Di Kawasan Hutan

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kegiatan yang dicanangkan PERHUTANI memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan usaha tani di kawasan hutan. Keadaan ini menguntungkan masyarakat, karena masyarakat dapat menambah penghasilan keluarga. Sehubungan luas lahan yang dibuka untuk usaha tani terbatas, maka tidak semua masyarakat

mendapat kesempatan. Berdasarkan hasil penelitian ternyata dari 60 responden yang mendapat kesempatan mengolah lahan di kawasan hutan hanya 46 responden atau 76,70 persen dan sisanya sebanyak 14 responden (23,30%) tidak menggarap lahan di kawasan hutan. Mereka yang melakukan kegiatan pengolahan lahan di kawasan hutan tertentu saja mempunyai berbagai pertimbangan atau alasan tertentu, yang masing-masing petani mempunyai alasan yang tidak sama. Alasan petani yang melakukan usaha tani dalam kawasan hutan selengkapnya dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III. 1
ALASAN RESPONDEN MELAKUKAN USAHA TANI
DI KAWASAN HUTAN DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No	Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Untuk menambah pendapatan rumah tangga karena lahan milik sendiri tidak subur dan hasilnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga	28	60,87
2.	Mendapat izin PERHUTANI untuk menggarap lahan di kawasan hutan dan menjaga /merawat semua jenis tanaman di hutan.	11	23,91
3.	Untuk menambah surplus pendapatan usaha tani milik sendiri.	4	8,70
4.	Tempat tinggal relatif dekat dengan kawasan hutan dan mendapat kesempatan untuk menggarap.	3	6,52
	Jumlah	46	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.1 menunjukkan bahwa responden yang melakukan usaha tani di kawasan hutan sebagian besar (60,87%) mempunyai alasan untuk menambah penghasilan atau pendapatan rumah tangga sehubungan lahan milik

tidak subur, sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Urutan kedua sebesar (23,91% adalah mereka yang mempunyai alasan mendapat ijin dari PERHUTANI untuk menggarap lahan di kawasan hutan dan menjaga atau merawat jenis tanaman di hutan. Sisanya adalah responden yang mempunyai alasan menambah surplus pendapatan usaha tani milik sendiri (8,69%) dan 6,52% adalah mereka yang mempunyai alasan tempat tinggal sangat dekat dengan kawasan hutan dan mendapat kesempatan untuk mengerjakannya.

Dengan mengacu dari alasan responden dapat disimpulkan bahwa petani yang melakukan usaha tani di kawasan hutan merupakan aktivitas untuk memperoleh penghasilan tambahan atau dapat dikatakan mempertimbangkan faktor ekonomis. Selain itu juga mempertimbangkan kelestarian hutan. Bagi mereka yang beralasan faktor ekonomis dapat dikatakan cukup wajar sehubungan petani (responden) dalam hidupnya mengandalkan dari sektor pertanian, sedangkan pertanian yang dikelola merupakan pertanian lahan kering yang tentu saja hasilnya dapat dikatakan minim. Sedangkan petani (responden) yang beralasan mendapat ijin dan menjaga tanaman hutan, dapat dikatakan aktivitas tersebut sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang mengelola lahan di kawasan hutan yang merupakan peraturan dari PERHUTANI. Walaupun mereka yang beralasan menambah penghasilan tetap melakukan aktivitas pertaniannya, bukan berarti mereka tidak memelihara tanaman hutan.

Apabila kita tinjau dari apa yang dianjurkan atau apa yang telah dicanangkan oleh PERHUTANI dapat dikatakan responden telah melaksanakannya. Hal ini nampak dari apa yang dilakukan responden di kawasan hutan yaitu satu sisi menanam bibit tanaman hutan dan satu sisi menanam jenis tanaman pangan. Tanaman pangan yang ditanam di kawasan hutan menurut informasi adalah jagung, ketela dan kacang-kacangan. Secara teoritis tanaman pangan sangat cocok atau sesuai ditanam pada lahan dengan jenis tanah seperti di daerah penelitian. Namun disebabkan masing-masing petani atau responden mempunyai kepentingan dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, maka dimungkinkan alasan petani dalam memilih jenis tanaman pangan sangat bervariasi.

Tabel III. 2
ALASAN RESPONDEN MEMILIH JENIS TANAMAN PANGAN
DI KAWASAN HUTAN DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No	Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Jenis tanaman tersebut mudah tumbuh atau cocok dengan jenis tanah di kawasan hutan.	14	30,44
2.	Tanaman tersebut selain menghasilkan bahan pangan dan dapat untuk makanan ternak dan tidak mengganggu tanaman hutan	16	34,78
3.	Hasil tanaman tersebut cepat di- uangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	11	23,91
4.	Tanaman bersangkutan relatif mudah mengurus dan tidak perlu penggunaan pupuk yang banyak (pupuk kimia).	5	10,87
	Jumlah	46	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.2 dapat diketahui bahwa alasan responden menanam tanaman pangan di kawasan hutan cenderung pada alasan ekonomis. Keadaan ini dapat dikatakan wajar sehubungan masyarakat di daerah penelitian menggantungkan hidupnya dari pertanian, sedangkan pertanian di lahan milik dapat dikatakan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dikarenakan merupakan pertanian lahan kering, yang menyebabkan penghasilan rendah, akibatnya mendorong petani disekitar kawasan hutan, melakukan usaha pertanian didalam kawasan hutan untuk meningkatkan pendapatan petani dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarganya.

Menurut informasi yang diperoleh dari lapangan, tanaman pangan yang ditanam di kawasan hutan adalah jagung, ketela pohon dan kacang tanah, tetapi menurut pengamatan yang dilakukan temayata tanaman yang ditanam hanyalah

ketela, sedangkan tanaman yang jagung dan kacang-kacangan dapat dikatakan ditanam pada waktu musim hujan. Keadaan itulah yang menyebabkan penghasilan rumah tangga dari usaha tani tergolong rendah. Selain itu rendahnya penghasilan petani disekitar hutan yang mengerjakan lahan dalam hutan, juga dipengaruhi oleh luas lahan garapan dan jenis tanaman yang diusahakan.

b. Luas Lahan Garapan Dalam Kawasan Hutan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan luas lahan garapan dalam kawasan hutan adalah semua lahan di dalam hutan yang digarap masing-masing petani (responden). Penggarapan lahan tersebut pada dasarnya merupakan suatu langkah penyuburan tanah untuk kepentingan PERHUTANI yang bermanfaat sebagai pengendali ancaman erosi, sehingga petani dalam menggarap lahan pertanian di kawasan hutan tidak dipungut biaya, melainkan diwajibkan memelihara semua tanaman yang ada di hutan, sedangkan hasilnya dari lahan tersebut yang digarap menjadi hak bagi petani penggarap.

Seperti apa yang telah diuraikan dimuka bahwa dari 60 responden yang menggarap lahan di kawasan hutan hanya 46 responden (76,70%). Dari 46 responden tersebut menunjukkan bahwa besar responden (54,35%) menggarap lahan antara 0,1 hektar sampai dengan 0,2 hektar, dan yang paling sedikit (6,52%) adalah responden yang menggarap lahan seluas kurang dari 0,1 hektar. Sisanya (39,13%) adalah responden yang menggarap lahan yang luasnya lebih dari 0,2 hektar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menggarap lahan di kawasan hutan cenderung pada luas di bawah atau kurang dari 0,2 hektar. Luas ini masih dapat digolongkan sempit, sehingga sudah sewajarnya kalau usaha tani dikawasan hutan merupakan suatu kegiatan untuk menambah penghasilan rumah tangga, oleh karena itu dapat diduga bahwa luas lahan yang digarap petani (responden) dalam dikawasan hutan baik itu yang luasnya diatas 0,2 hektar, luasnya masih dibawah luas lahan milik. Keadaan itu dapat dilihat pada tabel III.3.

Tabel III. 3
LUAS LAHAN GARAPAN, USAHA TANI DI KAWASAN HUTAN
MENURUT PEMILIKAN LAHAN PERTANIAN DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Luas Usaha Tani di Kawasan hutan.	Luas Pemilikan Lahan (ha)							
		< 0,25		0,25 - 0,50		> 0,5		Jml	%
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1.	< 0,1	-	-	-	-	3	50,00	3	6,52
2.	0,1 - 0,2	9	40,00	14	77,78	2	33,33	25	54,35
3.	>0,2	13	60,00	4	22,22	1	16,67	18	39,13
Jumlah		22	100,00	18	100,00	6	100,00	46	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.3 menunjukkan bahwa luas pemilikan lahan berpengaruh terhadap luas lahan garapan di kawasan hutan. Hal ini ditunjukkan oleh naiknya persentase luas lahan garapan pada luas pemilikan lahan kurang dari 0,25 hektar (40,00-60,00 persen). Sebaliknya pada kelompok petani yang memiliki lahan antara 0,25 - 0,50 hektar dan lebih 0,50 hektar memperlihatkan persentase menurun, masing-masing sebesar 77,78 - 22,22 persen dan 50,00 - 33,33 - 16,67 persen. Dengan demikian antara luas pemilikan lahan dengan luas lahan garapan di kawasan hutan terdapat hubungan negatif, yaitu semakin luas lahan milik semakin sempit lahan garapan di kawasan hutan. Ini dapat terjadi karena bagi petani yang memiliki lahan relatif luas memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani berlahan sempit, sehingga kebutuhan pokok keluarga relatif terpenuhi. Sebaliknya bagi petani yang memiliki lahan sempit (kurang dari 0,25 hektar) terdapat peluang kerja lebih banyak dan penghasilannya rendah, akibatnya mendorong melakukan usaha tani di kawasan hutan.

Tabel III.4
LUAS LAHAN GARAPAN DALAM KAWASAN HUTAN
DAN TAKSIRAN RATA-RATA JAM KERJA SELAMA 6 BULAN
DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Luas lahan garapan	Jumlah	Persentase (%)	Rata-rata jam kerja selama 6 bulan
1.	< 0,1	3	6,52	69,33
2.	0,1 - 0,2	25	54,35	94,76
3.	> 0,2	18	39,13	127,16
Jumlah		46	100,00	105,78

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.4 ternyata semakin luas lahan garapan semakin besar pula rata-rata jam kerjanya. Apabila dilihat rata-rata jam kerja dari seluruh responden yang mengerjakan lahan di kawasan hutan menunjukkan bahwa setiap responden dalam satu harinya dapat dikatakan mengerjakan usaha tani kurang dari satu jam. Keadaan ini dapat dikatakan cukup wajar sehubungan jenis tanaman yang ditanam di kawasan hutan adalah ketela, sehingga tidak banyak memerlukan tenaga dan waktu. Dengan demikian dapat diduga karena rendahnya rata-rata curahan jam kerja petani dalam aktivitas usaha tani dalam kawasan hutan, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan yang relatif rendah.

c. Pendapatan Responden Dari Usaha Tani Dalam Kawasan Hutan

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa usaha tani dalam kawasan hutan merupakan kegiatan tambahan petani di sekitar hutan, sehingga dapat diduga penghasilannya relatif rendah dari pada penghasilan petani dari pertanian lahan milik. Sehubungan aktivitas tersebut, rata-rata memerlukan jam kerjanya relatif dibandingkan dengan curahan jam kerja petani pada lahan milik. Selain itu rendahnya rata-rata curahan jam kerja dalam kegiatan petani dalam hutan, juga disebabkan umumnya petani di kawasan hutan mengerjakan lahan dalam

hutan relatif sempit, sehingga pendapatannya dan rata-rata curahan jam kerjanya juga rendah dibandingkan dengan usaha tani pada lahan milik.

Besarnya pendapatan usaha tani, baik berasal di lahan milik maupun usaha tani di kawasan hutan sangat ditentukan oleh jenis tanaman maupun luas lahan garapan. Dapat diduga bahwa semakin luas lahan garapan dengan jenis tanaman yang sama maka cenderung semakin besar pula pendapatannya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Hargorejo menunjukkan bahwa semakin luas lahan garapan petani menunjukkan semakin besar pendapatan petani dari sektor pertanian. Selanjutnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III. 5
LUAS LAHAN GARAPAN DALAM KAWASAN HUTAN DAN
RATA-RATA PENDAPATAN PERTANIAN DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Luas lahan garapan (Ha)	Jumlah	Persentase (%)	Rata-rata pendapatan petani (Rp)
1.	< 0,1	3	6,52	68.333,33
2.	0,1 - 0,2	25	54,35	84,060,00
3.	> 0,2	18	39,13	113.277,00
J u m l a h		46	100,00	94.467,086

Sumber : Data primer, 1996

Berdasarkan tabel III.5 nampak bahwa luas lahan garapan yang paling sempit (< 0,1 Ha) rata-rata pendapatan Rp. 68.333,33 per tahun sedangkan luas lahan garapan paling luas (0,2 Ha) pendapatannyapun semakin tinggi yaitu rata-rata sebesar Rp 113.277,- per tahun. Untuk luas lahan garapan yang luasnya 0,1 Ha - 0,2 Ha pendapatannya rata-rata pertahun sebesar Rp 84.060,-. Bagi mereka (responden) yang luas lahan garapannya tergolong sempit (kurang dari 0,2 Ha) dengan pendapatan kurang dari Rp 100.000,- per tahun persentasenya dapat dikatakan cukup tinggi yaitu sebesar 60,87 persen, sedangkan lahan garapan yang luasnya lebih dari 0,2 Ha dengan pendapatan lebih rata-rata lebih dari Rp 100.000,- pertahun hanya sebesar 39,13 persen.

Apabila ditinjau secara keseluruhan responden di daerah penelitian, rata-rata pendapatan perbulan kurang dari Rp 10.000,- dari pertanian dalam kawasan hutan. Keadaan ini dapat dikatakan cukup wajar, sehubungan jenis tanaman yang ditanam hanyalah ketela dan terbatas pada musim penghujan, yang memungkinkan hasilnya sangat minim. Selain itu sesuai dengan alasan responden bahwa menggarap lahan pertanian di kawasan hutan merupakan pendapatan tambahan petani, yang merupakan suatu aktivitas usaha tani dalam hubungannya dengan usaha pengendalian erosi, sehingga luas lahan garapan yang diperoleh dari PERHUTANI sifatnya hanya sementara waktu.

Berdasarkan pendapatan rata-rata responden dari usaha tani di kawasan hutan dapat dikatakan sedikit banyak merupakan suatu sumbangan yang berarti bagi responden untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin luas lahan milik, ternyata sumbangan pendapatan usaha tani di kawasan hutan semakin kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai besar kecilnya sumbangan pendapatan usaha tani di kawasan hutan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III.6
LUAS PEMILIKAN LAHAN, JUMLAH RESPONDEN DAN PERSENTASE
SUMBANGAN PENDAPATAN DARI USAHA TANI DI KAWASAN HUTAN
TERHADAP PENDAPATAN TOTAL KELUARGA DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Luas Pemilikan lahan (Ha)	Jumlah	Rata-rata pendapatan total Keluarga (Rp.)	Rata-rata pendapatan dari usaha tani di kawasan hutan (Rp.)	% pendapatan dari pendapatan total
1.	< 0,25	22	210.159,1	78.704,5	37,45
2.	0,25 - 0,50	18	231.388,9	72.401,6	31,29
3.	> 0,50	6	461.666,67	112.000,0	24,26
Jumlah		46	251.271,70	80.576,1	32,06

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.6 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai luas pemilikan lahan kurang dari 0,25 hektar persentase sumbangan pendapatan usaha tani dari lahan milik sebesar 60,56 persen, persentase sumbangan pendapatan usaha tani dari kawasan hutan sebesar 37,45 persen. Responden yang mempunyai luas pemilikan lahan antara 0,25 hektar samapai 0,50 hektar, persentase sumbangan pendapatan usaha tani dari lahan milik sebesar 68,71 persen dan persentase sumbangan dari lahan milik sebesar 68,71 persen dan persentase sumbangan dari lahan di kawasan hutan sebesar 31,29 persen. Sebaliknya bagi responden yang memiliki lahan pertanian lebih dari 0,50 hektar persentase sumbangan pendapatan usaha tani dari lahan milik sebesar 76,74 persen, sedangkan sumbangan usaha tani dari dalam kawasan hutan sebesar 24,26 persen.

Berdasarkan temuan lapangan, ternyata semakin luas pemilikan lahan, sumbangan pendapatan usaha tani dari kawasan hutan semakin kecil. Keadaan itu dapat dikatakan cukup wajar sehubungan apa yang telah disajikan pada tabel III.6. menunjukkan bahwa semakin luas pemilikan lahan pertanian mempunyai, luas lahan garapan dalam dikawasan hutan semakin sempit, sehingga persentase sumbangan pendapatan petani semakin rendah.

2. Pertanian Wanatani (Agro forestry)

Yang dimaksud wanatani pada penelitian ini adalah lahan milik milik petani berupa pekarangan dan tegalan yang dihutankan (BPS,1995:4). Fungsi wanatani sangat penting karena merupakan kawasan penyangga hutan produksi milik perhutani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanatani berfungsi sebagai penanggulangan bahaya erosi, meningkatkan kandungan air dan meningkatkan pendapatan petani dari pertanian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pertanian wanatani merupakan lahan pekarangan atau tegalan yang ditanami jenis tanaman keras seperti lahan di kawasan hutan. Di samping itu dibawah tanaman tegak dibudidayakan tanaman pangan, seperti ketela, jagung, kacang, koro, dan sebagainya. Dengan demikian pertanian sistim wanatani pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan pertanian yang dilakukan dalam kawasan hutan.

a. Alasan Petani Melakukan Usaha Tani Di Lahan Wanatani dan Alasan Tidak Melakukan Usaha Tani Di Kawasan Hutan

Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa dari 60 responden terdapat 46 responden melakukan usaha tani di kawasan hutan, sedangkan sisanya

sebanyak 14 responden tidak melakukan usaha tani di kawasan hutan; melainkan melakukan usaha tani di lahan wanatani di lahan wanatani. Responden yang tidak melakukan usaha tani di kawasan hutan tentu saja mempunyai alasan tertentu, dan ini ditunjukkan pada tabel III.7.

Tabel III. 7
ALASAN PETANI (RESPONDEN) TIDAK MELAKUKAN
USAHA TANI DI KAWASAN HUTAN
DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak mendapat pembagian atau jatah dari PERHUTANI	3	21,43
2.	Tidak ada waktu luang, karena mengerjakan lahan milik sendiri	8	57,14
3.	Umur sudah tua dan lokasi hutan relatif jauh	3	21,43
	Jumlah	14	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (57,14%) tidak melakukan usaha tani di kawasan hutan mempunyai alasan tidak ada waktu luang karena mengerjakan lahan milik sendiri, sisanya masing-masing 21,43 persen mempunyai alasan tidak mendapat pembagian atau jatah dari PERHUTANI dan 21,43 persen mempunyai alasan umur sudah tua serta lokasi hutan relatif jauh.

Tingginya proporsi alasan petani yang mengatakan tidak ada waktu luang karena mengerjakan lahan milik sendiri, sebesar 57,14 persen. Hal ini disebabkan petani sistem wanatani memiliki lahan pertanian relatif luas atau lebih 0,50 hektar, sehingga untuk mengerjakan lahan tersebut memerlukan waktu curahan jam kerja relatif lama, akibatnya tidak ada waktu luang untuk mengerjakan lahan dalam kawasan hutan disebabkan karena petani sistem wanatani memperoleh lahan pertanian relatif luas (lebih dari 0,50 hektar), sehingga banyak curahan jam kerja pada lahan milik.

Dari 14 petani yang melakukan sistim wanatani di Desa Hargorejo memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan tersebut meliputi untuk meningkatkan penghasilan dan menambah makanan ternak, menanggulangi bahaya erosi dan karena memperoleh bibit tanaman keras dari perhutani, selengkapny alasan petani melakukan wanatani dapat dilihat pada tabel pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 8
ALASAN PETANI (RESPONDEN) MELAKUKAN USAHA TANI
DI WANATANI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	A l a s a n	Jumlah	Persentase
1.	Meningkatkan penghasilan dan menambah makanan ternak.	7	50,00
2.	Menanggulangi bahaya erosi atau tanah longsor.	4	28,57
3.	Memperoleh bibit tanaman kehutanan dari PERHUTANI.	3	21,43
J u m l a h		14	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.8. menunjukkan bahwa sebagian besar responden (50,00%) mempunyai alasan menanggulangi bahaya erosi atau tanah longsor. Sedangkan yang terakhir (21,43%) mempunyai alasan memperoleh bibit tanaman kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani (responden) cenderung beralasan ekonomi. Walaupun ada yang beralasan pelestarian lingkungan, namun persentase hanya kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani (responden) melakukan wanatani, selain mempertimbangkan faktor ekonomis juga mempertimbangkan pelestarian lingkungan. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden menyadari keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka harus beradaptasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal ini terlihat bahwa mereka dalam melakukan usaha tani di wanatani selalu mempertimbangkan keadaan lahan-lahannya, yaitu dengan cara tersering seperti apa yang telah dianjurkan oleh PERHUTANI.

b. Luas Lahan Garapan Wanatani

Penggarapan lahan wanatani pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penggarapan lahan di kawasan hutan. Hal ini ditunjukkan pula oleh adanya beberapa responden yang mengatakan bahwa kalau menebang pohon di wanatani harus ditanam kembali bibit yang sama, selain itu ada pula yang mengatakan bahwa untuk menebang pohon di wanatani terlebih dahulu harus memberitahu pada PERHUTANI. Keadaan ini cukup wajar sehubungan wanatani merupakan kawasan penyangga hutan.

Kegiatan yang dilakukan di wanatani pada dasarnya seperti yang telah dikemukakan di muka yaitu satu sisi untuk pelestarian lingkungan sisi lain untuk menambah pendapatan keluarga. Keadaan itu terlihat jenis tanaman yang ditanam selain tanaman keras jangka panjang yang akarnya dapat mengendalikan tanah longsor, serta jenis tanaman pangan, yang daunnya dapat menutup permukaan tanah sehingga erosi tidak terjadi, serta dapat menyuburkan tanah.

Penggarapan lahan wanatani yang dilakukan petani (responden) sangat bervariasi tergantung luas lahan dan kesempatan atau waktu luang yang ada. Keadaan ini disebabkan keadaan lingkungan daerahnya yang merupakan daerah tidak subur ditunjang lagi pada waktu penelitian pada musim panas, sehingga tanaman pangan cenderung tidak menunjukkan hasil yang baik, dan yang nampak hanya tanaman ketela. Mengenai luas lahan garapan wanatani ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III.9
LUAS LAHAN GARAPAN WANATANI
DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Luas lahan garapan (Ha)	Jumlah	Persentase
1.	< 0,1	2	14,30
2.	0,1 - 0,2	3	21,43
3.	> 0,2	9	64,27
J u m l a h		14	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.9. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (64,27%) mempunyai luas garapan lebih 0,2 hektar. Urutan kedua adalah responden dengan luas lahan garapan antara 0,1 - 0,2 hektar sebesar 21,43 persen. Dan yang paling sedikit adalah responden yang mempunyai lahan garapan kurang dari 0,1 hektar yaitu sebesar 14,30 persen.

Seperti telah dikemukakan di muka kegiatan usaha tani di wanatani pada dasarnya untuk menambah penghasilan keluarga dan sisi lain untuk pelestarian lingkungan hutan. Dengan demikian penggarapan lahan dibawah tanaman tegak merupakan prioritas kedua, setelah tanaman keras atas lahan yang dihutankan. Pada umumnya lokasi wanatani jauh dari pemukiman penduduk dan dekat dengan kawasan hutan produksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dimungkinkan luas lahan garapan wanatani lebih sempit dibandingkan luas lahan garapan pada lahan milik bukan wanatani. Mengenai hubungan luas lahan garapan wanatani dengan luas pemilikan lahan ditunjukkan pada tabel III. 10.

Tabel III. 10
LUAS LAHAN GARAPAN WANATANI MENURUT
LUAS PEMILIKAN LAHAN DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Luas Lahan Wanatani (Ha)	Luas Pemilikan Lahan (Ha)							
		< 0,25		0,25 - 0,50		> 0,50		Jml	%
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		
1.	< 0,1	2	50,00	-	-	-	-	2	14,29
2.	0,1 - 0,2	2	50,00	1	25,00	-	-	3	21,42
3.	>0,2	-	-	3	75,00	6	100,00	9	64,29
J u m l a h		4	100,00	4	100,00	6	100,00	14	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.10 nampak bahwa semakin luas pemilikan lahan, semakin luas pula lahan garapan wanatani. Keadaan ini kebalikan dari mereka

yang menggarap lahan di kawasan hutan. Kejadian itu dapat dikatakan wajar sehubungan lahan di kawasan hutan merupakan pembagian dari PERHUTANI, sedangkan wanatani merupakan lahan milik yang dihutankan, sehingga penggarapannya tergantung dari luas lahan dimiliki. Selain itu jangka waktu untuk penggarapannya pun juga berbeda. Untuk wanatani penggarapannya dapat dikatakan tergantung dari pemiliknya, sedangkan lahan di kawasan hutan penggarapannya tergantung dari PERHUTANI, sehubungan pembagian atau jatah yang diberikan periodenya terbatas.

Dalam rangka mengolah lahan garapan wanatani tidak akan lepas dari waktu atau jam kerja yang dibutuhkan. Secara rasional semakin luas lahan garapan semakin besar jam kerja yang diperlukan. Namun hal ini tergantung pula luas tanamnya. Walaupun luas garapan dapat dikatakan luas, tetapi luas tanamnya tergolong sempit, maka jam kerja yang diperlukan juga pendek.

Tabel III. 11
LUAS LAHAN GARAPAN WANATANI DAN
RATA-RATA TAKSIRAN JAM KERJA SELAMA 6 BULAN
DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Luas lahan garapan (Ha)	Jumlah	Persentase	Rata-rata taksiran jam kerja
1.	< 0,1	2	14,30	156
2.	0,1 - 0,2	3	21,43	147,33
3.	> 0,2	9	64,27	470
J u m l a h		14	100,00	302,142

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III. 11. dapat diketahui bahwa jam kerja yang diperlukan untuk menggarap lahan wanatani, ternyata pada luas lahan lebih besar 0,2 hektar memerlukan jam kerja yang paling panjang yaitu selama 6 bulan rata-rata memerlukan waktu 470 jam. Sedangkan yang paling pendek adalah pada lahan garapan antara 0,1 sampai dengan 0,2 hektar memerlukan waktu selama 6 bulan rata-rata 147,33 jam. Untuk luas lahan yang tergolong

paling sempit ($<0,1$ Ha), ternyata selama 6 bulan rata-rata jam kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan luas lahan garapan antara 0,1 hektar sampai 0,2 hektar. Secara rasional dapat dikatakan bahwa lahan garapan semakin luas maka jam kerjanya dapat dikatakan semakin panjang. Namun kenyataan di daerah penelitian tidak demikian. Perbedaan jam kerja yang terjadi dapat dikatakan tidak begitu besar, karena kalau dihitung setiap harinya tidak ada 1 jam. Walaupun demikian, perbedaan tersebut tentu ada sebabnya. menurut peneliti perbedaan jam kerja yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh luas tanam yang berbeda.

Terjadinya perbedaan luas tanam, tentu saja akan mempengaruhi hasil panen. Besar kecilnya hasil (bila diuangkan) sangat dipengaruhi oleh jenis tanam yang dibudidayakan. Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa jenis tanaman pangan yang dibudidayakan di daerah penelitian saat penelitian adalah ketela, sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga setiap harinya. Mengenai pendapatan dari lahan garapan wanatani akan dibahas berikut ini.

b. Pendapatan Petani Dari Usaha Tani Di Lahan Wanatani

Pendapatan dari usaha tani di lahan wanatani merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian di lahan wanatani. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh tergantung dari luas lahan garapan atau lebih tepatnya luas tanam dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Mengenai pendapatan dari usaha tani di lahan wanatani ditunjukkan pada tabel III. 12.

Tabel III. 12
LUAS LAHAN GARAPAN WANATANI DAN RATA-RATA PENDAPATAN
PERTAHUN DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Luas lahan garapan (Ha)	Jumlah	Persentase	Rata-rata pendapatan pertahun (Rp)
1.	$< 0,1$	2	14,30	102.500,00
2.	0,1 - 0,2	3	21,43	186.666,66
3.	$> 0,2$	9	64,27	192.333,33
Jumlah		14	100,00	178.285,71

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III. 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (64,27%) mempunyai pendapatan rata-rata pertahun sebesar Rp 192.333,33. Pendapatan sebesar itu terjadi pada luas lahan garapan lebih 0,2 hektar. Urutan kedua (21,43%) adalah pendapatan rata-rata pertahun sebesar Rp 186.666,66 dengan lahan garapan seluas antara 0,1 hektar sampai 0,2 hektar. Yang paling akhir sebesar (14,30%) adalah pendapatan rata-rata pertahun sebesar Rp 102.500,00, terjadi pada lahan garapan yang luasnya kurang dari 0,1 hektar. Perbedaan pendapatan rata-rata pertahun usaha tani wanatani untuk masing-masing kelompok luas lahan garapan, dapat terjadi karena pada lahan garapan yang luas akan lebih terbuka menghasilkan jenis tanaman lebih banyak dibandingkan dengan luas garapan yang sempit. Dengan demikian bagi petani yang memiliki lahan garapan luas lebih terbuka menghasilkan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan petani yang hanya menggarap lahan pertanian sempit.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin luas lahan garapan, semakin besar pendapatannya. Keadaan itu dapat dikatakan wajar, karena semakin luas lahan garapan, semakin luas pula area tanamannya. Apabila kita tinjau dari jam kerja yang dibutuhkan untuk menggarap lahan wanatani, menunjukkan bahwa lahan garapan yang luasnya kurang dari 0,1 hektar, jam kerja yang diperlukan lebih besar dibanding dengan lahan garapan yang luasnya antara 0,1 hektar sampai 0,2 hektar, terpaut 8,67 jam per 6 bulan (tiap hari kurang dari 1 jam). Walaupun setiap harinya terjadi perbedaan jam kerja kurang dari 1 jam, tetapi apabila ditinjau dari pendapatannya nampak jelas lebih tinggi pada klasifikasi lahan yang luasnya antara 0,1 sampai 0,2 hektar. Terjadinya perbedaan jam kerja pada kedua klasifikasi luas lahan tersebut, dan terjadinya perbedaan pendapatan yang besar, hal itu dimungkinkan pada lahangan garapan yang luasnya kurang dari 0,1 hektar, dalam mengerjakan usaha tani dipaksa untuk menanam lebih dari apa yang seharusnya, sedangkan pada klasifikasi lahan garapan yang luasnya antara 0,1 hektar sampai 0,2 hektar, cara menegerjakan sesuai dengan keadaan lahannya. Pada klasifikasi luas lahan garapan kurang dari 0,1 hektar kemungkinan baru saja dibuka untuk wanatani, sehingga kesuburannya belum optimal (untuk daerah setempat), sedangkan untuk klasifikasi luas lahan garapan antara 0,1 hektar sampai 0,2 hektar dapat dikatakan sudah lama dibuka untuk wanatani, sehingga pengerjaannya relatif lebih muda, serta penghasilannyapun lebih baik. Keadaan itu menyebabkan jam kerja yang diperlukan berbeda.

Ditinjau dari besarnya pendapatan yang diperoleh petani (responden) dari usaha tani di lahan wanatani tiap tahunnya, maka kalau kita kaitkan dengan

kekayaan kebutuhan hidup masyarakat dapat dikatakan masih dibawah batas kelayakan. Sehubungan usaha tani di lahan wanatani merupakan suatu aktivitas tambahan dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, maka penghasilannya dapat dikatakan sangat bermanfaat sebagai sumbangan pendapatan keluarga.

Tabel III. 13
LUAS PEMILIKAN LAHAN, JUMLAH RESPONDEN DAN PERSENTASE
SUMBANGAN PENDAPATAN DARI USAHA TANI DAN
SUMBANGAN PENDAPATAN DARI USAHA TANI
DI WANATANI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Luas pemilik an lahan (ha)	Jum- lah	Rata-rata pendapatan total Keluarga (Rp.)	Rata-rata pendapatan dari usaha tani di kawa- san hutan (Rp.)	% pendapatan dari penda- patan total
1.	< 0,25	4	393.750	149.000	37,84
2.	0,25 - 0,50	4	596.500	194.750	38,45
3.	> 0,50	6	516.000	212.500	41,18
J u m l a h		14	478.357,10	189.285,70	39,56

Sumber : Data primer, 1996.

Berdasarkan tabel III.13. menunjukkan bahwa semakin luas pemilihan lahan, semakin besar persentase sumbangan pendapatan dari usaha wanatani. Hal ini ditunjukkan pada luas pemilihan lahan kurang dari 0,25 hektar mempunyai persentase sumbangan pendapatan dari usaha wanatani sebesar 37,84 persen terhadap pendapatan total keluarga, dan naik pada pemilihan lahan antara 0,25 - 0,50 hektar sebesar 38,45 persen, serta pemilihan lahan lebih dari 0,50 hektar sebesar 41,18 persen. Tingginya persentase sumbangan pendapatan dari usaha tani wanatani terhadap pendapatan total keluarga, karena bagi petani yang memiliki lahan relatif luas cenderung memanfaatkan berbagai jenis tanaman akibatnya berpengaruh terhadap pendapatan keluarga secara keseluruhan.

Seperti yang telah dikemukakan dimuka bahwa penghasilan usaha wanatani, dari 14 responden rata-rata memberikan sumbangan sebesar 39,56

persen terhadap pendapatan total keluarga. Dengan demikian adanya kegiatan usaha wanatani memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga sehingga keluarga bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Disamping itu usaha wanatani selain dapat meningkatkan pendapatan, juga dapat meningkatkan pendapatan, juga dapat menanggulangi bahaya erosi atau menyangkut aspek kelestarian lingkungan.

B. KAYU BAKAR

1. Pengambilan Kayu Bakar Di Kawasan Hutan

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa hutan merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia yang sangat penting artinya dan cukup menonjol. Salah seorang ekonom Indonesia mengatakan bahwa kontribusi hasil hutan dalam perekonomian Indonesia telah meningkat dengan pesat baik dari aspek pendapatan nasional maupun penerimaan devisa. Disamping itu, hutan mengandung ramifikasi yang sangat luas terhadap keadaan lahan, sumberdaya air, pemukiman manusia dan lingkungan hidup (Djoyohadikusumo, 1994:268). Namun demikian perlu diingat bahwa pengeksploitasian hutan secara berlebihan akan dapat menimbulkan rusaknya hutan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha untuk melestarikan dan melindungi sumberdaya alam dengan mengeluarkan kebijakan yang berupa Undang-undang No.4 tahun 1982, yang memuat ketentuan pokok cara pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat (Adi Pranowo, 1995:60).

Di kalangan para pengusaha/pengelola hutan di Indonesia dikenal dengan sebuah slogan *Tebang Pilih Hutan Indonesia*, artinya didalam menebang kayu sudah ada ketentuan untuk memilih pohon yang siap untuk ditebang. Kemudian mereka diharuskan untuk menanam kembali sehingga regenerasi akan terjadi dan hutan tidak menjadi gundul. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa disatu sisi, lain hutan harus tetap dijaga kelestariannya. Mengingat hutan juga merupakan benteng mala petaka. Kerusakan hutan sebagai akibat penebangan yang tak terkendali akan menyebabkan banjir.

Penduduk di desa Hargorejo yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan hutan, mereka pada umumnya telah mempunyai pengalaman tersendiri untuk melukiskan hutan. Hutan menurut penduduk setempat berisi tanaman yang berupa pohon-pohonan besar hewan-hewan liar yang berupa burung-burung dan binatang buas lainnya. Meskipun binatang-binatangbuas yang ada di kawasan hutan Hargorejo sudah hampir tidak ada. Pendek kata mereka itu menyadari bahwa didalam hutan itu tumbuh flora dan fauna. Hutan dengan segala isinya dianggap

sebagai peninggalan tanaman nenek moyangnya. Dengan cara pandang yang semacam itu, mereka memandang wajar apabila mereka sebagai anak cucunya memungut hasil itu. Pada umumnya hasil hutan yang mereka pungut itu berupa kayu bakar, kayu bangunan, rumput dan ramban *dedaunan* (Adi Pranowo, 1995:66).

Tindakan mereka dengan memungut hasil hutan itu ternyata mendapat larangan dari pemerintah, karena tindakan semacam itu berakibat merusak tata lingkungan hutan. Hal ini juga sangat disadari sepenuhnya oleh seluruh penduduk Desa Hargorejo, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan. Adapun jenis kayu bakar yang dilarang diambil berupa kayu jati, mahoni, dan orak-arik. Jenis tanaman keras ini ditanam dan dikelola oleh pihak perhutani. Adanya larangan itu maka para penduduk setempat tidak mengambil kayu untuk bangunan di kawasan hutan. Meskipun larangan itu telah diberlakukan ada juga yang melakukan pengambilan kayu di hutan. Tanpa disadari mereka sering *ketrucut memberi informasi* mengaku mengambil kayu larangan itu. Cara yang sering dilakukan yaitu mengelabui petugas, tetapi ada kalanya juga melalui kerjasama dengan para petugas. Namun segera mereka mengatakan bahwa mereka itu hanya mengambil ranting-ranting yang sudah kering dan telah mendapat izin dari pihak perhutani. Pemanfaatan kayu-kayu itu antara petani satu dengan petani yang lain tentu berbeda, tergantung pada tingkat kebutuhannya.

Berangkat dari uraian diatas, maka tulisan ini hendak mencoba melihat lahan yang dimiliki penduduk setempat dan rata-rata jam kerja yang dilakukan penduduk dilahannya. Dari jam kerja di lahan itu maka dapat dilihat aktivitas mereka dilahan. Kemudian aktivitas itu juga dikaitkan dengan pengambilan kayu bakar dikawasan hutan. Khususnya yang dilakukan penduduk Desa Hargorejo. Pada tabel berikut ini dapat dilihat luas pilihan tanah, jumlah responden dan rata-rata jam kerja mencari kayu bakar di kawasan hutan, tahun 1996.

Tabel III.14
LUAS PEMILIKAN LAHAN, JUMLAH RESPONDEN DAN
RATA-RATA JAM KERJA SELAMA 6 BULAN MENCARI KAYU BAKAR
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Luas Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah	Rata-rata jam kerja selama 6 bulan
1.	< 0,25	17	91,79
2.	0,25 - 0,50	28	83,60
3.	> 0,50	6	74,50
Jumlah		51	86,71

Sumber : Data primer, 1996.

Pada umumnya para pemilik lahan yang luasnya kurang dari 0,25 ha mempunyai jam kerja cukup tinggi. Responden yang memiliki lahan ukuran kurang dari 0,25 ha mencapai 17 orang dari responden yang ada. Rata-rata jam kerjanya mencapai 91,76 selama 6 bulan. Kemudian para pemilik lahan yang luasnya 0,25 - 0,50 ha, rata-rata jam kerjanya selama 6 bulan 83,60 setiap bulannya. Jumlah pemilik lahan ini mencapai 28 orang. Bagi para pemilik lahan yang luasnya lebih dari 0,50 ha jam kerjanya mencapai 74,50 setiap 6 bulan. Dari tiga jenis kelompok pemilikan lahan ini maka bila dirata-rata para pemilik lahan yang luasnya kurang dari 0,25 ha kerjanya di lahan yang luasnya kurang dari 0,25 ha kerjanya di lahan dapat dikatakan paling tinggi. Dengan demikian dimungkinkan juga bahwa pemilik lahan ini juga paling banyak mengambil kayu di kawasan hutan. Jumlah responden yang ada sebanyak 60 orang, tetapi yang diketahui luas lahannya ada 9 orang. Ke 9 orang responden ini mengaku tidak pernah mengambil atau mencari kayu di kawasan hutan. Mereka itu beralasan bahwa tanah yang dimilikinya telah mampu memberikan hasil untuk kehidupan sehari-hari. Baik itu yang berupa hasil dari tegalannya seperti jagung, pisang dan dari tanaman-tanaman keras yang dimilikinya sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang penduduk Hargorejo sebagai berikut:

"... kulo pun boten mendeti kajeng teng wana, wong siti kulo pun nyekapi"

"... (Saya sudah tidak mengambil kayu di hutan, sebab tanah saya sudah mencukupi)"

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kayu bakar yang diambil responden

dari kawasan hutan Desa Hargorejo, tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 15
JENIS KAYU BAKAR YANG DIAMBIL RESPONDEN DARI HUTAN
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Jenis Kayu Bakar	Jumlah	Prosentase
1.	Ranting kayu kering dan pohon yang sudah mati	20	39,22
2.	Pohon atoman, apollo dan puyeng	11	21,57
3.	Tanaman orak-arik dan pohon yang sudah mati	12	23,53
4.	Ranting kayu atau rencak dan semak kering	8	15,68
J u m l a h		51	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Pada halaman depan telah diuraikan dan disinggung mengenai jenis-jenis kayu yang mereka ambil berupa ranting kayu kering dan pohon otonom, apollo dan puyeng sebanyak 20 orang (39,22%), pohon otonom, apollo dan puyeng sebanyak 11 orang (21,57%), pengambilan kayu yang berupa tanaman orak-arik dan pohon yang sudah mencapai 12 orang (23,53%). Kemudian para penduduk yang mengambil kayu yang berupa ranting kayu

Kayu-kayu bakar itu setelah diambil lalu dikumpulkan menjadi satu. Pengumpulan kayu bakar itu dikerjakan selama 3-4 jam setiap harinya. Setelah dikumpulkan kemudian diikat menjadi *bongkokan-bongkokan* yang siap dibawa kerumah. Cara membawanya dari hutan *digendong* yaitu dibawa dengan diletakkan di punggung, untuk kaum wanitanya. Sedang untuk kaum pria dengan cara *disunggi* atau kayu itu diletakkan diatas kepala. Lama perjalanannya dari hutan ke rumah memakan waktu kira-kira antara 1-2 jam. Perjalanan itu cukup lama karena daerahnya berbukit-bukit dan ada kalanya melewati jalan setapak. Biasanya kayu yang mereka bawa dari hutan paling banyak hanya satu ikat atau satu bongkah saja. Setelah sampai di rumah kayu bakar itu kemudian dikeringkan atau *dipepe* dengan menggunakan panas matahari di halaman khususnya untuk

pengambilan kayu bakar pada musim kemarau. Pengeringan kayu bakar lainnya dengan cara dipanggang, khususnya waktu musim penghujan.

Setelah selesai dikeringkan kayu-kayu itu lalu diuntingi, diikat dengan seutas tali bambu. kayu-kayu itu lalu menjadi *bongkohan* kecil-kecil sehingga mudah dan ringan membawanya. Di Desa Hargorejo kayu-kayu itu tidak dijual, tetapi dikonsumsi sendiri. Perlu diketahui selain tanaman-tanaman yang telah disebut tadi di Desa Hargorejo juga tumbuh pohon-pohon kelapa. Pohon kelapa itu tidak dipetik buahnya, tetapi *didewan* sehingga tidak berbuah. Dari pohon kelapa inilah lalu menghasilkan *gula jawa*. Pemrosesan dari *legen* menjadi *gula jawa* inilah digunakan kayu-kayuan bakar tadi. Jadi kayu-kayu bakar yang diambil dari hutan tadi digunakan sendiri untuk memasak *legen*. Kayu-kayu bakar itu tidak dijual tetapi untuk kepentingan sendiri, tetapi apabila dijual kira-kira Rp 750,- per *bongkok*. Gula jawa itu merupakan hasil tambahan bagi penduduk Hargorejo.

Peralatan yang mereka gunakan untuk mengambil kayu di hutan biasanya berupa *dandang*, *arit*, dan *tali*. *Dandang* digunakan untuk mendangkir batang-batang pohon besar yang sudah mati. Biasanya pohon-pohon besar ini punya akar yang sangat kuat, sehingga memerlukan peralatan yang kuat pula. Salah satu alat yang sering digunakan petani pencari kayu bakar di Desa Hargorejo *dandang* tadi. Alat lain yang diperlukan yaitu arit, alat ini digunakan untuk memotong ranting dan kayu, kayu agar supaya panjang pendeknya bisa sama. Pemotongan ini perlu dilakukan agar potongan kayu itu mudah mematanya menjadi satu hingga menjadi *bongkokan-bongkokan* sehingga penduduk mudah cara membawanya. Setelah menjadi bongkokan-bongkokan kayu-kayu tadi lalu diikat menjadi satu. Tali-tali ini biasanya terbuat dari kulit-kulit batang bambu.

Penduduk Hargorejo menyadari sepenuhnya bahwa pengrusakan hutan akan berakibat fatal, diantaranya mengakibatkan banjir dan erosi. Mengingat selama ini kawasan hutan dipandang sebagai suatu mekanisme yang sangat efektif dalam mengendalikan erosi tanah. Para responden yang berjumlah 60 orang memahami dalam hutan negara terdapat larangan mengambil jenis kayu bakar yaitu kayu jati, mahoni, orak-arik (semua tanaman keras yang dikelola perhutani). Oleh sebab itu mereka tidak berani mengambil kayu yang bisa digunakan bahan bangunan di kawasan hutan.

Tabel III.16
ALASAN RESPONDEN TIDAK MENGAMBIL KAYU
UNTUK BANGUNAN DI KAWASAN HUTAN
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Alasan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Perhutani tidak memberi ijin penebangan kayu	43	71,67
2.	Semua kayu besar di hutan menjadi milik negara	17	28,33
Jumlah		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Beberapa responden yang berjumlah 43 orang (71,67%) mengatakan bahwa mereka tidak mengambil kayu bangunan di kawasan hutan karena pihak perhutani tidak mengambil kayu bangunan di kawasan hutan karena pihak perhutani tidak memberi ijin penebangan kayu. responden lain yang berjumlah 17 orang (28,33%) mengatakan bahwa mereka tidak mengambil kayu di hutan karena semua kayu besar di hutan menjadi milik negara (tabel III.16). Sudah barang tentu larangan pihak perhutani bukan tanpa alasan. Larangan tersebut dimaksudkan agar hutan dapat dipelihara kelestariannya. Perhutani menyadari sepenuhnya kerusakan hutan akan menyebabkan rusaknya lingkungan diantaranya hutan menjadi gundul yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, erosi, matinya sumber mata air dan lain-lain. Dengan demikian maka larangan perhutani itu diterima oleh penduduk Hargorejo. Larangan itu telah sesuai dengan kesadaran yang dimiliki penduduk setempat. Diharapkan dari situasi dan kondisi yang demikian akan terjadi kerjasama timbal-balik antara masyarakat dan pemerintah, sehingga sumberdaya hutan akan tetap terjamin atau terpelihara kelestariannya.

2. Pengambilan Kayu Bakar Dalam Wanatani

Pemerintah melalui berbagai kebijaksanaannya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya adalah mengembangkan apa yang disebut hutan kemasyarakatan atau wanatani, pengertian hutan kemasyarakatan yaitu:

- a. Segala kegiatan yang menyangkut penanaman dan pengelolaan hutan atau tanam-tanaman kayu-kayuan yang dilakukan oleh non profesional (orang awam kehutanan) di lahan miliknya atau kadang-kadang di lahan orang lain.
- b. Campur tangan pihak petugas kehutanan pada penggunaan atau pola tanam di lahan milik.
- c. Adaptasi pengelolaan hutan negara supaya kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan negara ditingkatkan penerapan hutan kemasyarakatan ini dapat dilakukan baik didalam ataupun di luar kawasan hutan. Untuk melaksanakan hutan kemasyarakatan ini digunakan sistem wanatani. Dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan, menaikkan pendapatan per kapita dan memelihara sumber-sumber alam.

Di Desa Hargorejo penanaman jenis tanaman kehutanan dengan sistem wanatani (Agroforestry) dilakukan diluar kawasan hutan negara yang dikuasai Perhutani. Pada awalnya tanaman kehutanan seperti mahoni, jati, akasia, orak-arik diberi secara cuma-cuma dari pihak perhutani. Disebabkan lahan milik petani diluar kawasan hutan yang dihutankan sudah terdapat berbagai jenis tanaman pekarangan seperti, gori, bambu, kelapa, maka setelah petani memperoleh jenis tanaman kehutanan menjadi beraneka ragam jenis tanaman. Hal ini dilakukan Perhutani dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas lahan milik petani. Hutan yang akan membawa akibat rusaknya ekosistem, dan dalam waktu bersamaan petani di luar kawasan hutan semakin meningkat taraf hidupnya.

Tabel III.17
LUAS PEMILIKAN LAHAN, JUMLAH RESPONDEN DAN
RATA-RATA JAM KERJA MENCARI KAYU BAKAR
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Luas Pemilikan Lahan	Jumlah	Rata-rata Jam kerja selama 6 bulan
1.	< 0,25	-	-
2.	0,25 - 0,50	3	89,00
3.	> 0,50	19	98,93
Jumlah		22	95,55

Sumber : Data primer, 1996.

Pada tabel III.17 nampak bahwa secara keseluruhan responden yang mencari kayu bakar dalam lahan milik yang dihutankan mempunyai rata-rata jam kerja selama 6 bulan selama 95,55 jam. Selain itu, juga menunjukkan sebagian besar responden memiliki lahan seluas lebih dari 0,5 hektar yang proporsinya sebesar 66,66 persen dengan rata-rata jam kerja mencari kayu bakar selama 98,83 jam. Sisanya sebanyak 3 responden memiliki lahan seluas antara 0,25 - 0,50 hektar, memiliki jam kerja 89 jam. Dengan demikian apabila dibandingkan antara responden yang memiliki lahan pertanian sempit (0,25-0,50 hektar) dan responden yang memiliki lahan luas (lebih 0,50 hektar) dengan rata-rata jam kerja mencari kayu bakar selama 6 bulan terdapat hubungan positif. Artinya hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa semakin luas pemilikan lahan pertanian yang dihutankan semakin lama jam kerja responden mencari kayu bakar dalam hutan wanatani. Hal ini dapat terjadi karena bagi responden atau petani yang memiliki lahan pertanian luas relatif cukup tersedia lahan untuk ditanami jenis tanaman hutan yang dapat dijadikan kayu bakar, dibandingkan dengan responden yang memiliki lahan pertanian sempit. Dengan demikian bagi petani disekitar kawasan hutan yang mempunyai lahan wanatani relatif luas, petani lebih leluasa mengambil kayu bakar, sesuai kebutuhannya, baik untuk dimanfaatkan sendiri maupun untuk dijual untuk menambah pendapatannya.

C. SUMBER HUTAN NON KAYU

Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan, yang pada umumnya hidupnya bergantung dari sektor pertanian. Maka pemilikan lahan merupakan salah satu faktor produksi penting bagi petani. Namun pertumbuhan penduduk yang terus bertambah terutama di Pulau Jawa, mengakibatkan luas lahan makin berkurang, sehingga pemilikan lahanpun makin sempit. Hal ini nampak juga dialami penduduk yang berada di sekitar hutan, pemilikan lahan rata-rata sempit. Pemilikan lahan yang relatif sempit ini tentu saja tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga petani, sehingga mereka harus berusaha atau bekerja diluar usaha tani.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki kegunaan beraneka ragam baik yang bersifat ekonomis maupun sosial budaya. Mengingat manfaat hutan yang begitu besar, selain dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia, hutan mempunyai arti tersendiri yaitu proteksi (tata air), konservasi (cagar alam, taman wisata, taman nasional dan rekreasi). Untuk itu pengusahaan hutan antara lain diarahkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Maka dalam batas-batas tertentu pola pemanfaatan hutan di beberapa tempat dapat berbeda-beda sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

pola pemanfaatan hutan tersebut pada dasarnya erat hubungannya dengan penanaman hutan, pemungutan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu (Leuhery, D. 1989:8-9).

Selanjutnya dijelaskan bahwa pola pemanfaatan hutan ini dapat dilakukan melalui kegiatan baik secara formal maupun informal. Kegiatan formal banyak dilakukan di kawasan hutan produksi yang pengelolaannya sudah teratur dan pekerjaan tanaman (tumpangsari), pemeliharaan dan penebangan sudah merupakan hal yang selalu dilakukan menurut perencanaan yang mantap. Sedangkan kegiatan informal di samping diperoleh dari hutan produksi, juga dapat diperoleh dari hutan lindung maupun hutan wisata. Dengan demikian, hutan baik langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat terutama masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan hutan.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, telah dikembangkan suatu strategi pengelolaan hutan dalam berbagai kegiatan kehutanan. Strategi pengelolaan hutan yang mengikut sertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan kehutanan di kenal sebagai hutan kemasyarakatan. Ada beberapa definisi (batasan/pengertian) hutan kemasyarakatan. Namun secara umum hutan kemasyarakatan merupakan konsep pemanfaatan lahan yang menggabungkan tanaman kehutan dengan tanaman pertanian atau tanaman makanan ternak. Sedangkan suatu bentuk sistem penggunaan lahan yang merupakan penerapan/praktek hutan kemasyarakatan dikenal sebagai sistem wanatani.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam uraian selanjutnya dikemukakan sumber hutan non kayu/hutan kemasyarakatan bentuk wanatani baik di kawasan hutan maupun dilingkungan tempat tinggal penduduk/masyarakat (di lahan pekarangan dan tegalan).

1. Sumber Hutan Non Kayu Di Kawasan Hutan

Hutan di daerah penelitian waktu di buka dan di tanami dengan sistem tumpangsari. Awal penanaman ini masyarakat di sekitar kawasan hutan dilibatkan untuk ikut menanam. Masyarakat yang ikut mengerjakan/mengolah lahan di kawasan hutan dengan sistem seperti kontrak selama 2 tahun, dengan luas lahan garapan rata-rata 0,25 hektar tiap rumah tangga. Jenis tanaman disesuaikan kondisi kesuburan tanah dan pada umumnya yang ditanam jenis tanaman polowijo seperti jagung, kacang-kacangan, lombok dan sebagian ditanami ketela. Hasil dari tanaman ini menjadi milik masyarakat/penduduk yang

mengolah lahan. Mereka hanya diwajibkan untuk memelihara tanaman hutan yang di tanam pemerintah (Perum Perhutani atau Dinas Kehutanan) antara lain pohon/kayu jati, sengon dan akasia.

Hasil hutan selain kayu, ternyata ada sumber lain yang dapat dimanfaatkan masyarakat/penduduk yang tinggal di kawasan hutan. Sumber hutan non kayu tersebut anatara lain rumput. Rumput dikawasan hutan ini sangat dirasakan manfaatnya terutama pemilik ternak. Seperti diketahui petani/masyarakat di daerah penelitian sebagian besar memelihara/memiliki ternak sapi dan kambing. Pemeliharaan ternak selain pekerjaan sampingan, bagi petani ditujukan untuk memperoleh pupuk kandang sebagai pendukung sistem pertaniannya.

Mengenai pemilikan ternak ini, ternyata dari 60 responden yang tinggal di sekitar kawasan hutan sebagai sampel, semua memiliki ternak sapi dan kambing. Dari 60 responden yang memiliki ternak kambing, sebagian besar (yang paling banyak) mempunyai 2 - 3 ekor (38,33%). Sedangkan pemilikan ternak sapi, yang tidak memiliki 7 responden (11,67%) dan paling banyak (53,33%) mempunyai 1 ekor. Data selengkapnya jumlah pemilikan ternak sapi dan kambing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.18
JUMLAH PEMILIKAN TERNAK SAPI DAN KAMBING
DI DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Jumlah Ternak	Sapi		Kambing	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tidak punya	7	11,67	16	26,67
2.	1	32	53,33	12	20,00
3.	1 - 3	20	33,33	23	38,33
4.	> 3	1	1,67	9	15,00
Jumlah		60	100,00	60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Menurut Handojo Adi Pranowo (Michael R. Dove dan Sugeng Martopo, 1987:153-154) pemeliharaan atau memiliki ternak mempunyai tiga nilai yang

amat tinggi, dan nilai tersebut saling kait mengkait antara satu dengan lainnya. Ketiga nilai itu antara lain, pertama dalam bidang bercocok tanam, terutama sapi bemilai sebagai penarik bajak dan kotorannya digunakan sebagai *rabuk* (pupuk) tanaman, kedua ternak bagi kehidupan masyarakat sebagai tabungan, sebab merupakan harta kekayaan dan memiliki ternak sapi dan kambing ada yang menyebutnya mempunyai *rojo koyo*. Mempunyai simpanan berupa ternak lebih menguntungkan dibandingkan uang yang disimpan misalnya di bank. Hal ini karena harga setiap tahun selain akan naik, dan bila ternak telah menjadi besar biasanya tidak segera mereka jual, melainkan akan jual apabila ada kebutuhan yang sifatnya mendesak atau pada musim-musim *paceklik pangan* (suatu musim yang sulit mendapatkan makanan atau bibit tanam). Nilai yang terakhir atau ke tiga, yaitu semakin banyak jumlah ternak yang dimiliki, semakin tinggi pula pula status kekayaan di mata masyarakat.

Dengan pemilihan ternak tersebut berarti mereka setiap hari harus memenuhi kebutuhan makanan ternak tersebut, terutama ternak sapi, yaitu dengan cara mengambil rumput di kawasan hutan. Sebagaimana dikemukakan Handojo Adi Pranowo (1985:57-58), pemeliharaan ternak pada jaman dahulu dilakukan anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun dan di lepas ke dalam hutan. Keuntungan semacam ini dapat mengurangi tenaga kerja merumput di hutan dan dapat mempercepat pertumbuhan ternak. di samping itu, dahulu ternak hanya difungsikan sebagai tabungan dan status sosial seseorang di dalam masyarakat. Namun sekarang pada umumnya berubah/beralih ke dalam sistem pemeliharaan di dalam kandang dan fungsinya bergeser pada keperluan pertanian untuk mendapatkan *rabuk* (pupuk). Dengan sistem pemeliharaan di dalam kandang tanpa digembalakan kurang menguntungkan, karena waktu mereka sepanjang hari digunakan untuk mencari rumput. jumlah rumput yang harus disediakan lebih banyak dan mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan sistem peternakan yang digembalakan. Keadaan ini berarti juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk merumput sangat berat terutama pada musim kemarau. Sebab pasda musim kemarau sebagian besar dari pelbagai jenis rerumputan yang ada di sekitar tegalan maupun di sekitar *kebon* telah habis dirumputi.

Dari 60 responden yang menyatakan mengambil rumput di kawasan hutan daerah penelitian sebanyak 49 responden (81,67%) dan yang 11 responden (18,33%) tidak mengambil di kawasan hutan tetapi cukup di lingkungan tempat tinggal. Selain rumput, mereka mengambil daun-daun muda dari pohon tanaman hutan. adapun jenis rumput/makanan ternak yang diambil dari kawasan/dalam hutan dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel III. 19
JENIS RUMPUT YANG DIAMBIL RESPONDEN
DARI KAWASAN HUTAN DI DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Jenis Rumput/Makanan Ternak	Jumlah	%
1.	Alang-alang dan lamuran	21	42,86
2.	Kropakan, merakan dan lamuran	11	22,45
3.	Alang-alang, giting dan daun-daun muda.	17	34,69
J u m l a h		49	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Dari data (Tabel III.) tersebut menunjukkan bahwa sumber hutan non kayu di kawasan hutan yang berupa rumput, yang dapat dimanfaatkan diambil masyarakat pemilik ternak paling banyak jenis rumput alang-alang. Banyaknya jenis rumput alang-alang, karena pada umumnya tumbuh di kawasan hutan dan hanya sebagian kecil yang tumbuh di pemukiman penduduk. Disamping itu, terutama untuk makanan ternak kambing mereka mengambil jenis dedaunan dari pohon kayu hutan atau *rambanan*.

Mengenai tumbuhan rumput alang-alang (*Imperata cylindrica*) yang paling banyak diambil masyarakat pemilik ternak di kawasan hutan Desa Hargorejo, terdapat perbedaan persepsi kepentingan antara rakyat/masyarakat dengan kepentingan Perhutani. Hal ini seperti terjadi dari hasil penelitian Handojo Adi Pranowo (Michael R. Dove dan Sugeng Murtopo, 1987:163-164) di Lereng Gunung Merapi Jawa tengah, di Pihak Rakyat, jelas rumput alang-alang mempunyai nilai yang tinggi dalam mendukung ekonomi keluarga, karena merupakan latar belakang dari mata pencaharian mereka selain di bidang pertanian yaitu peternakan. Pemeliharaan ternak dari petani juga sangat berkaitan dalam meningkatkan usaha pertanian.

Penggunaan rumput alang-alang semakin dirasakn sewaktu musim kemarau, sebab berbagai jenis rerumputan seperti rumput kolonjono dan rumput gajah yang umumnya di tanam di tegalan, kebon dan pekarangan telah habis di rumput atau mati kekeringan. Untuk mengatasi hal ini, umumnya mereka mengambil rumput alang-alang dari hutan. Bahkan karena tidak mencukupi

masyarakat pemilik ternak di Desa Hargorejo secara rombongan menyewa truk merumput di daerah Purworejo Jawa Tengah. Sedangkan di pihak Pemerintah (Perhutani atau Dinas Kehutanan), rumput alang-alang yang tumbuh di dalam hutan dipandang tidak bermanfaat, bahkan sebaliknya akan merusak ekosistem dari hutan itu sendiri. Hal ini bagi pihak kehutanan merupakan suatu hambatan dalam usaha pembangunan kawasan hutan yang difungsikan untuk mencegah erosi dan bahaya banjir serta penyediaan air dalam tanah.

Untuk mengatasi hal ini, tempat-tempat yang ditumbuhi rumput alang-alang di rombak untuk ditanami pohon-pohon berkayu yaitu dengan dilakukan program reboisasi dan rehabilitasi. Selain usaha tersebut, pemerintah mengimbangi usahanya dengan memasukkan pelbagai jenis rerumputan seperti rumput konjono dan rumput gajah yang umumnya ditanam di lahan milik/ sekitar tempat tinggal (lahan pekarangan atau tegalan).

Bagi pemilik ternak yang sedang merumput nampak ada kaitannya bila dihubungkan jumlah ternak yang dimiliki, yaitu semakin besar/banyak jumlah ternak yang dimiliki semakin besar pula aktivitas pengambilan rumput di kawasan hutan. Hal ini dapat diperhatikan hasil penelitian di kawasan hutan desa Hargorejo, jumlah ternak dan rata-rata jam kerja/lama mencari rumput dalam perhitungan selama 6 bulan (lihat tabel III.20). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa dengan jumlah ternak 1 ekor lama merumput 122,86 jam dan dengan jumlah ternak lebih banyak (3 ekor lebih) jumlah jam kerja/ lama merumput juga menunjukkan angka tinggi/lebih besar (152,00 jam).

Tabel III. 20
JUMLAH TERNAK DAN RATA-RATA JAM KERJA MENCARI
RUMPUT SELAMA 6 BULAN DI KAWASAN HUTAN
DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Jumlah Ternak	Jumlah	Rata-rata Jam Kerja Selama 6 Bulan
1.	1	29	122,86
2.	2 - 3	19	127,21
1.	> 3	1	152,00
Jumlah		49	125,11

Sumber : Data primer, 1996

Berdasarkan jam kerja/lama merumput di kawasan hutan tabel diatas, apabila di hitung tiap hari, maka mereka mencari rumput rata-rata lebih dari setengah jam (0,7 jam). Karena memiliki ternak ini merupakan pekerjaan sampingan, maka mereka dalam mencari makanan ternak menyesuaikan waktu setelah pekerjaan pokok, misalnya setelah dari tegalan atau pekerjaan lain di luar sektor pertanian (buruh-buruh, tukang, dan sebagainya). Namun kadang-kadang bila tidak ada pekerjaan (tegalan/sawah selesai), mereka dalam sehari khusus merumput untuk ditampung/penyediaan hari berikutnya.

Berkaitan waktu kerja bagi masyarakat di kawasan hutan ini, selain pekerjaan pokok sebagai petani erat kaitannya dengan adanya kesempatan yang diperoleh di dalam hutan. Seperti telah dijelaskan bahwa adanya hutan terutama bentuk hutan kemasyarakatan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat disekitarnya. Hal ini seperti yang dikemukakan Daniel Leuhery (1989:23) kesempatan kerja di dalam hutan dapat dibedakan anatara kegiatan formal dan kegiatan informal. Pekerjaan formal di hutan mencakup tumpangsari (tanaman hutan), tebangan dan pekerjaan upah lainnya seperti penyadapan getah pinus dan damar baik harian maupun borongan. Sedang pekerjaan informal di hutan mencakup pengambilan kayu bakar, rumput dan hasil hutan lainnya yang biasanya dilakukan penduduk sekitar hutan dan tidak merupakan sumber penghasilan bagi negara (Dinas Kehutanan atau Perum Perhutani). Dari kedua kesempatan kerja tersebut, yang nampak terjadi saat penelitian di desa Hargorejo (penduduk yang tinggal di sekitar hutan) pekerjaan informal. Mereka melakukan/mengambil kayu bakar, rumput dan dedaunan. Pekerjaan ini yang mereka lakukan karena merupakan kebutuhan pokok untuk pekerjaan sampingan seperti pembuat gula kelapa (kayu bakar) dan memiliki ternak (rumput dan daun-daun sebagai sumber hutan non kayu).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penduduk di sekitar kawasan hutan terutama pemilik ternak, sangat tergantung pada sumber hutan non kayu khususnya rumput. Hal ini sangat dirasakan bagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau hanya memiliki lahan sempit. Sedangkan yang memiliki lahan yang agak luas, dapat diperoleh dari lahan milik yaitu dari pekarangan dan tegalan. Namun dalam waktu tertentu yaitu misalnya musim kemarau, sebagian besar pemilik ternak menyatakan mengambil rumput di kawasan hutan. Jadi secara tidak langsung adanya hutan atau sumber hutan non kayu berupa rumput dapat membantu pendapatan penduduk yang pada umumnya petani, dengan sampingan memelihara ternak. Sebab pemilikan ternak (sapi dan kambing) dapat di nilai secara ekonomi (uang/rupee). Dari 49 responden yang mengambil rumput di kawasan hutan, jumlah ternak yang dimiliki bila di nilai uang (saat

penelitian) seharga kurang 1 juta rupiah sebanyak 30 responden (61,65%), seharga 1-2 juta rupiah sebanyak 16 responden (32,65%) dan 3 responden (6,13%) seharga lebih dari 2 juta rupiah.

2. Sumber Hutan Non Kayu Bentuk Wanatani Di Lahan Milik/Hutan Rakyat

Dari hasil penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa sistem penggunaan lahan di daerah penelitian umumnya pekarangan dan tegalan/kebun juga dengan sistem wanatani. Lahan tersebut oleh pemiliknya di tanami berbagai jenis tanaman antara lain tanaman pangan, tanaman ternak dan tanaman pohon buah-buahan serta tanaman kehutanan (kayu-kayuan). Jadi tanaman di lahan pekarangan dan tegalan terdapat bentuk kombinasi antara tanaman makanan ternak dengan tanaman kehutanan atau tanaman pohon buah-buahan.

Bentuk hutan kemasyarakatan pada lahan milik atau lahan di luar kawasan hutan, dikembangkan oleh petani dalam rangka rehabilitasi lahan disebut hutan rakyat. Selanjutnya dijelaskan bahwa hutan rakyat adalah hutan milik yang dimiliki oleh petani atau yang dimiliki oleh masyarakat. Hutan rakyat bukan hutan alam tetapi merupakan hutan tanaman, yang di tanam oleh petani atau masyarakat pada lahan milik atau lahan milik desa. Dijelaskan juga bahwa tegalan agak berbeda dengan pekarangan, karena tegalan tidak terdapat rumah di atasnya dan tanaman sebagian besar berupa tanaman pangan. Sedangkan pekarangan umumnya terletak di sekitar perumahan dan ditanami berbagai macam tanaman seperti tanaman kayu-kayuan, tanaman tahunan (buah-buahan) dan tanaman pangan, yang hasil produksinya dapat dipergunakan untuk keperluan dan dapat dijual/diperdagangkan, yang secara ekonomi dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa (petani).

Dari berbagai jenis/macam tanaman tersebut, selain kayu ada beberapa hasil lain yang sangat besar manfaatnya dan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah penelitian. Untuk lahan pekarangan dan terutama tegalan (mereka umumnya menyebut *wono*) jenis tanaman pangan polowija seperti jagung dan kacang-kacangan. Selain polowija mereka menanam ketela, lombok dan pohon yang dapat berbuah antara lain kelapa, nangka, mangga, cengkeh, dan mlinjo. Tanaman jenis polowija ini kan tumbuh baik bila pada musim penghujan, karena tanah di daerah ini tidak subur dan sulit air. apalagi bila musim kemarau panjang, yang nampak dapat bertahan tumbuh (hidup) tanaman

ketela. Namun demikian, ada sebagian lahan yang dapat ditanami padi pada waktu musim penghujan.

Bentuk wanatani di lahan penduduk telah dilakukan secara intensif, sehingga tidak hanya dapat menjadi penghasil (produksi tanaman pangan maupun tanaman komersil bagi pemiliknya, tetapi juga sebagai penghasil hijauan makanan ternak. Masyarakat di daerah penelitian ini telah menggunakan pupuk kandang untuk meningkatkan produktivitas lahannya. Pemupukan tidak hanya dilakukan terhadap tanaman pangan, tetapi juga terhadap tanaman rumput yang di tanam dan terhadap tanaman pohon yang berbuah/tanaman buah-buahan.

Dalam uraian diatas telah dijelaskan bahwa dari 60 responden semua memiliki ternak, sehingga kebutuhan akan rumput sangat mereka perlukan. Untuk mencukupi makanan ternak ini ternyata hanya sebagian kecil yaitu 11 responden (18,33%) yang menyatakan mengambil rumput di lingkungan tempat tinggal (lahan milik sendiri di pekarangan/tegalan). Mereka cukup mengambil di sekitar rumah karena jumlah ternak yang dimiliki sedikit dan sebagian besar ternak kambing. Dari 11 responden, yang memiliki ternak kambing 7 responden (63,64%) dan lainnya 3 responden (27,27%) memiliki ternak sapi 1 ekor dan yang 1 responden (0,09%) memiliki ternak sapi 2 ekor. Untuk itu rumput yang diambil jenis tertentu yang dapat di tanam dilahan pekarangan dan tegalan, yaitu rumput kolonjonodan rumput gajah. Kedua jenis rumput ini umumnya untuk makanan ternak sapi. Sedangkan untuk kambing biasanya daun-daunan atau *rambanan*. Rambanan yang diambil ini tentu saja dari tanaman penduduk jenis pohon dan merupakan hasil non kayu. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis rumput yang diambil responden di daerah penelitian dapat di lihat pada tabel III.21.

Tabel III. 21
JENIS RUMPUT YANG DIAMBIL RESPONDEN
DI LAHAN PEKARANGAN DAN TEGALAN
DI DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Jenis Rumput/Makanan Ternak	Jumlah	%
1.	Rumput kolonjono dan daun-daunan	8	72,73
2.	Rumput Kolonjono dan gajah	3	27,27
J u m l a h		11	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Rumput dan daun-daunan yang diambil dari lahan pekarangan dan tegalan ini umumnya digunakan ternaknya sendiri. Dengan demikian, rumput dan dedaunan bagi pemilik ternak secara tidak langsung menambah pendapatan, karena ternak tersebut mempunyai nilai ekonomi. Dari 11 responden pemilik ternak yang mengambil rumput di lingkungan tempat tinggal, 10 responden nilai ekonomi ternaknya (saat penelitian) kurang dari 1 juta rupiah, dan yang mencapai 1-2 juta rupiah 1 responden.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa distem penggunaan lahan yang diterapkan di lahan pekarangan dan tegalan secara umum bentuk wanatani kombinasi anantara tanaman pertanian/pangan dengan tanaman kehutan. Menurut Sastra Praja (Leuhery,D. 1989:22-23) penggunaan lahan di daerah penelitian termasuk hutan serba guna (multipurpose forest), karena sistem penanaman berbagai jenis kayu yang tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga menghasilkan non kayu seperti daun-daunan yang dapat dijadikan makanan dan buah-buahan yang digunakan sebagai bahan makanan manusia. Selain itu, ada sebagian penduduk yang memelihara rumput alam pada lahan tegalannya yang tidak digarap (diberokan).

Strategi pengelolaan hutan dengan penerapan hutan kemasyarakatan dan sistem wanatani yang telah dijelaskan, baik dikawasan hutan maupun di luar hutan yaitu di lahan milik mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dengan sistem wanatani tersebut, dapat meningkatkan produktivitas lahan yang kurang produktif, sehingga

dapat memperbaiki/meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan. Sebab selain menghasilkan kayu, juga dapat membantu menghindarkan keresahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat karena kekurangan akan bahan pangan dan terganggunya kondisi alam lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam. dengan demikian, di samping membantu memecahkan kebutuhan masyarakat desa sekitar hutan, juga dapat untuk penyelamatan pencegahan lahan dan hutan.

D. TAHAP-TAHAP PERTANIAN LAHAN KERING DIKAWASAN HUTAN

Pada umumnya sistem pertanian lahan kering atau perladangan di daerah penelitian tidak jauh berbeda dengan sistem pertanian lahan kering di daerah lain yang memiliki latar belakang keadaan lahan yang sama. Tahap penggarapan lahan sistem pertanian kering dikawasan hutan diawali dengan persiapan atau pembersihan lahan dari tanaman atau rumput yang mengganggu, kemudian dilanjutkan dengan pembakaran tanaman pengganggu. Setelah semua tanaman pengganggu bersih dan lahan disiapkan, selanjutnya ditanami jenis tanaman polowijo, seperti jagung, kacang tanah dan ketla pohon selama 2 tahun, sesuai dengan perjanjian dari pihak perhutani atau Dinas Kehutanan. Dalam rangka petani disekitar kawasan hutan memperoleh hasil dari usaha pertanian yang baik maupun lahan milik yang dihutankan (agroforestry) dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang berupa kotoran temak, dan umumnya kegiatan usaha tani pada lahan hutan hanya dilakukan pada musim penghujan. Sedangkan pada musim kemarau lahan dikawasn hutan tidak dapat diusahakan, karena tanah sangat kering dan kurang persediaan air. Berdasar pengamatan langsung dilapangan dan penuturan petani, sistem pertanian lahan kering dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu persiapan lokasi dan menebas, maembakar dan membersihkan lahan, menanam jenis tanaman polowijo, dan memanen hasil usaha pertanian.

1. Persiapan Lokasi Usaha Tani dan Menebas

Langkah awal sistem pertanian lahan kering dikawasan hutan, adalah persiapan lokasi dan menebas, umumnya mempertimbangkan berbagai faktor, yang menurut petani dianggap baik dan akan memberikan hasil yang lebih menguntungkan. Diantara berbagai faktor yang dihadapi petani di daerah penelitian, faktor yang utama dalam melakukan kegiatan sistem pertanian lahan kering dikawasan hutan menyangkut hak milik lahan pertanian di daerah penelitian terdapat dua jenis penguasaan, yaitu lahan dikawasan hutan menjadi

milik pemerintah, dimana petani hanya semacam kontrak untuk menggarap dan berkewajiban menjaga tanaman hutan selama 2 tahun dengan pihak perhutani. Kedua, lahan milik petani disekitar kawasan hutan yang diusahakan dengan tanaman kayu-kayuan dan bagian bawah digarap dengan polowijo secara tumpangsari. Dengan demikian penanaman jenis polowijo, membuat mereka, dalam hal ini petani memperoleh pengakuan dari petani disekitarnya yang sama-sama mengerjakan lahan dikawasan hutan. Di samping itu, sistem pertanian lahan kering dikawasan hutan pada musim kemarau petani tinggalkan untuk sementara sebagai masa bero, namun walaupun untuk sementara ditinggalkan tidak ada petani lain yang berani mengerjakan lahan bersangkutan.

Dahulu pada umumnya petani disekitar kawasan hutan lebih suka membuka lahan pertanian dikawasan hutan terbatas pada daerah yang relatif datar dan dekat dengan tempat tinggal. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan lahan masih subur dan persediaan air relatif tercukupi. Selain itu, menurut pemahaman atau pandangan petani disekitar kawasan hutan bahwa lahan pada daerah yang relatif datar lebih subur dibandingkan dengan daerah yang memiliki kemiringan relatif tinggi. Hal ini dapat terjadi karena pada daerah datar banyak mendapat tambahan lemi atau tanah di daerah atas pada musim penghujan, sehingga merupakan timbunan tanah yang memiliki tingkat kesuburan relatif tinggi. Faktor-faktor yang lain yang sangat penting dalam menentukan lahan pertanian dikawasan hutan yang dikerjakan petani adalah mempertimbangkan kemiringan lahan bersangkutan. Hal ini disebabkan keadaan lahan pertanian yang memiliki kemiringan tinggi pada musim penghujan sangat mudah terjadi erosi atau hilangnya lapisan tanah dan pupuk kandang yang dibawa hanyut bersama-sama aliran air. Namun nampaknya saat ini telah terjadi perubahan terhadap pembukaan lahan garapan dikawasan hutan, yaitu sudah tidak terbatas lagi pada daerah yang mempunyai kemiringan relatif tinggi. Kenyataan ini seiring dengan pertambahan penduduk yang sangat memerlukan lahan untuk menambah pendapatan dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarganya.

Sebelum lahan pertanian dikawasan hutan dibagikan kepada petani disekitar kawasan hutan, umumnya didahului dengan penebangan pepohonan yang relatif besar oleh pihak perhutani. Setelah tahap tersebut dilanjutkan dengan kegiatan menebas semak-semak dengan tujuan untuk mematikan tanaman-tanaman kecil yang dapat mengganggu tanaman polowijo dan tanaman milik kehutanan dan juga akan mempengaruhi semua kegiatan seterusnya. Setelah semua jenis tanaman kecil-kecilan yang berupa semak-semak, umumnya petani menggunakan peralatan seperti parang (arit), dandang (plancong) dan sabit. Sedangkan untuk menebas tanaman yang berukuran relatif besar, dimaksudkan untuk mengurangi

proses kegiatan selanjutnya, yaitu pada tahap berikutnya menebang. Dalam kegiatan ini umumnya petani menggunakan tenaga kerja keluarga, meliputi kepala keluarga, isteri, anak dan anggota keluarga lain. Namun untuk petani yang mengerjakan lahan kawasan hutan relatif luas, dalam mengerjakan lahan menggunakan tenaga kerja orang lain dengan cara diupahkan atau dapat dilakukan secara gotong royong dengan tetangga yang pernah dibantu.

2. Tahap Pembakaran dan Membersihkan Lahan

Setelah tahap pemilihan lokasi dan menebas selesai, memasuki tahap berikutnya, yaitu membersihkan lahan dikawasan hutan itu sendiri. Ranting atau cabang kayu relatif dan kotoran yang berujud daun-daunan dikumpulkan dengan tujuan biar kering dan dilanjutkan dengan pembakaran. Potongan kayu yang berukuran relatif besar umumnya tidak dibakar seluruhnya, namun sebagian dibawa pulang untuk kepentingan kayu bakar sendiri. Pada tahap awal sistem pertanian lahan kering dibuka, bekas potongan kayu yang berukuran relatif besar umumnya diletakan dibagian pematang lahan pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat terjadinya erosi tanah dan sisa-sisa pembakaran daun yang dapat berfungsi sebagai pupuk dan menyuburkan lahan pertanian dikawasan hutan.

Tahap pembakaran dan membersihkan lahan dikawasan hutan, pada awal pengerjaan lahan merupakan sesuatu hal yang penting bagi petani disekitar kawasan hutan. Berdasarkan pendapat informan petani yang menggarap lahan dikawasan hutan, pembakaran sisa daun-daunan akan mempercepat proses pembusukan yang sangat penting untuk menggemburkan tanah yang sangat diperlukan tanaman polowijo, seperti jagung, kacang tanah dan ketela pohon. Disamping itu, sisa pembakaran ranting kayu dan daun-daunan akan memperkaya unsur hara dalam tanah sehingga akan menyuburkan tanaman. Kegiatan seperti ini sesungguhnya telah lama dilakukan petani sejak dahulu, karena besar sekali manfaatnya dalam mendukung tubuhnya semua tanaman yang ditanam petani dikawasan hutan. Selanjutnya pada tahap pembakaran dan pembersihan lahan, menurut petani di daerah penelitian memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan sistem pertanian lahan kering, baik dalam kawasan hutan maupun sekitar hutan.

Berdasarkan keterangan indorman di daerah penelitian salah satu usaha untuk menghindari tidak atau kurang sempurnanya tahap pembakaran rumput atau sisa tanaman, dahulu umumnya petani menggunakan pedoman *mongso* atau *pranotomongso* (Daljuni, 1983). Namun demikian untuk daerah penelitian,

nampaknya sudah terdapat pergeseran, tidak lagi berpedoman pada pranotomongso secara zkeleg dan secara tidak langsung petani mengtrapkan dalam kegiatan sistem pertanian lahan kering dikawasan hutan, khususnya dalam tahap pembakaran, yang oleh petani dikawasan hutan dilakukan sekitar *mongso koso* sampai dengan *mongso ketelu* atau sekitar bulan Juni hingga September. Selain itu sistem pertanian lahan kering dikawasan hutan jaman dahulu, petani dalam usahanya memperoleh tahap pembakaran yang baik umumnya dilakukan sampai dua kali. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan sisa ranting kayu dan daun-daunan serta rumput rumput liar yang tidak habis terbakar pada tahap pertama. Sedangkan andaikata sampai pembakaran pada tahap kedua ini masih tersisa, umumnya diletakan pada bagian pematang yang dimaksudkan untuk mempermudah penanaman dan untuk menghilani erosi dan mencegah terbawanya abu pembakaran oleh air pada musim penghujan.

3. Tahap Penanaman di lahan Kawasan Hutan/Wanatani

Sistem pertanian lahan kering dikawasan hutan, setelah proses pembakaran dan pembersihan, kemudian dilanjutkan tahap penanaman, jenis tanaman polowijo, seperti jagung, kacang tanah dan ketela pohon. Sedangkan untuk lahan milik yang dihutankanm (agroforestry) selain tanaman tersebut juga dilakukan penanaman jenis lain, seperti kunir, karo dan sebagainya. Jenis tanaman polowijo tersebut bagi penduduk disekitar kawasan hutan di daerah penelitian memiliki kegunaan yang beragam (multifungsi), yaitu selain menghasilkan bahan pangan sehari-hari, khususnya untuk tanaman jenis jagung dan kacang tanah dapat untuk persediaan untuk makanan temak sapi dan kambing yang banyak dimiliki petani. Penanaman jenis tanaman polowijo oleh petani di Desa Hargorejo, secara *terselubung* masih berpedoman pranotomongso. Hal ini dilakukan karena untuk memperoleh hasil yang baik juga memperhitungkan musim, yaitu melakukan penanaman tanaman polowijo baik pada lahan dikawasan hutan maupun milik dilaksanakan pada musim Kapat atau bulan September sampai Oktober yang dimungkinkan terjadi hujan pertama. Disamping itu, pada musim Kapat terjadi hujan kiriman, dan tanaman relatif deras pada musim kelima (Wibowo, 1996:32). Penanaman jagung, kacang tanah petani lakukan bersama-sama waktunya, yang diatur secara selang-seling dan bagian pematang umumnya ditanami ketela pohon.

Sedangkan tentang cara penanaman jagung dan kacang tanah mereka laksanakan yang sebelumnya dibuat lubang dengan *ponjo* yang terbuat dari kayu dimana bagian ujungnya dibuat runcing, berkedalaman kurang lebih lima sentimeter. *Ponjo* pada umumnya digunakan untuk membuat lubang, dibuat

dari potongan kayu sebesar segenggam orang dewasa dan bagian ujung dibuat lancip.

Kegiatan pembuatan lubang untuk kepentingan penanaman umumnya dilakukan oleh angkatan kerja keluarga, yang mencakup kepala keluarga, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya. Pembuatan lubang satu dengan lubang yang lain kurang lebih berjarak 40 cm, dimana setiap lubang segera diisi dengan bibit tanaman oleh anggota keluarga lainnya sebanyak 3-4 butir. Setelah lubang diisi bibit jagung, agar benih yang baru ditebarkan tidak dimakan burung atau ayam alas. Petani yang mengusahakan lahan pertanian di dalam kawasan hutan di daerah penelitian, selain menanam jagung juga menanam ketela pohon dan kacang tanah. Sedangkan untuk lahan milik yang berlokasi dekat dengan kawasan hutan negara dibawah tanaman tegak ditanami jagung, kacang tanah, ketela pohon, rumput gajah, koro, kunir dan ubi jalar. Berdasarkan keterangan informan yang melakukan usaha tani dalam kawasan hutan, menyatakan bahwa jenis tanaman yang boleh diusahakan hanya jagung, kacang tanah dan ketela pohon dan ketela pohon. Hal ini disebabkan, untuk jenis tanaman lain yang merambat dapat merusak tanaman kehutanan seperti jati, mahoni, orak-arik dan sebagainya.

4. Mendangir dan Menjaga Tanaman

Setelah tanaman jagung, kacang tanah dan ketela dilahan kawasan hutan dan lahan milik petani yang dihutankan berumur 40 hari, petani melakukan tahap berikutnya dangir, yaitu suatu usaha membalik lapisan tanah yang serta membersihkan rumput-rumput pengganggu. Kegiatan *dangir* ini dilakukan petani disekitar kawasan hutan dengan tujuan agar tanaman pokok dapat bertumbuh dengan baik dan kelak akan menghasilkan produksi yang tinggi. Disamping itu, sebagian hasil petani dikawasan hutan desa Hargorejo, khususnya untuk tanaman jagung tidak terganggu sampai menghasilkan jagung tua, melainkan dapat dipanen sebelum waktunya untuk kepentingan makanan ternak sapi dan kambing. Pada umumnya peralatan yang digunakan petani dalam tahap kegiatan dangir berupa pacul, dandang atau plancong. Dalam tahap ini selain membersihkan rumput pengganggu juga bertujuan untuk menggemburkan lapisan tanah yang akan mempercepat proses pembusukan daun-daunan sisa pembakaran pada tahap terdahulu. Di samping itu, kegiatan *dangir* dimaksudkan untuk menghilangkan rumput-rumput pengganggu pertumbuhan tanaman utama jagung (*Zeamays*). Hilangnya rumput-rumputan pengganggu tersebut akan membuat cepat perkembangan dan pertumbuhan tanaman jagung, dan kacang tanah. Penduduk atau petani di daerah penelitian, baik yang melakukan dalam kawasan hutan maupun pada lahan milik secara turun-temurun memiliki pengetahuan, bahwa

kegiatan dangir dapat dilakukan kira-kira tanaman jagung setinggi lutut orang dewasa, yang umumnya menggunakan tenaga kerja berasal dari keluarga dan khusus laki-laki dewasa. Pada jaman dahulu, kegiatan antara petani satu dengan petani lainnya. Namun sekarang ini kegiatan *dangir* sudah tidak dengan cara gotong royong lagi, melainkan banyak menggunakan tenaga kerja keluarga dan sebagian kecil dengan cara diupahkan.

Setelah kegiatan *dangir*, kemudian sampai menunggu saat panen tanaman bersangkutan dijaga dengan baik dari hama atau hewan pengganggu, seperti burung dan ayam alas. Kerusakan tanaman di lahan hutan maupun lahan milik dapat terjadi pada waktu siang hari maupun malam hari. Hal ini disebabkan binatang tersebut mempunyai waktu tertentu dalam merusak tanaman jagung. Upaya petani dalam menanggulangi dari binatang tersebut dilakukan dengan cara tanaman dijaga atau ditunggu pada siang hari. Kegiatan petani menjaga tanaman dalam kawasan hutan, frekuensinya lebih tinggi saat tanaman jagung kurang tiga minggu sebelum tanaman di panen. Disebabkan tanaman jagung, kacang dilakukan pada bidang lahan hutan relatif luas, aktivitas menjaga atau menunggu ini dilakukan secara bergantian dengan tetangga sehingga relatif dibutuhkan tenaga kerja lebih rendah.

5. Tahap Panen

Setelah tahap *dangir* dan menjaga tanaman polowijo pada lahan kering dikawasan hutan Desa Hargorejo, selanjutnya memasuki tahap petani memetik hasilnya atau oleh penduduk setempat disebut saat panen. Dalam tahap ini umumnya petani yang mengerjakan lahan dalam kawasan hutan memetik hasil yang berupa jagung atau kacang tanah, apabila tanaman jagung dan kacang berumur kurang dari 140 hari. Seperti telah diuraikan di muka dalam tahap menanam tanaman tersebut oleh petani dilakukan pada waktu relatif bersamaan, sehingga waktu memungut hasilnya juga dilakukan bersamaan. Selain itu, saat penanaman jagung, kacang dan ketela pohon dilakukan serempak dengan lahan yang dikerjakan orang lain. Hal ini dilakukan petani karena untuk menghindari kerusakan tanaman dari hama seperti burung dan ayam alas.

Pada umumnya petani kawasan hutan di Desa Hargorejo yang mengerjakan lahan menggunakan tenaga keluarga seperti suami, isteri dan anak. Menurut pengakuan informan khususnya yang mengerjakan lahan pertanian dalam kawasan hutan relatif luas, akhir-akhir ini juga menggunakan tenaga kerja orang lain, seperti tetangga dengan cara diupahkan atau dengan cara bagi hasil atau *bawon*. Namun pada umumnya sebagian besar penduduk (petani) menggunakan tenaga

kerja yang berasal dari keluarga. Relatif tingginya petani menggunakan tenaga kerja keluarga dapat disebabkan karena hasil pertanian dalam kawasan hutan hanya dikonsumsi dan relatif kecil hasil pertanian dijual.

Berdasarkan keterangan penduduk, pada waktu dahulu [etani beranggapan tanaman jagung, kacang tanah dan ketela pohon yang banyak ditanam di lahan kawasan hutan merupakan anugrah dari penunggu hutan atau *Dewi Sri*. Nampaknya keyakinan tersebut pada saat ini hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat petani, namun bagi penduduk khususnya petani yang berusia tua masih meyakini hal tersebut. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada *Sing Mbau Rekso* hutan yang telah banyak memberi kemakmuran, pada waktu memanen hasilnya dibuat sesaji atau oleh masyarakat di daerah penelitian disebut *wiwit*. Hal ini dilakukan sebagian petani sebagai persembahan kepada Dewi Sri yang memiliki nilai religius. Selain itu, persembahan kepada *Dwi Sri*, secara terselubung bertujuan agar kegiatan usaha tani pada musim berikutnya memperoleh hasil yang lebih baik. Seperti telah diungkap didepan, bahwa hasil pertanian lahan kering dalam kawasan hutan, baik jagung, kacang tanah dan ketela pohon digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan sendiri (Subsistence), sampai musim panen berikutnya. Sedangkan bagi petani yang menggarap lahan pertanian dalam hutan relatif luas, selain hasilnya dikonsumsi sendiri, sebagian dijual kepasar terdekat. Usaha petani agar memperoleh jagung yang berkualitas baik dan dapat bertahan lama serta tidak dimakan *bubuk*, jagung sebelum disimpan terlebih dahulu ditempatkan diatas *luweng* atau tungku untuk memasak, dengan tujuan jagung memperoleh asap, sehingga jagung akan tahan lama dan dijauhi bubuk.

E. PERIODE PENGGARAPAN LAHAN DAN "BERO" DI KAWASAN HUTAN

Waktu penggarapan Lahan pertanian di dalam kawasan hutan dahulu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama, untuk jenis sistim pertanian hutan primer dan hutan sekunder. Berdasarkan keterangan petani yang melakukan waktu dibandingkan dengan pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian pada hutan skunder. Hal ini dapat terjadi karena kandungan unsur hara dalam tanah dan daun-daunan dalam hutan primer jumlahnya lebih banyak dari pada hutan skunder. Selain itu, juga dapat dilihat dari lama waktu penganggarapan lahan pertanian membutuhkan waktu selama 2 tahun hingga 4 tahun. Sebaliknya penggarapan untuk lahan pertanian pada hutan sekunder selama periode penggarapan kurang dari dua tahun kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah/Perhutani.

Kedua, lama periode penggarapan lahan pertanian dalam kawasan hutan maupun lahan milik yang dihutankan ditentukan besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini disebabkan jumlah penduduk langsung berkaitan dengan kepadatan penduduk, dimana kepadatan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi rasio antara penduduk dan lahan yang rendah, sedangkan kepadatan penduduk yang rendah memiliki rasio antara penduduk dan lahan yang tinggi. Dengan demikian besar jumlah penduduk dalam suatu daerah akan semakin lama periode penggarapan lahan pertanian dalam kawasan hutan maupun lahan milik yang dihutankan. Lamanya periode penggarapan lahan pertanian dalam kawasan hutan maupun wanatani (*agroforestry*) dengan jumlah penduduk yang tinggi, karena kesempatan petani dalam hutan dan wanatani untuk mendapatkan lahan pertanian semakin rendah atau kecil.

Sebagaimana sistem pertanian lahan kering yang terdapat di daerah lain, sistem pertanian lahan kering di Desa Hargorejo juga mengindikasikan adanya saat tidak tanam atau menurut istilah setempat disebut *bero*. Masa *bero* adalah jangka waktu mulai saat bidang lahan pertanian, baik dalam kawasan hutan maupun lahan milik petani yang dihutankan ditinggalkan sampai diusahakan lagi sebagai bidang lahan pertanian baru (Adi Pranowo, 1995: 45). Berdasarkan pendapat Gert (1976) masa *bero* yang biasa dilakukan pada sistem pertanian lahan kering, selain disebabkan pada musim kemarau tidak tersedia air untuk keperluan tanaman, juga dapat berfungsi untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Dengan demikian untuk musim tanam berikutnya petani dalam mengusahakan lahan pertanian baik lahan di kawasan hutan maupun lahan milik, relatif sedikit memerlukan pupuk kompos (kandang) atau penggunaan pupuk lebih *ngirit*.

Menurut penduduk disekitar hutan, dahulu waktu jumlah penduduk masih sedikit, masa *bero* lahan banyak ditentukan banyak sedikitnya tenaga kerja keluarga. Pada petani yang jumlah keluarganya kecil cenderung masa *beronya* lebih lama dibandingkan dengan petani yang jumlah keluarganya lebih besar. Untuk petani di kawasan hutan yang terbatas tenaga kerjanya dalam membuka hutan primer umumnya hanya akan membuka lahan pertanian yang lama. Sebaliknya bagi petani yang memiliki tenaga kerja banyak, cenderung akan membuka hutan primer untuk kegiatan pertanian sistem lahan kering. Hal ini disebabkan lahan pertanian pada sistem lahan pertanian pada hutan primer memiliki keadaan tanah yang masih subur dibandingkan daripada hutan yang pernah dibuka yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Berdasarkan keterangan informan yang telah lama melakukan kegiatan pertanian didalam kawasan hutan di Desa Hargorejo, mempunyai pendapat yang menyatakan bahwa semakin lama masa bero lahan bersangkutan semakin subur lahan untuk musim tanam berikutnya. Hal ini menurut mereka disebabkan zat makanan atau unsur hara tanah semakin tinggi sehingga tanah mengandung pupuk atau lemi yang banyak, akibatnya tanah memiliki tingkat produktifitas tinggi. Kenyataan ini nampaknya sepaham dengan hasil penelitian yang dilakukan Moekiyat (1981) di Kalimantan dan Adi Pranowo (1995) di lereng Merapi. Namun disebabkan jumlah penduduk yang selalu bertambah banyak, sedangkan lahan dalam kawasan hutan yang dapat digarap penduduk sekitar hutan terbatas dan kebutuhan petani semakin tinggi, maka lahan pertanian didalam kawasan hutan di daerah penelitian tidak dapat lama masa beronya. Selain itu, juga disebabkan masa kontrak lahan pertanian dalam kawasan hutan dari Perhutani kepada penduduk disekitar hutan sangat terbatas.

BAB IV

PERSEPSI DAN SIKAP TERHADAP HUTAN

Perilaku seseorang terhadap keberadaan suatu obyek, dalam hal ini sumberdaya hutan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor individu atau dari dalam maupun dari luar. Faktor individu meliputi keadaan seseorang terdiri dari status sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan yang berasal dari faktor luar meliputi segala sesuatu yang ada disekitarnya yang mampu mempengaruhi seseorang untuk berperan terhadap suatu kegiatan tertentu, seperti masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian perilaku seseorang sangat ditentukan oleh penilaian terhadap hutan yang terdapat dalam suatu wilayah dapat melalui beberapa tahap atau proses, yang masing-masing anggota masyarakat dikawasan hutan sangat berbeda-beda. Melalui tahap-tahap tersebut penduduk dikawasan hutan dapat memilih, mengelola dan mengatur yang dapat diwujudkan suatu tindakan atau perilaku seseorang terhadap hutan.

Berawal dari persepsi seseorang terhadap hutan besar pengaruhnya pada wujud hubungan manusia dengan hutan, yang dapat dibedakan menjadi seseorang menolak lingkungan, kerja- sama dan menguras lingkungan (mengeploitasi). Seseorang menolak lingkungan, disebabkan seseorang mempunyai pandangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan, sehingga seseorang bersangkutan dapat memberikan bentuk tindakan terhadap hutan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sebaliknya bagi petani yang mempunyai sikap menerima lingkungan, seseorang dapat memanfaatkan hutan dan sekaligus menjaga dan menyelamatkan hutan dari kerusakan, sehingga hutan memberi manfaat yang terus menerus. Dengan demikian lingkungan hutanyang selalu terjaga kelestariannya dari kerusakan, akan memberi manfaat kepada masyarakat disekitar kawasan hutan dan negara yang berupa devisa (Djayahadikusuma, 1994: 268).

Dengan demikian pada pembahasan dalam bab ini diuraikan meliputi : persepsi, sikap, nilai budaya, kepercayaan dan tradisi terhadap hutan di daerah penelitian.

A. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUTAN

Pada hakekatnya setiap suku bangsa dengan tingkat budaya sederhana sudah pasti memiliki sistim pengetahuan sebagai salah satu diantara ketujuh

unsur kebudayaan yang bersifat universal. Sudah barang tentu pengetahuan yang mereka miliki itu sangat sederhana atau tradisional. Pengetahuan itu dapat berfungsi memberi arah pada setiap individu atau kelompok yang akan melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian setiap tindakannya akan selalu menggunakan *petungan* jika akan bercocok tanam dan ini sangat berkaitan erat dengan pengetahuan mereka tentang *musim*. Kemudian pengetahuan lain, yang mereka miliki antara lain tentang sungai, gempa, gerhana, gunung dan hutan. Khususnya pengetahuan tentang hutan biasanya selalu dikramatkan oleh penduduk disekitar kawasan hutan. Menurut pemahaman petani bahwa hutan itu ditunggu oleh mahluk halus, maka diyakini mereka sangat angker. setiap pohon yang tumbuh di dalam hutan pasti akan ditunggu oleh mahluk halus. Lebih-lebih pada pohon yang besar, hutan ini lalu mereka sebut *angker*. Pengetahuan itu dengan sendirinya akan membatasi aktivitas mereka dalam hutan. Dengan demikian mereka tidak akan sembarangan menebang pohon didalam hutan, sehingga kelestarian hutan relatif terjaga.

Pada tabel IV.1 dapat dilihat mengenai persepsi responden terhadap hutan. Persepsi ini sangat erat dengan pengetahuan mereka terhadap hutan.

Tabel IV.1
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP HUTAN
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Persepsi responden tentang hutan	Jumlah	Persentase
1.	Lahan milik pemerintah/perhutani yang ditanami tanaman keras dan tanaman liar yang hasilnya menjadi milik negara, dan penduduk di sekitar hutan tidak boleh merusak	27	45,00
2.	Lahan milik negara yang ditanami tanaman keras dan masyarakat di kawasan hutan dapat mengelola di bawah tegak tanaman hutan	18	30,00
3.	Alas atau wono yang banyak tumbuh tanaman besar yang dijaga oleh mahluk halus.	9	15,00
4.	Lahan yang banyak tumbuh tanaman dan dikuasai oleh negara.	4	6,66
5.	Lahan yang tumbuh berbagai flora fauna/hewan.	2	3,34
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Menurut penduduk setempat hutan itu adalah lahan milik pemerintah/perhutani yang ditanami tanaman keras dan tanaman liar yang hasilnya menjadi milik negara, dan penduduk disekitar hutan tidak boleh dirusak. Pendapat responden yang mengatakan demikian ada sebanyak 27 orang (45%). Pendapat ini merupakan pendapat yang paling banyak. Berdasarkan persepsi penduduk yang berpendapat atau tanpa disadari demikian itu berarti mereka menyadari sepenuhnya bahwa tanaman yang ada didalam hutan bukan menjadi miliknya. Mereka tidak akan seenaknya menebangi pohon-pohon itu seenaknya sendiri. Dengan demikian ekosistem akan tetap terjaga kelestariannya. Hasil itu sepenuhnya menjadi milik pemerintah dan itu sangat disadari oleh penduduk setempat.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hutan merupakan lahan milik negara yang ditanami tanaman keras dan masyarakat di kawasan hutan dapat mengelola dibawah tanaman tegak hutan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa persepsi yang dilontarkan oleh penduduk itu menunjukkan adanya satu kerjasama antara penduduk dengan perhutani/pemerintah. Artinya penduduk diperbolehkan untuk menanam di sela-sela tanaman hutan itu. Sudah barang tentu penduduk yang menanam didalam hutan itu juga akan menjaga tanamannya. Secara tidak langsung penduduk setempat juga akan menjaga keselamatan hutan itu dari ancaman pengrusakan hutan. Disisi lain sesungguhnya penduduk dibebani tanggung jawab untuk turut menjaga keselamatan hutan. Sebagai imbalannya mereka diijinkan untuk mengelola tanamannya didalam hutan. Persepsi ini dikemukakan oleh 18 responden (30%). *Alas* atau *wono* itu banyak ditumbuhi oleh tanaman besar yang dijaga oleh mahluk halus. Pendapat semacam ini sesungguhnya sudah disinggung dimuka. Adanya pendapat itu maka penduduk akan takut untuk pergi ke hutan. Sesungguhnya ini merupakan bentuk pengendalian sosial. Rasa takut itu akan menyebabkan mereka tidak akan menebangi pohon seenaknya sendiri. Mereka sudah terhalangi oleh kepercayaannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh pihak pemerintah/perhutani. Persepsi semacam ini sangat menguntungkan karena penggundulan hutan tidak akan pernah terjadi, sehingga lingkungan hutan menjadi terjaga kelestariannya. Persepsi ini dilontarkan oleh 9 orang responden (15%) dari jumlah responden yang ada. Sesungguhnya pendapat berikut ini hampir ada kesamaan dengan pendapat pertama hutan itu lahan yang banyak tumbuh tanaman liar dan dikuasai oleh negara tetapi penduduk tidak menyebutkan adanya larangan untuk tidak boleh merusak hutan. Pendapat ini dimungkinkan akan memberi peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Sikap semacam ini jelas bukan pihak perhutani saja yang dirugikan. Bahkan bisa merugikan penduduk. Penggundulan hutan akan terjadi sebagai akibatnya banjir tidak bisa ditahan. Tanah menjadi longsor, sumber mata air akan menjadi mati, akhirnya kekeringan akan terjadi. Kelestarian hutan menjadi tidak terkendali lagi. Sebagai akibatnya semua akan menderita karenanya. Persepsi ini dilontarkan oleh empat orang responden (6,66%) dari jumlah responden yang ada. Sisanya sebanyak 2 orang responden (3,34%), mengatakan bahwa hutan itu merupakan lahan yang tumbuh berbagai flora/fauna/hewan. Persepsi yang demikian itu sesungguhnya merupakan sikap yang kurang peduli terhadap keberadaan hutan. Bila dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya. Seolah-olah hutan itu tidak ada yang mengawasi. Dengan pengertian itu memang benar, tetapi bagaimana tangga-

pan mereka dengan isi hutan itu sikapnya kurang jelas. Namun untungnya pendapat yang demikian itu hanya kecil saja. Pada hakekatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan boleh dikatakan cukup tinggi.

Adanya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dapat dilihat pada tabel IV.2. berikut ini :

Tabel IV.2
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP MASYARAKAT
MERUSAK HUTAN DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Tanggapan responden terhadap masyarakat merusak hutan	Jumlah	Persentase
1.	Karena hutan dapat menyimpan air yang sangat diperlukan penduduk di kawasan hutan, khususnya pada musim kemarau.	15	25,00
2.	Hutan yang rusak akan menyebabkan lahan gundul, yang mengakibatkan persediaan air berkurang.	24	40,00
3.	Hutan memiliki fungsi ganda bagi masyarakat di kawasan hutan maka harus dijaga bersama-sama.	7	11,66
4.	Hutan banyak menyediakan semua kebutuhan masyarakat untuk kepentingan generasi mendatang.	9	15,00
5.	Hutan dihuni oleh mahluk halus, bila dirusak mahluk akan murka.	5	8,34
Jumlah		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Keberadaan hutan dikawasannya ini sesungguhnya sangatlah dibutuhkan masyarakat. Mereka secara sadar tahu bahwa apa bila hutan gundul sudah dapat dipastikan kekeringan akan terjadi di musim kemarau. Sebagaimana dapat diketahui melalui tanggapan responden terhadap masyarakat

yang merusak hutan. Menurut mereka karena hutan dapat menyimpan air yang sangat diperlukan penduduk di kawasan hutan, khususnya pada musim kemarau. Tanggapan responden ini sebanyak 15 orang (25%). Berdasarkan tanggapan yang ada ini, maka dimungkinkan mereka secara tidak langsung akan mengekang pada dirinya sendiri melakukan pengrusakan hutan. Selain itu mereka dipastikan akan turut mengawasi dan melarang tetangganya yang akan melakukan pengrusakan hutan. Selain itu mereka dipastikan akan turut mengawasi dan melarang tetangganya yang akan melakukan pengrusakan hutan. Mereka berarti sangat peduli terhadap lingkungannya. Mengingat hutan itu dapat menyimpan air yang sangat dibutuhkan untuk lahan pertaniannya. Tanggapan berikutnya mengatakan hutan yang rusak akan menyebabkan lahan gundul, yang mengakibatkan persediaan air berkurang. Tanggapan ini sesungguhnya hampir ada kesamaannya dengan pendapat yang dahulu. Titik tekan tanggapan ini berkisar pada masalah kekeringan. Mereka itu sangat mendambakan air yang melimpah. Tanggapan atau alasan ini sangat dimengerti karena air bagi petani sangat dibutuhkan para petani. Memang hampir sebagian penduduk Hargorejo adalah petani. Tanggapan ini mencapai 24 responden (40%) yang berarti hampir separuh dari jumlah responden yang ada. Dengan demikian maka tanggapan ini sangat positif.

Tanggapan lain mengatakan bahwa hutan memiliki fungsi ganda bagi masyarakat di kawasan hutan maka harus dijaga bersama-sama. Jelas sekali bahwa tanggapan merupakan suatu ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Kelestarian hutan sebaiknya jangan hanya dibebankan pada pemerintah saja, sebaiknya juga anggota masyarakat juga dibebani tanggung jawab. Sudah barang tentu ini perlu dijalin kerjasama antara pemerintah setempat perhutani dan masyarakat. Mereka sangat sadar bahwa hutan mempunyai fungsi yang penting tidak saja bagi masyarakat sekitar tetapi juga bagi masyarakat luas. Tanggapan yang demikian ini mencapai 7 orang responden (11,66%).

Keberadaan hutan menurut tanggapannya banyak menyediakan semua kebutuhan masyarakat untuk generasi mendatang. Penduduk setempat yang berpendapat demikian ini sudah memikirkan masa yang akan datang. Mereka tidak hanya berpikir saat ini. Dari pemikiran ini jelas menunjukkan suatu tanggung jawab yang besar penduduk di kawasan hutan terhadap kelestarian hutan. Wawasannya boleh dikatakan cukup luas, Tanggapan ini mencapai 9 orang (15%). Tanggapan yang lain mengatakan hutan itu dihuni oleh mahluk halus, bila dirusak mahluk halus akan murka. Tanggapan semacam ini merupakan suatu tanggapan yang umum terjadi. Dan boleh dikatakan merupakan tanggapan

masyarakat desa pada umumnya atau merupakan ciri-ciri pendapat masyarakat desa. Tanggapan semacam ini tidak bisa dilepaskan dengan kepercayaan. Kadang-kadang mereka selalu mengadakan upacara-upacara yang berkaitan dengan hutan ini. Agar penduduk selamat dan tidak diganggu oleh makhluk halus. Tanggapan ini jelas sangat menguntungkan. Mereka itu akan jarang pergi ke hutan dan tidak akan merusak hutan. Tanggapan ini sebenarnya salah satu bentuk pengendalian sosial yang sangat menguntungkan. Dengan demikian hutan akan tetap terjaga kelestariannya. Mereka tidak akan menebang pohon secara sembarangan. Apalagi terhadap pohon yang dikeramatkan. Biasanya pada pohon-pohon yang besar seperti pohon jati. Tanggapan yang demikian ini mencapai 5 orang responden (8,34%).

Berbagai tanggapan responden terhadap masyarakat yang merusak hutan sangat bervariasi. Namun demikian bila dicermati maka tanggapan ini menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat setempat sangat menyayangkan bila ada penduduk yang merusak hutan. Mengingat hutan sangat berfungsi untuk kelangsungan hidup mereka. Khususnya air yang sangat berguna bagi lahan pertaniannya.

Perhutani sebagai suatu lembaga pemerintah yang mengelola dan mengawasi hutan ada kalanya mengeluarkan kebijaksanaan yang mengizinkan penduduk yang tinggal di sekitar hutan untuk mengolah hutan. Pada tabel IV.3 berikut ini dapat dilihat tindakan responden adalah, diberi kebebasan mengolah hutan.

Tabel IV.3
TINDAKAN RESPONDEN ANDAIKATA DIBERI KEBEBASAN
DI KAWASAN HUTAN DI DESA HARGOREJO 1996

No.	Tindakan responden	Jumlah	Prosentase
1.	Akan memanfaatkan lahan kawasan hutan dengan menanam tanaman pangan dan menjaga tanaman hutan.	21	35,00
2.	Akan memahami lahan kawasan hutan dengan tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.	14	23,33
3.	Akan mengerjakan lahan di kawasan hutan dengan cara terasiring dan menanam tanaman pangan.	19	31,67
4.	Akan mengerjakan lahan hutan sesuai dengan peraturan perhutani.	6	10,00
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Kelompok pertama mengatakan bahwa jika pihak pemerintah,/perhutani memberi kebebasan untuk mengolah hutan maka para responden akan memanfaatkan lahan kawasan hutan dengan menanam tanaman pangan dan menjaga tanaman hutan. Kebebasan yang diberikan pihak perhutani itu ternyata dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Mereka pada umumnya menanam tanaman pangan yang berupa ketela pohon, jagung dan kacang. Sebagai imbalannya selain merawat dan menjaga tanamannya sendiri mereka juga turut menjaga tanaman hutan. Uluran tangan dari pihak perhutani ini ternyata sangat positif. Berarti ini suatu bentuk kerjasama menjadi terjaln antara pihak perhutani dengan penduduk. Sesungguhnya mereka itu saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jalinan kerjasama itu sudah barang tentu diharapkan saling mendukung. Mereka sama-sama menggunakan hutan, pihak petani juga menikmati hasilnya dari tanamannya yang ada di kawasan hutan. Tindakan responden yang demikian itu mencapai 21 orang (35%).

Tindakan yang lain mengatakan akan menanam lahan kawasan hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. tindakan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tindakan kelompok pertama. Persoalannya hanya apakah mereka ada kesadaran juga untuk turut serta menjaga tanaman hutan. Diharapkan mereka seharusnya juga turut serta melestarikan dan menjaga tanaman hutan, sebanyak 14 responden atau sebesar 23,33 persen.

Tindakan yang ketiga apabila penduduk diberi kebebasan mengolah hutan mengatakan akan mengerjakan lahan di kawasan hutan dengan cara terasering dan menanam tanaman pangan. Tindakan penduduk yang demikian ini mencapai 19 orang (31,67%). Sesungguhnya bila tindakan ini benar terjadi, maka dapat dikatakan bahwa penduduk sudah mempunyai kesadaran lingkungan. Pengerjakan tanah dengan cara terasering ini berarti akan menanggulangi tanah longsor. Selain itu dengan cara terasering maka humus-humus yang ada tidak akan hilang karena air. Sebab humus-humus ini akan sangat berguna bagi kesuburan tanaman. Jelas sekali tindakan yang demikian itu akan sangat positif bagi petani maupun pemerintah. Pelongsoran tanah tidak akan terjadi, erosi menjadi terkendali. Kesuburan tanah mengakibatkan tanaman menjadi tumbuh secara baik, sehingga kelestarian hutan akan terjadi. Tindakan responden kelompok empat mengatakan akan mengerjakan lahan hutan sesuai dengan petunjuk perhutani. Tindakan ini nampak lebih luwes, artinya mereka akan mengerjakan atau mengolah hutan berdasarkan peraturan yang ada, yang dikeluarkan pihak perhutani. Jika pernyataan itu benar maka kelestarian dan keberadaan hutan akan terjamin keselamatannya. Penduduk yang mengatakan demikian itu akan mudah diarahkan karena mematuhi peraturan yang telah ada. Meskipun demikian itu akan mudah diarahkan karena mematuhi peraturan yang telah ada. Meskipun tindakan yang semacam ini paling kecil yaitu hanya 6 orang responden (10,00%), tetapi jelas ini merupakan tindakan yang cukup positif. Namun bila dicermati secara sepintas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penduduk pada dasarnya sangat positif sekali. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada pokoknya sangat mendukung keinginan pihak pemerintah/perhutani yaitu menjaga kelestarian hutan.

Tentang tindakan kebenaran yang dilakukan oleh penduduk setempat sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan pemahaman responden terhadap hutan. Pada tabel berikut ini (Tabel IV.4) menunjukkan pemahaman fungsi hutan dari responden di daerah penelitian tahun 1996.

Tabel IV.4
FUNGSI HUTAN MENURUT PEMAHAMAN
RESPONDEN DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Pemahaman Responden	Jumlah	Persentase
1.	Dapat menyediakan kebutuhan lahan dan kebutuhan kayu bakar makanan ternak.	28	46,67
2.	Berfungsi menyimpan air dan mencegah tanah longsor.	19	31,66
3.	Dapat melestarikan tanaman dan hewan/binatang langka.	6	10,00
4.	Menyediakan rumput untuk makan an ternak.	7	11,67
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Untuk menanggulangi dan meminimalkan akibat yang buruk maka diperlukan adanya suatu pedoman untuk melestarikan lingkungan hidup yaitu dengan cara:

1. Manusia hendaknya selalu memelihara dan memperbaiki lingkungan demi untuk generasi mendatang.
2. Sumber daya alam seperti bumi yang terdiri dari udara, air, tanah, flora dan fauna harus dihindari dan diselamatkan dari ancaman kerusakan.
3. Dalam kebijaksanaan lingkungan hendaknya diarahkan kepada peningkatan potensi pembangunan, bukan untuk masa kini saja namun untuk kepentingan masa mendatang.
4. Sebagian hasil pemanfaatan sumberdaya alam hendaknya disediakan untuk mengawetkan dan memperbaiki lingkungan.
5. Perlu adanya pendidikan dan penelitian maupun pengembangan secara ilmiah dalam masalah lingkungan dapat ditanggulangi.
6. Ada kerjasama yang baik dari semua pihak dalam rangka mempertahankan kelestarian dan mencegah terjadinya kerusakan atau kemusnahan. (Supandi, 1985: 2-4).

Pedoman di atas bila terpenuhi atau ditaati oleh masyarakat jelas akan sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk kelestarian lingkungan. Untuk memenuhi terwujudnya pedoman tadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya penduduk Hargorejo untuk melestarikan lingkungan sebenarnya dapat diketahui dari pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap hutan akan menghasilkan tindakan baik yang positif maupun negatif. Kelompok responden pertama mengatakan bahwa hutan dapat menyediakan kebutuhan kayu bakar, makanan ternak. Pemahaman yang demikian itu mencapai 28 orang responden (46,67%) pemahaman yang sederhana bila diterima bahwa hutan dapat digunakan untuk lahan pertanian. Kenyataan menunjukkan bahwa penduduk juga menanam tanaman pangan di hutan. Mereka juga sering mencari kayu bakar di hutan. Selain mereka juga sering merumput di hutan untuk ternaknya. Dengan demikian bagi penduduk setempat jelas hutan sangat bermanfaat. Persoalannya sekarang adalah apakah pengambilan kayu bakar, makanan ternak itu merusak hutan atau tidak. Mereka perlu diberi pengarahan agar didalam mengambil kayu bakar hendaknya jangan sampai menebangi pohon-pohon, tetapi mengambil ranting-ranting yang sudah jatuh dan kering. Bila merumput hendaknya jangan sampai menginjak-injak pohon yang sedang tumbuh. Pendek kata mereka harus tetap diarahkan untuk tidak merusak hutan.

Pemahaman yang lain mengatakan bahwa hutan berfungsi menyimpan air dan mencegah tanah longsor. Pemahaman ini nampak lebih berwawasan lingkungan. Mereka sangat sadar akan arti dan fungsi hutan bagi kehidupan yang akan datang. Kesadaran semacam ini tentu sangat menguntungkan. Mereka tentu tidak akan menebangi hutan seenaknya. Secara tidak sadar penduduk setempat ikut serta menyelamatkan sumber daya alam. Penduduk setempat sudah mempunyai visi ke depan. Sudah tentu pemahaman semacam ini sangat mendukung adanya kelestarian hutan. Dengan adanya pemahaman ini berarti mereka sudah dapat mengendalikan diri untuk tidak merusak hutan, sebesar 31,66 persen.

Hutan dapat melestarikan tanaman dan hewan/binatang langka pemahaman ini dikemukakan oleh 6 orang responden (10%) dari responden yang ada. Pemikiran penduduk ini cukup berarti. Mereka tentu membayangkan sebuah hutan lindung yang ada tanaman dan binatang langkanya yang hampir punah. Pemikiran semacam ini tentu akan menghasilkan tindakan penduduk yang positif. Khususnya pada tumbuh dan berkembangnya sumberdaya alam. Pemahaman terakhir mengatakan bahwa hutan menyediakan rumput untuk makanan ternak. Pemikiran yang sederhana ini jelas baru pada tingkat memenuhi kebutuhannya

sendiri. Tidak bisa dipungkiri dan sangat dipahami selain bertani mereka juga beternak. Ternak-ternak tadi untuk mencukupi kebutuhannya, karena sektor pertanian dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu mereka juga mendambakan hutan sebagai ladang rumput yang akan bermanfaat bagi ternak-ternaknya, sebesar 11,67 persen.

Setelah mengetahui berbagai pemahaman mengenai fungsi hutan, maka dapat dikatakan hampir sebagian besar penduduk telah menyadari pentingnya hutan bagi kehidupan manusia. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama ini hampir memenuhi dan mendekati keenam pedoman di atas. Jika ada yang menyimpang itupun hanya sebagian kecil saja. Kelestarian hutan masih menjadi dambaan mereka.

B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP HUTAN

Dalam masyarakat di daerah pedesaan, khususnya yang bermukim di sekitar hutan, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan itu dapat terjadi karena anggota masyarakat disekitar kawasan hutan memiliki latar belakang yang tidak sama, seperti tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya. Disamping itu sikap masyarakat disekitar kawasan hutan dalam menanggapi semua program yang digalakkan pemerintah, seperti penghijauan dan rehabilitasi hutan, juga dipengaruhi oleh partisipasi penduduk dikawasan hutan dalam program tersebut. Bagi anggota masyarakat atau petani yang secara langsung terlibat dalam program penghijauan dan rehabilitasi hutan yang dilakukan perhutani, cenderung memiliki sikap positif, sedangkan bagi anggota masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan program tersebut ada kecenderungan menunjukkan sikap netral. Nampaknya hal ini ada kesesuaian dengan pendapat Koentjaraningrat (1974:33) yang menyatakan bahwa sikap merupakan desposisi atau keadaan mental dalam jiwa seseorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungan, dalam hal ini menyangkut lingkungan hutan.

Secara umum masyarakat disekitar hutan di daerah penelitian, merupakan masyarakat tradisional yang masih kuat memegang norma-norma yang berlaku dan berlangsung secara turun-temurun. Dalam menentukan sikap, anggota masyarakat yang hidup dalam komunitas tertentu tidak dapat lepas dari sistem nilai budaya yang lama telah dimiliki, sehingga sikap anggota masyarakat di sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan hutan lebih banyak ditentukan oleh pengalaman hidup yang telah dijalankan sebelumnya. Dilihat dari pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang ditunggal disekitar kawasan hutan di daerah penelitian merupakan petani, bertempat tinggal pada daerah

bertopografi kasar dan melakukan sistem pertanian lahan kering, sehingga penduduk dalam menanggapi keadaan lahan seperti itu sudah jauh pengalaman. Dengan demikian sikap penduduk mereka terhadap program Perhutani seperti penghijauan dan rehabilitasi lahan hutan cenderung positif. Tanggapan penduduk yang bekerja sebagai petani dikawasan hutan seperti itu dapat dipahami, karena sumberdaya hutan dapat menyediakan kebutuhan penduduk yang berada disekitar hutan, misalnya lahan pertanian, kayu bakar, rumput makanan ternak dan lain-lain.

Seperti telah dikemukakan di muka, bahwa sebagian besar penduduk di daerah penelitian mempunyai matapencaharian dibidang pertanian. Koentjaraningrat (1974:45) menerangkan keadaan mentalitet petani selalu mencari keselarasan atau kesesuaian dengan lingkungan sekitar. Dalam rangka mencari keselarasan dengan lingkungan hutan penduduk disekitarnya mempunyai tindakan-tindakan tertentu terhadap hutan, dengan tujuan agar ekosistem hutan tetap lestari.

1. Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan

Program reboisasi dan rehabilitasi hutan merupakan suatu program penanaman dan perbaikan tanaman hutan, awalnya dilakukan dengan membabat tanaman liar yang selanjutnya diikuti perbuatan terasering dan lubang tempat menanam jati, mahoni, kayu putih dan sebagainya. Pelaksanaan program penanaman dan perbaikan tanaman, pemerintah dalam hal ini Perhutani memanfaatkan masyarakat petani disekitar kawasan hutan. Petani yang ikut berperan dalam program reboisasi dan rehabilitasi hutan, oleh pemerintah diberi kesempatan usaha tani jenis polowijo dan sebagai imbalannya petani kepada Perhutani mereka berkewajiban menanam dan menjaga tanaman hutan yang masih kecil. Menurut penduduk di daerah penelitian, bahwa kesempatan untuk ikut menggarap lahan didalam hutan saat ini relatif waktunya lebih pendek dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan pemerintah pada waktu dahulu sewaktu penduduk masih jarang. Pada umumnya penduduk disekitar hutan memiliki lahan pertanian luas, baik pekarangan maupun tegalan, sehingga dahulu relatif kesempatan tersebut kurang menarik. Kebanyakan mereka yang bekerja dikawasan hutan mempunyai maksud memperoleh keuntungan dari tanaman hutan yang ditebang untuk mencukupi kebutuhan sendiri.

2. Program Penghijauan di Kawasan Hutan

Bentuk usaha lain yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk menjaga

kelestarian dan menanggulangi terjadinya erosi atau tanah longsor dan banjir didaerah hilir. Adanya program penghijauan untuk daerah hulu dikawasan hutan yang memiliki kemiringan relatif tinggi membuat lahan akan lebih mudah menyerap air dan sekaligus menyimpannya, yang pada musim kemarau sangat diperlukan oleh penduduk yang tinggal disekitar hutan. Program penghijauan lebih utama ditujukan untuk lahan milik rakyat yang kondisinya kritis. Dengan program penghijauan tersebut diharapkan lahan kritis dapat berfungsi meningkatkan taraf hidup penduduk disekitar hutan. Berkaitan dengan program itu, maka jenis tanaman yang dipilihnya adalah pohon yang memiliki nilai ekonomi relatif tinggi. selain itu jenis tanaman bersangkutan memiliki sifat-sifat spesifik dan berfungsi mengawetkan tingkat kesuburan lahan, seperti sengon (*Albizia falcotara*), jati, sonokeling, akasia. Sedangkan lahan milik penduduk yang dihutankan, seperti sengon, akasia, orak arik, suket kolonjono dan rumput gajah. Pada awalnya tanaman hutan tersebut, petani memiliki lahan diberi cuma-cuma oleh pemerintah untuk ditanam pada lahan sekitar hutan negara. Menurut informasi penduduk sekitar kawasan hutan, dimana sebagian lahan miliknya dihutankan, awal program penghijauan dilakukan pemerintah, masyarakat disekitarnya umumnya sulit menerima. Hal ini disebabkan sebagian penduduk telah dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering yang merupakan matapencaharian penduduk disekitar hutan.

Namun demikian lahan milik penduduk disekitar hutan masih terdapat yang kosong atau belum ditanami, lahan *bero*. Saat lahan pertanian dalam keadaan nganggur atau *bero* mempunyai fungsi penting, karena bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan lahan dan umumnya tumbuh rumput yang dapat dimanfaatkan makanan ternak. Selain itu program penghijauan menurut penduduk pada awal program merugikan karena penghasilan dari lahan bersangkutan berkurang. Dari alasan tersebut memang masuk akal, sebab lahan milik mereka relatif penuh dengan tanaman pangan dan tanaman keras. Andaikata mereka harus menanam seperti yang dianjurkan pemerintah, maka semua tanaman pada lahan bersangkutan lebih dahulu harus ditiadakan. Padahal menurut perhitungan mereka dana untuk penanaman kembali dengan tanaman yang dianjurkan pemerintah, hasilnya tidak sebanding dengan seluruh tenaga kerja yang diperlukan.

Program penghijauan didaerah penelitian dimulai sekitar tahun 1976, awalnya kurang diterima oleh masyarakat. Namun secara lambat laun program penghijauan hutan terutama pada lahan kritis diterima penduduk disekitar kawasan hutan. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat disekitar kawasan hutan mulai mengetahui manfaat hutan serta hasilnya dapat langsung dirasakan penduduk bersangkutan. Disamping itu juga disebabkan pendekatan yang

digunakan pemerintah dalam hal ini perhutani penghijauan tidak langsung disampaikan kepada masyarakat, namun pengenalan program melalui tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dari 60 responden yang dijangkau dalam penelitian ini, semuanya menyatakan setuju terhadap program penghijauan yang digerakkan pemerintah, bahkan penduduk di sekitar hutan secara swadaya mulai melakukan penanaman kayu-kayuan pada lahan miliknya sendiri. Alasan responden mengenai pentingnya program penghijauan hutan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5
ALASAN RESPONDEN TENTANG PENTINGNYA PENGHIJAUAN HUTAN
DI DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Alasan responden	Jumlah	Persentase
1.	Agar lahan dalam kawasan hutan tidak gundul yang menyebabkan kekeringan.	13	21,67
2.	Dengan penghijauan yang baik akan memakmurkan masyarakat di kawasan hutan.	14	23,33
3.	Agar lahan dalam kawasan hutan subur dan produktivitasnya tinggi	10	16,67
4.	Akan memberi rasa sejuk, tentram kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.	15	25,00
5.	Hutan yang terjaga tanamannya dapat menyimpan air yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan hutan.	8	13,33
Jumlah		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Hutan pada hakekatnya tidak saja merupakan dunia tumbuh-tumbuhan yang nyaman bagi fauna yang menjadi penghuninya. Lebih dari itu hutan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baik sekarang maupun dimasa

yang akan datang. Salah satu upaya yang baik untuk melestarikan hutan yang tidak hanya terbatas pada mengembangkan dan melepaskan kembali ke alam bebas. Suatu cara lain yang juga penting dalam melestarikan hutan adalah dengan penuh kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengadakan penghijauan dan menjaga dari pengrusakan hutan (Siwinarti, 1996: 12-13). Bertolak dari pemikiran itu maka dapat dilihat partisipasi dan keterlibatan penduduk dalam ikut melestarikan hutan. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan mengenai pentingnya penghijauan. Alasan pertama mengatakan penghijauan itu penting agar lahan dalam kawasan hutan tidak gundul yang menyebabkan kekeringan. Berdasarkan alasan penduduk itu, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah menyadari pentingnya kelestarian hutan. Alasan mereka itu mengundang wawasan lingkungan. Penggundulan hutan akan menyebabkan kekeringan yang tentu saja akan sangat merugikan penduduk setempat. Khususnya tanaman yang ada di lahan pertaniannya tidak akan tumbuh subur. Bahkan kekeringan itu menyebabkan mereka tidak bisa memulai bercocok tanam. Alasan ini dikemukakan oleh 13 orang responden (21,67%).

Alasan lain dikatakan oleh 14 orang responden (23,33%) dengan penghijauan yang baik akan memakmurkan masyarakat di kawasan hutan. Pada prinsipnya alasan ini tidak jauh berbeda dengan alasan pertama. Mereka itu tahu dengan adanya penghijauan itu tidak akan menyebabkan kekeringan. Penggundulan hutan tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian kelestarian hutan akan tetap terjaga. Air akan tetap melimpah ruah dengan sendirinya kemakmuran akan terwujud. Karena lahan pertaniannya tidak akan pernah kekurangan air. Selain itu kemungkinan besar dengan adanya penghijauan mereka akan dapat bekerja dan ikut serta terlibat mengolah hutan. Hasil kerja itu akan menambah penghasilan. Mereka akan ikut menikmati hasil hutan itu.

Penghijauan akan menyebabkan lahan dalam kawasan hutan subur dan produktivitasnya tinggi. Alasan ini dikemukakan oleh 10 orang responden (16,67%). Berarti mereka sangat sadar akan arti penghijauan itu. Bagi mereka dengan adanya penghijauan itu penggundulan hutan tidak akan pernah terjadi. Kekeringan tidak pernah ada, air menjadi melimpah. Lahan pertaniannya akan tetap terairi dengan baik. Lahan pertaniannya yang ada di sekitar kawasan hutan dengan sendirinya akan menjadi produktif. Alasan lain mengatakan bahwa penghijauan akan memberi rasa sejuk, tenang kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Apa yang dikemukakan oleh penduduk setempat itu lebih cenderung pada pemandangan yang indah. Mereka mendambakan kenikmatan rasa, adanya penghijauan itu akan memberi rasa sejuk dan teduh dan ketenteraman akan terjadi. Sesungguhnya pandangan/alasan seperti ini juga menginginkan adanya tanaman

yang subur. Mereka tidak senang bila hutan menjadi gundul dan kekeringan. Paling tidak menurut mereka hidup menjadi tidak tenang. Alasan ini dikemukakan oleh 15 orang responden (25%).

Hutan yang terjaga tanamannya dapat menyimpan air yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Demikian alasan mereka tentang penghijauan itu. Menurut penduduk setempat karena hutan dapat menyimpan air. Oleh sebab itu hutan harus tetap dijaga agar jangan sampai gundul yang dapat menyebabkan kekeringan. Sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam uraian ini, pada pokoknya air merupakan kebutuhan yang sangat vital, bagi penduduk setempat. Bagi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian untuk kehidupannya, jelas sekali bahwa mereka sangat mendambakan air yang berlimpah ruah untuk tanah pertaniannya. Jadi logislah alasan mereka jika penghijauan itu sangat penting dilakukan. Mereka berharap agar supaya jangan sampai terjadi kekeringan. Alasan ini dikemukakan oleh 8 orang responden (13,38%) dari responden yang ada. Berbagai alasan yang dikemukakan tadi pada hakekatnya mereka memandang penting adanya penghijauan. Tanpa disadari sesungguhnya mereka sangat mendukung adanya kelestarian hutan. Jika alasan-alasan yang mereka kemukakan benar-benar ditaati sudah dapat dipastikan penggundulan hutan tidak akan pernah terjadi. Hutan akan tetap tumbuh subur, pengrusakan tidak akan pernah terjadi.

3. Sikap Masyarakat Terhadap Kelestarian Hutan

Kelestarian hutan dalam suatu daerah mempunyai peranan sangat penting untuk mencukupi semua kebutuhan penduduk disekitar hutan seperti kayu bakar, rumput untuk makanan ternak dan sebagainya. Hal ini penting tidak saja untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Selain dapat mencukupi terhadap kebutuhan penduduk pada waktu sekarang dan mendatang, juga akan memberi peluang yang besar terhadap penerimaan devisa negara dari hasil-hasil hutan yang dapat diekspor ke luar negeri. Dengan demikian hasil hutan memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya pertimbangan ekologis, namun menyangkut permasalahan ekonomis masyarakat disekitarnya dan pemerintah.

Di daerah penelitian dari 60 responden yang mencakup responden yang menggarap lahan pertanian dalam wanatani, semuanya menyatakan setuju tentang adanya aturan yang mewajibkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan untuk memelihara dan menjaga kelestariannya. Hal ini dapat dipahami karena kalau hutan rusak, malapetaka, seperti tanah longsor yang langsung merasakan adalah penduduk yang tinggal disekitar hutan. Dengan demikian untuk menjaga

agar hutan tetap terjaga kelestariannya, masyarakat yang tinggal disekitar hutan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaganya, seperti tidak boleh menebang kayu seenaknya, melakukan pertanian dalam hutan yang merusak kelestarian tanaman hutan, mengambil rumput pada lahan kemiringan tinggi dan sebagainya. Kewajiban menjaga dan memelihara hutan lebih besar tanggung jawabnya bagi mereka yang diberi kesempatan untuk mengolah lahan pertanian dalam kawasan hutan. Selain hasil usaha pertanian dirasakan petani dan keluarganya, mereka berkewajiban merawat tanaman hutan, seperti jati, mahoni, akasia agar tumbuh baik.

Tabel IV.6
ALASAN RESPONDEN TERHADAP PERATURAN YANG MEWAJIBKAN
MASYARAKAT MENJAGA KELESTARIAN HUTAN,
DI DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Alasan responden	Jumlah	Persentase
1.	Dapat meningkatkan kesuburan tanah nah disekitar hutan, mencegah terjadi erosi, menyimpan air, dan menguntungkan masyarakat dekat hutan	16	26,67
2.	Terpeliharanya hutan tidak hanya untuk kepentingan saat ini, namun juga untuk generasi mendatang.	13	21,67
3.	Kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama, karena bukan untuk kepentingan perorangan melainkan masyarakat bersama.	23	38,33
4.	Adanya peraturan yang mewajibkan masyarakat, membuat kelestarian hutan lebih terjamin dan terhindar dari pengrusakan.	8	13,33
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Disebabkan keadaan latar belakang responden yang tidak sama dan kepentingan terhadap keberadaan hutan di Desa Hargorejo, maka masing-masing petani memiliki alasan yang berbeda-beda mengenai peraturan yang mewajibkan setiap anggota masyarakat berkaitan dengan usaha melestarikan hutan. Pada tabel IV.6. nampak bahwa sebagian besar responden mengemukakan alasan melestarikan hutan merupakan tanggung jawab bersama, karena hutan tidak untuk kepentingan perorangan melainkan masyarakat bersama yang proporsinya sebesar 38,33%. Tingginya proporsi alasan tersebut berhubungan dengan anggapan bila terjadi sumberdaya hutan tidak terjaga kelestariannya akan membawa akibat kerugian yang menimpa orang banyak. Selain itu, juga dapat disebabkan karena lingkungan hutan yang rusak secara ekologis akan mengurangi daya dukung hutan terhadap kehidupan manusia yang bertempat tinggal disekitarnya (Ismail, 1990:118). Melihat kenyataan seperti itu, dapat dipahami bahwa kelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama setiap anggota masyarakat atau terpeliharanya ekosistem hutan yang selalu terjaga baik menjadi tanggung jawab semua pihak, sehingga menuntut adanya partisipasi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hutan terhadap kehidupan manusia.

Proporsi alasan terbesar kedua, sebesar 26,67% beralasan bahwa menjaga kelestarian hutan menjadi kewajiban anggota masyarakat, karena dapat meningkatkan kesuburan lahan disekitar hutan mencegah terjadinya erosi dan menyimpan air, yang semuanya sangat menguntungkan masyarakat disekitar hutan. Dengan demikian alasan ini mengacu pada kepentingan ekologis yang dikaitkan dengan tingkat kebutuhan manusia seperti air dan tanah untuk aktivitas hidup (Soerianegara, 1977:86). Di samping itu, ekosistem hutan selalu terjaga kelestariannya dapat mewujudkan proses keseimbangan yang dapat mengatur keseimbangan secara alamiah penyimpanan unsur hara tanah, yang hakekatnya akan menyuburkan tanah sehingga akan meningkatkan produktivitas lahan bersangkutan (Resosoedarmo, 1994: 15).

Responden yang menyatakan alasan bahwa terpeliharanya hutan tidak untuk kepentingan saat ini, namun juga untuk generasi mendatang, proporsinya 21,67%. Relatif tinggi responden yang beralasan tersebut di daerah penelitian, dapat dipahami karena pada umumnya responden berusia relatif muda, sehingga sudah mulai memikirkan kepentingan generasi akan datang. Sedangkan proporsi terendah sebesar 13,33%, mengemukakan alasan bahwa adanya peraturan yang mewajibkan semua anggota masyarakat akan memberikan hasil yang maksimal lebih terjamin dan terhindar dari pengrusakan.

Pada tabel IV.7. menunjukkan bahwa sebagian besar petani tentang tanggung jawab pelestarian hutan, mengemukakan alasan yaitu masyarakat disekitar hutan harus diikutsertakan dalam upaya melestarikan hutan proporsinya sebesar 36,67%. Kemudian disusul dengan alasan pelestarian hutan menjadi tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah sebab manfaatnya dirasakan bersama-sama, sebesar 28,33%, 18,33% beralasan bahwa masyarakat disekitar hutan harus diikutsertakan, bila tidak hutan menjadi rusak atau tidak aman, dan sisanya sebesar 13,33% mengemukakan yang paling utama menjaga adalah perhutani, dan masyarakat disekitar hutan bersifat membantu tugas perhutani,. Selain itu sisa dari keseluruhan responden, sebanyak 2 responden menyatakan setuju, bila beralasan kalau bukan pemerintah yang menjaga kelestarian hutan, penduduk akan seenaknya merusak hutan untuk kepentingan sendiri.

Dari 58 responden yang menyatakan tidak setuju, bahwa kelestarian hutan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, secara umum mengemukakan pelestarian hutan dilakukan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya masyarakat desa masih menjunjung tinggi sifat gotong royong dalam menanggulangi semua permasalahan. Disamping itu masyarakat disekitar kawasan hutan, mempunyai pandangan bahwa hasil hutan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat saja, melainkan dapat menambah devisa negara, sehingga dalam rangka menjaga, melestarikan harus dilakukan bersama-sama. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai sikap setuju bahwa pelestarian hutan menjadi tanggung jawab pemerintah, berangkat dari keadaan sehari-hari masyarakat disekitar hutan cenderung ingin mengambil kayu sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek kelestarian. Dengan demikian untuk menanggulangi tindakan masyarakat disekitar hutan yang sangat merugikan tersebut, dalam hal ini pemerintah memiliki kekuatan untuk melarang dan menindak pelanggaran hutan.

Secara terperinci dari 58 responden yang menunjukkan sikap tidak setuju bila kelestarian hutan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, sebagian besar mengemukakan alasan bahwa masyarakat disekitar kawasan hutan harus diikutsertakan dalam usaha melestarikan hutan, sebesar 36,67%. Tingginya proporsi responden yang mengemukakan alasan tersebut, dapat disebabkan karena masyarakat di desa penelitian dalam relatif lama oleh pihak perhutani sudah diikutsertakan menggarap sebagian luas kawasan dalam hutan untuk kegiatan pertanian. Dari kegiatan ini, khususnya petani yang hanya memiliki lahan pertanian yang sempit. Dari responden yang mengatakan alasan ini, dapat diduga disebabkan karena orang disekitar hutan memiliki kecenderungan merusak hutan,

misalnya menebang kayu dalam kawasan hutan yang melampaui batas. Agar lingkungan hutan tidak rusak berat, maka sangat diperlukan tindakan untuk mengantisipasi perbuatan sewenang-wenang anggota masyarakat, terutama mereka yang tinggal disekitar hutan. Hal ini dapat terjadi karena responden beranggapan bahwa hutan banyak memberikan berbagai jenis hasil yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk dalam hal ini petani disekitar hutan serta keluarganya (Mubyarto, 1992:76).

Sikap penduduk atau responden disekitar kawasan hutan di desa hargorejo, sebanyak 58 responden petani menyatakan bahwa pelestarian sumberdaya hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petani, melainkan bersamaan itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat, khususnya yang tinggal disekitar hutan. dengan demikian responden telah memahami bahwa kelestarian sumberdaya hutan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerinth. Pernyataan responden seperti ini selaras dengan pendapat Koetjaraningrat, bahwa salah satu ciri masyarakat desa, adalah besamya jiwa gotong royong dalam mennggulangi maslah yang sedang dihadapi, dalam hal ini menyangkut kelestarian hutan di daerah penelitian.

Tabel IV.7
ALASAN RESPONDEN TENTANG PELESTARIAN HUTAN MENJADI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Alasan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Masyarakat di sekitar hutan harus diikutsertakan dalam upaya melestarikan hutan.	22	36,67
2.	Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah sebab manfaatnyadirasakan bersama-sama.	17	28,33
3.	Masyarakat disekitar hutan harus diikutsertakan dalam upaya menjaga hutan bila tidak hutan menjadi tidak aman atau rusak.	11	18,34
4.	Yang utama menjaga hutan adalah perhutani dan masyarakat disekitar hutan bersifat membantu tugas perhutani.	8	13,33
5.	Setuju, klau bukan pemerintah yang menjaga pelestarian hutan, penduduk seenaknya merusak hutan untuk kepentingannya sendiri.	2	3,33
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Responden yang mempunyai lahan pertanian sempit atau kurang dari 0,25 hektar, memiliki peluang untuk menambah penghasilan yang dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian hutan produksi di daerah penelitian dapat menunjang kehidupan masyarakat disekitar hutan yang umumnya bermatapencaharian sebagai petani lahan kering.

Alasan responden yang menyatakan bahwa pelestarian hutan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah karena manfaatnya dirasakan bersama-sama, sebesar 28,33%. Hal ini dapat terjadi karena responden memiliki

pemikiran untuk mewujudkan ekosistem hutan yang selalu terjaga kelestariannya akan banyak memberi manfaat kepada masyarakat disekitar kawasan hutan, seperti melakukan usaha tani dalam kawasan hutan, kayu bakar dan rumput untuk makanan ternak. Sedangkan bagi pemerintah keuntungan yang didapatkan dapat berupa terpeliharanya tanaman hutan, seperti jati, mahoni, akasia dan sebagainya. Selain itu masyarakat dikawasan hutan juga akan memperoleh keadaan tanah yang stabil dan tidak tererosi, persediaan air pada musim kering, sebaliknya pada musim penghujan tidak akan terjadi banjir. Melihat sangat besarnya bahaya kerusakan hutan yang dirasakan masyarakat disekitarnya tersebut, maka sangat diperlukan pengelolaan sumberdaya hutan agar tetap lestari, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sebanyak 11 responden (18,33%) beralasan masyarakat disekitar hutan harus diikutsertakan dalam menjaga hutan biar aman dan tidak rusak. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian besar penduduk disekitar hutan mempunyai matapencaharian sebagai petani dan keperluan energi didapat dari kayu. Dengan demikian lahan untuk kegiatan pertanian sangat dibutuhkan, namun disebabkan pemilikan lahan sempit, akibatnya mendorong untuk membuka lahan dalam hutan, sehingga kalau tidak terkendali akan merusak kelestarian hutan. Disamping itu keperluan kayu bakar dapat diambil dari hutan, dimana pengambilan kayu bakar yang semena-mena tanpa memperhatikan kelestarian akan menyebabkan tanah menjadi kritis, menurunkan kesuburan dan erosi. Melihat kenyataan tersebut, maka dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan, pihak perhutani harus mengikut sertakan penduduk disekitar kawasan hutan. Sisanya sebanyak 8 responden atau 13,33 persen mengemukakan alasan bahwa yang utama menjaga hutan adalah perhutani dan masyarakat disekitar hutan dilarang tidak boleh merusak hutan, namun pengrusakan oleh oknum terjaditertentu berlangsung terus, akibatnya kelestarian tidak dapat terjaga baik. Menurut mereka yang mengemukakan alasan tersebut, yang utama menjaga kelestarian hutan adalah pemerintah/Perhutani, pemerintah, sedangkan masyarakat hanya bersifat membantu pelaksanaan pemerintah.

4. Sikap Masyarakat Terhadap Teras Cara Terasering

Seperti kawasan hutan yang terdapat pada kawasan hutan di Desa Hargorejo sebagian besar terdapat pada kawasan hutan terletak terletak pada lahan miring yang peka dan rawan terhadap ancaman erosi tanah, seperti daerah Gunung Jeruk, Gunung Roto, dan sekitarnya milik penduduk. Salah satu wujud usaha penduduk dan perhutani menanggulangi erosi tanah dan peningkatan

permanen air limpasan dikawasan hutan, dibuatkan sistem pertanian dengan cara terassering (sengkedam) pada lahan miring. Cara seperti ini diyakini oleh masyarakat bahwa sampai kapanpun merupakan mekanisme yang aktif untuk mengendalikan erosi tanah.

Berdasarkan pendapat Sumarwoto (1978) tindakan penduduk dikawasan hutan merubah lereng menjadi petakan-petakan kecil yang memutar searah tubuh lereng merupakan suatu usaha untuk meningkatkan mutu lingkungan yang tidak produktif menjadi produktif. Ini semua dapat tercermin dari petakan pada musim penghujan banyak diusahakan untuk kegiatan pertanian bahan pangan. Pembuatan terassering pada lahan hutan belerang oleh penduduk disekitar hutan sekaligus dapat berfungsi memperbaiki cara-cara penyiapan lahan untuk tanaman hutan, yang dilakukan dengan cara tumpangsari.

Penduduk atau petani di daerah penelitian telah lama mengenal pembuatan terasering, yaitu teras atas, teras tengah dan teras bawah. Pada lahan pertanian dalam kawasan hutan, terassering pada musim penghujan oleh petani ditanami tanaman pangan dan tanaman kayu-kayuan seperti jati, mahoni, dan akasia. Sedangkan untuk lahan milik petani yang dihutankan, jenis tanaman yang diusahakan petani lebih bervariasi dibandingkan dengan lahan dalam kawasan hutan, berupa tanaman keras terdiri dari sengon, akasia dan orak arik, untuk bawah tanaman tegak terdiri dari tanaman pangan jagung, kacang, ketela, koro, empon-empon, rumput gajah dan sebagainya. Dengan demikian penanaman berbagai jenis tanaman, baik kayu-kayuan maupun tanaman pangan di dalam lahan hutan dan wanatani dilakukan secara tumpangsari, sehingga permukaan tanah secara langsung terlindung dari sinar matahari, kelembaban terjaga oleh daun-daunan yang gugur secara efektif, sehingga permukaan tanah khususnya pada musim penghujan tidak terjadi erosi.

Sebanyak 60 responden yang disurvei, semuanya menyatakan sikap setuju dengan cara penggarapan lahan dengan sistem terassering. Oleh petani hal ini diyakini sebagai salah satu cara memanfaatkan lahan yang berlereng dan meningkatkan produktivitas lahan, sehingga relatif akan meningkatkan produktivitas lahan, sehingga relatif akan meningkatkan hasil usaha tani lahan kering. Pada tabel IV.8. nampak sebagian besar petani yang menyatakan penggarapan lahan hutan dengan sistem teras sangat penting mengemukakan alasan, penggarapan lahan dengan cara teras dapat mengurangi laju air pada musim penghujan dan menahan pupuk yang diperlukan tanaman, proporsinya sebesar 40%. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar penduduk dikawasan hutan melakukan kegiatan usaha tani dalam hutan yang miring. Selain itu,

penduduk menyadari hanya dengan sistem teras. lahan miring dalam hutan dapat dijadikan lahan pertanian. Dengan kata lain pengolahan lahan cara teras, dapat menanggulangi bahaya erosi dan meningkatkan kesuburan tanah, yang sangat diperlukan oleh tanaman pangan.

Tabel IV.8
ALASAN RESPONDEN TENTANG PENGGARAPAN LAHAN
PERTANIAN DENGAN CARA TERASSERING
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No.	Alasan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Penggarapan lahan dengan cara teras dapat menanggulangi laju air dan menahan pupuk yang diperlukan tanaman.	24	40,00
2.	Dengan cara teras penguapan pupuk relatif rendah, sebab dapat tersimpan baik dalam tanah.	15	25,00
3.	Dengan cara teras kesuburan lahan dapat terjaga dengan baik, sehingga tanaman dapat tumbuh baik.	12	20,00
4.	Teras merupakan salah satu mengolah lahan miring yang mudah longsor.	9	15,00
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Proporsi terbesar lainnya sebesar 25%, responden mengemukakan alasan hanya dengan cara teras penggunaan pupuk relatif rendah sebab dapat tersimpan baik dalam tanah. Sesungguhnya alasan seperti ini dapat dipahami, karena sebagian penduduk mendapat kesempatan menggarap lahan dalam hutan untuk usaha pertanian. Salah satu keberhasilan menggarap lahan dalam hutan, adalah pemenuhan kebutuhan akan pupuk, umumnya berupa pupuk kandang. Petani dalam penggunaan pupuk dalam lahan hutan, secara umum dilakukan sekali dalam dua musim tanam, sehingga andaikata pupuk hilang karena hanyut dibawa air, maka keperluan pupuk musim berikutnya jauh lebih banyak. Melihat kenyataan

ini, petani berusaha menanggulangi hilangnya pupuk dengan cara pertanian sistem terasering.

Disamping itu, terdapat sebanyak 9 responden (15%) mengemukakan alasan bahwa cara teras merupakan salah satu cara mengelola lahan kering yang mudah longsor. Hal ini sangat disadari oleh penduduk, sebab jenis tanah di Desa Hargorejo memiliki sifat yang peka terhadap erosi, baik jenis latosol, grumosol dan aluvial. Jenis tanah ini umumnya terdapat pada lereng yang cukup terjal dan pada punggung gunung/hutan, akibatnya pada musim penghujan relatif mudah terangkut aliran air. dengan demikian penduduk dikawasan hutan atas kondisi seperti itu telah berpengalaman lama, sehingga disadari satu-satunya cara menyelamatkan tanah di tempat yang miring dibuatlah terasering, yang bersamaan itu dapat berfungsi menyimpan air dan baik untuk kegiatan pertanian lahan kering.

Besarnya manfaat pengolahan lahan dalam hutan dan wanatani dengan cara terasering ini mampu mengendalikan tanah dari erosi dan meningkatkan kesuburan. Hal ini dicerminkan petani dapat meningkatkan produksi lahan kritis, menjadi lahan yang dapat ditanami berbagai jenis tanaman pangan, yang pada gilirannya petani dan keluarganya dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain juga ikut berpartisipasi terhadap pelestarian hutan produksi di Desa Hargorejo.

5. Sikap Masyarakat Terhadap UULH

Menurut UU No.4 Tahun 1982, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Berhubungan dengan pengertian lingkungan hidup/hutan seperti itu, maka lingkungan secara keseluruhan dapat merupakan *wadah* aktivitas manusia, baik menyangkut hubungannya dengan makhluk lain maupun kegiatan lainnya yang berguna untuk manusia. Dengan demikian untuk membentuk hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hutan yang berlangsung harmonis dan terus-menerus sangat diperlukan keadaan hutan yang lestari. Untuk mewujudkan lingkungan hutan yang lestari dibutuhkan adanya pengelolaan dan pemeliharaan yang berlangsung secara kontinyu.

Dalam usaha melestarikan lingkungan hutan tidak hanya menyangkut pemeliharaan, melainkan juga mencakup mengatasi semua masalah yang ada supaya tidak merugikan kehidupan masyarakat (Sumintarsih, dkk. 1991:54).

Usaha untuk mencapai keadaan tersebut, khususnya di daerah penelitian, masyarakat disekitar hutn penting dikenalkan adanya aturan, yaitu UU No.4/82 tentang lingkungan hidup. Mengingat pentingnya fungsi hutan dan manfaatnya, pemasyarakatan UULH di desa Hargorejo, pemerintah setempat dan perhutani telah berusaha menempuh melalui pertemuan formal dan non formal. Pemasyarakatan secara formal melalui pertemuan di desa atau dusun, sedangkan non formal melalui pengajian, pertemuan RT dan sebagainya. Dengan demikian keberhasilan pemasyarakatan UULH akan berpengaruh positif terhadap sikap penduduk tentang pentingnya lingkungan hutan yang lestari dan banyak memberikan manfaat kepada penduduk di sekitar hutan.

Tabel IV. 9
ALASAN RESPONDEN TERHADAP PENERAPAN UULH DALAM
MEMANFAATKAN SUMBERDAYA HUTAN DIPERKETAT
DI DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Untuk menjamin hutan tetap lestari dan produktif pada saat ini dan generasi mendatang.	22	36,67
2.	Sumberdaya yang banyak dalam hutan perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya akan bermanfaat bagi masyarakat disekitar hutan dan negara.	10	16,67
3.	Agar hutan tidak cepat mengalami kerusakan yang akan membahayakan kehidupan masyarakat disekitar kawasan hutan.	17	28,33
4.	Hutan negara di daerah ini relatif rusak sehingga kalau dibiarkan akan membawa bencana yang merugikan masyarakat.	8	13,33
5.	Merugikan bagi anggota masyarakat yang biasa mengambil kayu bakar, rumput karena akan hilang pekerjaannya.	3	5,00
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Secara keseluruhan responden di daerah penelitian, sebagian besar mempunyai sikap setuju bila UULH diterapkan secara ketat untuk menjaga lingkungan hutan sebesar 95%, dan sisanya sebesar 5% menyatakan tidak setuju. Pada tabel IV.9. nampaknya bahwa sebagian besar responden yang setuju mengemukakan alasan untuk menjamin hutan tetap lestari dan produktif pada saat ini maupun untuk generasi mendatang, yang proporsinya sebesar 36,67%. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat disekitar hutan memandang hutan yang lestari dan produktif tidak saja berguna untuk saat ini melainkan akan lebih terjamin untuk kepentingan generasi mendatang, sehingga perlu diterapkan UULH lebih ketat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan bagi penduduk disekitar hutan. Sedangkan proporsi terendah responden mengemukakan alasan hutan negara/produksi daerah ini relatif rusak sehingga kalau dibiarkan akan membawa bencana yang merugikan masyarakat, sebesar 13,33%. Responden yang berpendapat seperti ini, dapat disebabkan keadaan hutan Desa Hargorejo sudah relatif rusak, sehingga apabila pengambilan sumberdaya hutan /kayu dilakukan terus menerus akan berakibat merugikan penduduk disekitarnya. Keadaan seperti itu sebagian penduduk berpendapat pelaksanaan UULH perlu diperketat, dengan harapan lingkungan hutan segera pulih kembali baik.

Sebaliknya bagi responden yang mempunyai sikap tidak setuju pelaksanaan UULH diperkirakan, semuanya mengemukakan alasan akan merugikan bagi anggota masyarakat yang biasa mencari kayu bakar, rumput karena akan hilang pekerjaannya. Hal ini dipandang pengetahuan UULH dalam pemanfaatan sumberdaya hutan akan merugikan, dengan kata lain kelompok ini tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hutan. Dalam rangka untuk meningkatkan fungsi hutan, maka kelompok ini diperlukan pembinaan khusus mendukung usaha pelestarian hutan, yang kian hari menunjukkan semakin kritis.

Dengan demikian dilihat dari sikap serta alasan responden tentang pelaksanaan UULH di daerah penelitian sangat mendukung supaya sumberdaya hutan selalu tetap terjaga kelestariannya. Hal ini disebabkan hutan yang terjaga kelestariannya akan memberikan manfaat yang banyak bagi penduduk yang bermukim disekitar hutan. Disamping manfaat yang berupa penyediaan air untuk kepentingan tanaman pangan dan air minum, juga memberikan keuntungan yang berupa peluang kesempatan kerja pendudukan dalam kawasan hutan.

C. NILAI BUDAYA PELESTARIAN HUTAN

Dalam masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan produksi, secara turun temurun memiliki konsep atau pedoman tentang pelestarian

hutan dari kerusakan yang dilakukan penduduk. Hal ini tidak dapat lepas dari kedudukan masyarakat Jawa yang secara turun temurun atau sejak dini telah diajarkan bahwa dalam kehidupannya bukan untuk menguasai alam. Namun manusia Jawa selalu berupaya untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan alam yang serba gaib dan memusatkan kepada tindakan untuk menjaga keselarasan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis dengan alam. Dengan demikian tindakan-tindakan masyarakat yang bertentangan dengan pedoman-pedoman yang berlaku dalam masyarakat disekitar kawasan hutan atau melanggar dan menempatkan diri yang tidak sewajarnya akan menyebabkan keguncangan kosmos.

Usaha-usaha masyarakat di kawasan hutan produksi dan hutan lindung terbatas, dalam menjaga keselarasan antara manusia dengan hutan dapat dengan mengadakan selamatan, doa, dan ziarah ketempat yang dianggap keramat. Kesemuanya ini dilakukan sebagian masyarakat di sekitar hutan, berawal atau bertitik tolak kepada sistem kepercayaan Jawa, sehingga keselarasan atau kesesuaian kosmos akan terjaga dan pulih kembali. Dengan demikian dalam diri manusia Jawa, termasuk masyarakat di Desa Hargorejo memandang lingkungan hutan sebagai sumber daya alam dapat memberikan kesejahteraan, yang sangat tergantung kepada keberhasilan menyesuaikan diri terhadap kekuatan gaib yang terdapat di sekitar kawasan hutan milik pemerintah/perhutani.

Masyarakat di kawasan hutan dalam melestarikan sumber daya hutan dapat juga berpedoman pada sumber agama, baik agama Islam maupun Kristen Katolik yang banyak dianut masyarakat di sekitar hutan di Desa Hargorejo. Hal ini disebabkan agama berdasarkan kitab sucinya mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga keseimbangan dengan alam., termasuk lingkungan hutan. Dengan demikian agama dapat memberikan landasan moral, yang dapat berfungsi sebagai etika untuk menjaga lingkungan (Soerjani, 1987), sehingga merupakan petunjuk praktis anggota masyarakat dalam menciptakan terwujudnya lingkungan yang baik. Bersumber dari etika lingkungan, masyarakat memahami hak dan kewajiban terhadap hutan, dapat berfungsi untuk mengatasi perilaku dan usaha untuk mengendalikan berbagai kegiatan manusia supaya tetap dalam kondisi mementingkan lingkungan hutan selalu terjaga kelestariannya, yang sangat penting perannya pada masyarakat di kawasan hutan baik untuk kepentingan sekarang maupun masa yang akan datang.

1. Agama Dalam Kelestarian Hutan

Agama yang diyakini sebagai ajaran yang datang dari Tuhan akan

mengikat kepada pemeluknya untuk bertindak sesuatu, baik dalam bentuk ibadah, mahdhoh maupun lainnya. Hal ini tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya namun mencakup hubungan manusia dengan semua makhluk yang diciptakan Tuhan, termasuk lingkungan hidup khususnya hutan. Dengan demikian ajaran agama mempunyai kekuatan mengatur seseorang dan harta negara (Saragih dan Sitorus, 1982 : 102). Berkaitan dengan sumber daya hutan yang merupakan salah satu wujud ciptaan Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan hidup manusia.

Dalam usahanya mencapai kebahagiaan dan kesenangan manusia sangat wajar selalu berusaha mengakrabkan diri dengan lingkungan, baik berupa tanah, hutan, air, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Khususnya menyangkut sumber daya hutan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar, bahan pangan dan rumput-rumputan. Disamping itu, lingkungan hutan dapat berfungsi menyimpan air dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti mandi, minum dan irigasi bagi daerah dibawahnya. Dengan demikian sumber daya hutan secara umum berpotensi besar membuka peluang baru dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan produksi. Dengan keyakinan seperti itu, penduduk utamanya petani di kawasan hutan selalu berusaha menjaga dan melestarikan hutan untuk kepentingannya dan generasi mendatang.

Penduduk di daerah penelitian, sebanyak 60 responden seluruhnya mengatakan keyakinannya, bahwa memelihara lingkungan hutan merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan, sebagai pencipta semua makhluk yang ada di alam semesta. Keyakinan responden seperti itu berangkat dari pemahaman bahwa manusia dalam hidup sehari-hari tidak dapat lepas dari lingkungan secara umum, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sehingga manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Selain itu antara manusia dengan lingkungan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi (Bintarto, 1983, Saragih dan Sitorus, 1983). Hal ini nampaknya disadari oleh penduduk disekitar kawasan hutan Desa Hargorejo, percaya bahwa hutan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Bertitik tolak keyakinan tersebut, masyarakat di sekitar kawasan hutan sadar bahwa memelihara hutan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari tabel IV.10 nampak bahwa sebagian besar responden yang memiliki sikap memelihara hutan merupakan ibadah, beralasan perbuatan memelihara lingkungan hutan sebagai bentuk amalan yang baik dan disebangi oleh Tuhan, sebesar 46,67persen . Kemudian sebesar 35persen responden mengemukakan

alasan, sebagai makhluk hidup yang berakal manusia wajib memelihara keseimbangan alam sekitar, 11,66 persen beralasan agar hubungan manusia dengan hutan tetap serasi, dan sisanya sebesar 6,67 persen mengemukakan alasan sebagai wujud rasa hormat manusia terhadap makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Tingginya proporsi alasan responden yang mengemukakan alasan bahwa memelihara hutan adalah amalan yang baik, disebabkan penduduk Desa Hargorejo dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bentuk ibadah kepada Tuhan maupun ibadah kepada sesama makhluk hidup. Hal ini dapat terjadi karena agama syarat memuat aturan tentang tingkah laku manusia apa yang dilarang dan harus dilakukan setiap pemeluknya. Disamping itu, agama banyak menjanjikan bagi mereka yang berbuat amal baik akan mendapat pahala di dunia dan akhirat. Sebagai salah satu bentuk ibadah ajaran agama yang menganjurkan manusia untuk berbuat baik, di daerah penelitian dicerminkan dengan perbuatan selalu memelihara dan menjaga hutan tetap dalam keadaan baik.

Proporsi alasan responden terdahul sebesar (6,66 persen) mengemukakan bahwa memelihara lingkungan hutan sebagai rasa hormat manusia kepada makhluk. Hal ini dapat terjadi pada responden di daerah penelitian karena pemahaman penduduk tentang manusia dan makhluk lainnya memiliki derajat atau kedudukan yang sama dimata Tuhan. Namun demikian kedudukan manusia lebih tinggi memiliki kewajiban untuk mengolah dan memelihara hutan untuk kebahagiaan hidupnya secara hormat dan rukun. Sikap ini sesuai dengan keterangan Mulder (1983) yang mengemukakan konsep hidup orang Jawa, rukun dan hormat dimaksudkan sebagai keadaan yang tentram, damai dan bersahabat satu sama lain, dimana salah satu manifestasinya hormat dan rukun pada lingkungan hutan.

Dengan demikian dari berbagai alasan yang dikemukakan responden di daerah penelitian secara umum agama yang didalamnya penuh aturan-aturan, baik berupa larangan maupun petunjuk yang harus dilaksanakan pemeluknya dapat merupakan pedoman untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan. Dalam ajaran agama Islam dapat dilihat dari isi surat Al-Ar'at : 56, Tuhan berfirman yang artinya *janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah baik keadaan*. Sedangkan agama Kristen, Alkitab dalam kejadian, Tuhan berfirman *manusia diciptakan supaya mereka berkuasa seluruh bumi*. Dari kutipan Al qur'an dan Al kitab tersebut menjelaskan bahwa manusia dengan makhluk yang lain dialam semesta tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan serta melengkapi. Namun disebabkan manusia sebagai satu-satunya makhluk berakal dan sebagai penguasa dimuka bumi, manusia wajib menjaga dan memelihara keseimbangan alam. Tindakan manusia menjaga

keseimbangan alam sekitar, termasuk hutan ditujukan untuk melindungi dan mengawetkan alam, yang pada hakekatnya untuk kesejahteraan manusia sendiri. Sebaliknya pengrusakan-pengrusakan keberadaan sumber daya alam oleh tangan manusia, akan berakibat fatal dan membahayakan kehidupannya.

Tabel IV. 10
ALASAN RESPONDEN MEMELIHARA LINGKUNGAN HUTAN
SEBAGAI IBADAH DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No	Alasan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Memelihara lingkungan hutan merupakan amalan yang baik yang disenangi Tuhan	28	46,67
2.	Sebagai makhluk yang berakal manusia wajib memelihara keseimbangan alam sekitar	21	35,00
3.	Agar hubungan manusia dengan alam/hutan tetap serasi	7	11,67
4.	Sebagai wujud rasa hormat dan rukun manusia terhadap ciptaan Tuhan lain	4	6,66
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Pada tabel IV.10 dari 60 responden yang tinggal disekitar hutan menyatakan bahwa lingkungan adalah kewajiban yang harus dipenuhi seseorang. Hal ini dapat terjadi karena manusia dalam hidupnya lingkungan semakin menurun daya dukungnya terhadap kehidupan manusia, dalam kedudukannya manusia dapat beberapa tindakan sebagai subyek lingkungan dalam pengertian yang positif, yaitu memelihara, menjaga dan mengembangkan lingkungan hutan, terutama untuk keseimbangan hidup manusia. Dengan demikian penduduk / manusia terhadap keberadaan hutan di Desa Hargorejo menyadari memiliki tanggung jawab penting sebagai salah satu unsur ekosistem yang menentukan kelestarian hutan, (Saragih dan Sitorus, 1993 : 71)

Dari tabel IV. 11, juga menunjukkan sebagian besar responden (45%) mengemukakan alasan bahwa menjaga dan memelihara hutan menjadi lebih

baik merupakan bagian dari iman. Kemudian alasan lingkungan hutan termasuk makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib memeliharanya sebesar 35% dan sisanya sebesar 20% beralasan lingkungan hutan yang terpelihara baik akan banyak manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Dari semua alasan yang diajukan petani, pada intinya menyatakan bahwa manusia berkewajiban menjaga dan memelihara lingkungan hutan. Hal ini dapat dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari petani di sekitar hutan memiliki kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Dengan demikian petani atau responden menyadari secara langsung maupun tidak langsung memiliki kewajiban bersama-sama instansi lain untuk selalu berbuat menjaga dan melestarikan hutan, yang banyak sumber daya untuk kepentingannya.

Tabel IV. 11
ALASAN RESPONDEN YANG MENYATAKAN SETIAP ORANG
WAJIB MENJAGA LINGKUNGAN HUTAN DI DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No	Alasan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Menjaga dan memelihara lingkungan hutan menjadi baik merupakan bagian dari iman	27	45,00
2.	Hutan termasuk makhluk Tuhan dan manusia wajib memeliharanya	21	35,00
3.	Lingkungan hutan yang terpelihara baik dan banyak manfaatnya bagi manusia	12	20.00
J u m l a h		60	100.00

Sumber : Data primer, 1996.

2. Tindakan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan

Tindakan anggota masyarakat terhadap keberadaan suatu obyek dalam hal ini hutan berkaitan erat dengan persepsinya. Anggota masyarakat yang memiliki persepsi positif tentang lingkungan hutan selalu akan memperhatikan suatu tindakan yang positif pula. Sebaliknya seseorang yang memiliki persepsi negatif cenderung akan bertindak destruktif atau merugikan kelestarian hutan. Misalnya

untuk orang yang berbuat tindakan positif berkaitan keberadaan hutan, selalu menunjukkan pemikiran dan perbuatan yang baik, seperti menjaga dan melakukan upaya-upaya melestarikan hutan, sedangkan bagi seseorang yang memiliki sikap negatif, ada kecenderungan berbuat untuk mengeksploitasi sumberdaya hutan tanpa memikirkan aspek kelestariannya. Dengan demikian tindakan seseorang anggota masyarakat secara tidak langsung ditentukan oleh persepsi yang berbeda akibatnya akan menimbulkan tindakan yang tidak sama.

Hutan produksi di daerah penelitian pada umumnya terdapat pada daerah yang berbukit-bukit dan memiliki keadaan lereng yang cukup besar, maka untuk mengatasi hambatan seperti itu, penduduk mengerjakan lahan dalam hutan maupun lahan milik dilakukan dengan sistem terasering. Hal ini banyak diusahakan petani di sekitar hutan untuk mengurangi atau menimbulkan terjadinya erosi atau tanah longsor dan bertambah luasnya lahan kritis. Diharapkan dengan sistem pertanian menggunakan cara terasering dapat meningkatkan kesuburan lahan dan memperkuat agregat tanah sehingga tanah tidak longsor atau relatif stabil. Selain itu, usaha pertanian pada lahan yang berteras ditanami jenis tanaman pangan dan pada bagian pematang (bagian tepi luar teras) ditanami tanaman keras sedangkan untuk lahan milik penduduk yang dihutankan, bagian pematang ditanami berbagai jenis rumput, seperti rumput gajah, kolonjono dan sebagainya.

Selain pembuatan teras untuk usaha pertanian, penduduk di daerah penelitian bersama perhutani melaksanakan program reboisasi dan penghijauan lahan hutan yang kritis atau gundul untuk meningkatkan kesuburan lahan dan mengurangi terjadinya banjir. Tindakan positif lain untuk menjaga hutan tidak rusak masyarakat tidak boleh mengambil kayu yang berukuran besar dalam hutan, sedangkan untuk hutan wanatani penduduk dianjurkan bila menebang pohon satu, untuk menanam kembali pohon dilahan miliknya. Dengan demikian secara umum penduduk disekitar kawasan hutan di Desa Hargorejo, terdapat berbagai cara atau usaha untuk menjaga dan melestarikan hutan.

Dari tabel IV. 12 menunjukkan bahwa tindakan terbaik untuk menjaga lingkungan hutan, proporsi tertinggi sebesar 35% respon dan mengemukakan penanaman kembali lahan hutan yang kritis/gundul dengan cara terasering dan dilaksanakan penanaman secara selang-seling, agar tanaman hutan dapat tumbuh baik. Nampaknya ini banyak dikemukakan responden, karena sebagian besar kawasan hutan terdapat pada daerah yang miring, maka timbul pemahaman sebagian masyarakat salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan hutan, adalah dengan cara penghijauan dan terasering. Selain itu lahan hutan yang relatif gundul keadaan sangat mudah terjadi tanah longsor yang merugikan penduduk di sekitar hutan. Sedangkan proporsi terendah pada responden yang

mengemukakan alasan masyarakat di sekitar hutan perlu diberi penyuluhan untuk tidak menebang pohon besar dalam kawasan hutan. Untuk mengurangi terjadinya kerusakan tanaman hutan yang disebabkan pengambilan kayu oleh sebagian penduduk, perlu diingatkan dengan penyuluhan tentang pentingnya hutan dalam kehidupan penduduk yang tinggal disekitarnya.

Salah satu ciri kehidupan masyarakat pedesaan, adalah hubungan warga satu dengan lainnya sangat erat dan saling bekerja sama. Koentjaraningrat (1977:166) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pedesaan terdapat berbagai aktivitas-aktivitas bekerja sama, yang lebih populer biasanya disebut gotong royong. Kegiatan gotong royong dilakukan bersama-sama warga masyarakat untuk menyelesaikan suatu program tertentu yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa aktivitas gotong royong dapat dibedakan antara kerjasama untuk program yang ada dari swadaya masyarakat, dan kerjasama untuk program dari atas. Kesemuanya ini di daerah penelitian oleh masyarakat dilakukan, khususnya dalam menangani masalah yang berhubungan dengan pelestarian hutan.

Tabel IV. 12
TINDAKAN TERBAIK MENURUT RESPONDEN DALAM
MENJAGA LINGKUNGAN HUTAN DI DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No	Tindakan yang perlu dilakukan	Jumlah	Persentase
1.	Penanaman kembali pada hutan yang gundul dengan cara teras dan dilakukan secara selang-seling supaya tanaman dapat tumbuh baik	21	35,00
2.	Dalam penghijauan hutan harus mengikut sertakan masyarakat di sekitar hutan dan penerangan tentang fungsi hutan, sehingga sadar untuk tidak merusak hutan	18	30,00
3.	Sebaiknya bila masyarakat menebang kayu, baik dalam hutan maupun hutan yang segera diikuti untuk menanam kembali	14	23,33
4.	Masyarakat di sekitar hutan diberi penyuluhan untuk tidak menebang pohon besar sembarangan di dalam hutan	7	11,67
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Keseluruhan responden yang disurvei di Desa Hargorejo menyatakan bahwa menjaga kelestarian hutan dilaksanakan bersama-sama masyarakat disekitar hutan. Pada tabel IV.13 nampak sebagian besar alasan responden adalah karena masyarakat disekitar hutan sama-sama menikmati hasilnya, proporsinya sebesar 40 persen. Kemudian disusul alasan bila hutan rusak merugikan masyarakat di sekitar hutan sebesar 26,67 persen, sebesar 20 persen beralasan sumber daya hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang beragam sehingga perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi mendatang dan sisanya sebesar 11,67 % beralasan perlunya masyarakat disekitar hutan diberi penyuluhan untuk tidak menebang pohon sembarangan di dalam kawasan hutan.

Tabel IV. 13
ALASAN RESPONDEN YANG MENYATAKAN BAHWA MENJAGA
KELESTARIAN HUTAN DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
MASYARAKAT DISEKITAR HUTAN
DI DESA HARGOREJO TAHUN 1996

No	Tindakan yang perlu dilakukan	Jumlah	Persentase
1.	Karena masyarakat disekitar kawasan hutan sama-sama menikmati hasilnya, seperti lahan yang digarap menjadi subur yang bermanfaat langsung kepada masyarakat penggarap	24	40,00
2.	Karena bila hutan rusak merugikan masyarakat disekitar hutan, sehingga usaha pelestariannya lebih baik dilakukan bersama atau gotong royong	16	26,67
3.	Sumberdaya hutan mempunyai fungsi atau manfaat yang beragam, sehingga perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi mendatang	12	20,00
4.	Andaikata hutan rusak akan memberikan citra jelek kepada masyarakat disekitar hutan, sehingga upaya pelestariannya dilakukan oleh masyarakat	8	13,33
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Tingginya proporsi penduduk yang mengemukakan alasan tersebut, dapat disebabkan sebagian besar petani memiliki lahan garapan dalam kawasan hutan dan lahan dekat kawasan hutan. Dari kenyataan seperti itu apabila hutan tidak terjaga kelestariannya akan mengganggu aktivitas usaha pertanian dalam hutan, akibatnya akan mengurangi kesempatan menambah pendapatan, yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan keluarga. Selain menurunnya pendapatan, juga

sebagian berpengaruh terhadap kesempatan kerja angkatan kerja keluarga yang relatif banyak didaerah penelitian.

Tentang rendahnya proporsi alasan andaikata hutan rusak akan memberikan citra yang jelek pada masyarakat disekitar hutan, dapat disebabkan karena adanya anggapan keberhasilan melestarikan hutan paling tinggi tanggung jawabnya adalah masyarakat yang ada disekitarnya. Disamping itu juga dapat memperlihatkan tingginya rasa memiliki hutan, sehingga tidak mau mendapatkan citra jelek sehubungan keadaan hutan yang rusak. Dengan kata lain keberhasilan pelestarian hutan sedikit banyak akan mengangkat citra masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, tidak bersifat individual melainkan masyarakat umum. Sangat erat kaitannya tersebut, maka timbul kesadaran responden untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumberdaya hutan.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan di daerah penelitian dapat mengindikasikan bahwa kegiatan gotong royong, baik kerjasama yang berasal dari swadaya maupun dari atas yang dilakukan masyarakat dapat menjadi petunjuk atau pedoman dalam upaya menjaga dan memelihara hutan. Hal ini disebabkan aktivitas masyarakat berupa gotong royong, misalnya pembuatan teras, penanaman kembali pada lahan kritis memperlihatkan responden masih menjunjung nilai kerjasama dalam menanggulangi kerusakan hutan.

3. Ungkapan Memayu Hayuning Bawono

Masyarakat di daerah penelitian merupakan salah satu bagian orang Jawa dan sebagian besar mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, dalam kedudukannya sebagai petani dilakukan secara turun-temurun, menurut Koentjaraningrat (1974) menjelaskan masyarakat demikian itu memiliki metalitas petani, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan adanya mencapai keselarasan dengan alam sekitar atau lingkungan. Wujud usaha orang jawa sebagai petani dalam mencari keselarasan hidup dengan alam tidak berarti tidak mau mengubah alam sama sekali, namun diusahakan untuk dapat memanfaatkan alam dan lingkungan sebaik-baiknya. Sesungguhnya prinsip seperti itu dapat diadopsi dari ceritera wayang purwo yang sering dipentaskan masyarakat. Nampaknya hal ini berkaitan dengan kedudukan wayang purwo merupakan bagian kebudayaan jawa yang *adiluhung* yang didalamnya banyak memuat konsep yang sangat lengkap tentang lingkungan hidup/hutan, masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan secara keseluruhan.

Dalam upaya menjaga, memelihara dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan, penduduk disekitar hutan di Desa Hargorejo memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya untuk mencari keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan hidup. Semuanya ini tercermin dari falsafah dengan ungkapan *memayu bayuning bawono*, yang dimaksudkan suatu usaha mempercantik ataua memperindah alam dunia yang manifestasinya membangun keadaan lingkungan hidup/hutan yang baik (lestari) sepanjang masa (Pranowo, 1985:60-83). Dengan demikian ungkapan *memayu hayuning bawono*, secara implisit memiliki nilai-nilai yang bermanfaat sebagai pedoman masyarakat dalam upaya menjaga, memelihara dan melestarikan hutan. Pentingnya lestarinya hutan dikaitkan dengan ungkapan tersebut untuk masa mendatang kiranya perlu dipertahankan agar sumberdaya alam, khususnya hutan selalu terjaga dengan baik.

Tabel IV. 14
ALASAN RESPONDEN YANG SETUJU TERHADAP UNGKAPAN
MEMAYU HAYUNING BAWONO DI DESA HARGOREJO
TAHUN 1996

No.	Tindakan yang perlu dilakukan	Jumlah	Persentase
1.	Bahwa seseorang menjaga kelestarian dan menghormati alam atau hutan, dan memperindah alam atau hutan.	26	43,33
2.	Menjaga lingkungan hutan supaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang.	20	33,33
3.	Bila hutan tidak dijaga dengan baik akan merugikan masyarakat di kawasan hutan.	6	10,00
4.	Bumi dan isinya merupakan pemberian Tuhan, manusia wajib menjaga agar tetap bermanfaat bagi manusia sendiri.	7	11,67
5.	Tidak menjawab.	1	1,67
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Dari 60 penduduk yang tinggal disekitar hutan didaerah penelitian, sebagian besar sebanyak 59 responden mengemukakan sikap setuju bahwa setiap orang dalam hubungannya dengan alam sekitar harus bertindak atau berbuat sesuai dengan ungkapan *memayu hayuning bawana*, dan sisanya 1 responden tidak berpendapat. Pada tabel IV. 14 nampak sebagian besar responden yang setuju mengemukakan bahwa seorang harus selalu menjaga kelestarian dan menghormati alam/hutan dan memperindah hutan, yang proporsinya sebesar 43,33 persen, kemudian disusul oleh responden yang beralasan menjaga lingkungan hutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebesar 33,33 persen, alasan bumi dan isinya merupakan pemberian Tuhan dan manusia wajib menjaga kelestariannya agar bermanfaat sebesar 11,67 persen, dan sisanya sebesar 10 persen mengemukakan alasan bila hutan tidak dijaga dengan baik akan merugikan masyarakat disekitar hutan.

Tingginya proporsi responden yang mengemukakan alasan bahwa seseorang harus menjaga keselarasan dan menghormati alam dan memperindah alam, dapat disebabkan karena sebagian besar penduduk telah menyadari bahwa sumberdaya hutan banyak mempunyai banyak fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu juga dipengaruhi oleh kehidupan keagamaan penduduk yang cukup kuat, yang dicerminkan dalam perbuatan sehari-hari, menimbulkan kesadaran tentang keberadaan hutan, dimana hutan merupakan salah satu bagian alam yang diciptakan Tuhan. Sebagai rasa hormat terhadap citaan Tuhan tersebut, menuntut manusia untuk selalu mengupayakan adanya keselarasan dan keseimbangan dengan alam semesta, dan ini diyakini merupakan amalan yang baik. Sebaliknya rendahnya proporsi responden yang mengemukakan alasan bila hutan tidak dijaga dengan baik merugikan masyarakat disekitar hutan, dapat disebabkan adanya anggapan sebagian penduduk tentang hutan yang dikaitkan dengan segi kemanfaatannya dan banyaknya menyediakan hutan masyarakat. Berangkat dari pemahaman itu, membangun kesadaran penduduk untuk selalu berusaha menjaga kelestarian hutan yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal disekeliling hutan.

Dengan demikian secara umum penduduk di daerah penelitian memahami bahwa sumberdaya hutan perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan seperti itu, menurut anggota masyarakat yang tinggal disekitar hutan harus berbuat atau bertindak yang sesuai dengan ungkapan *memayu hayuning buwono*. Hal ini disebabkan ungkapan tersebut memiliki nilai penting, yang dapat dijadikan dasar untuk selalu berusaha menjaga dan melestarikan hutan. Sehubungan dengan itu, terjadinya kelestarian hutan,

akan banyak memberikan keuntungan bagi penduduk dan dapat menambah devisa negara dimasa mendatang.

4. Kepercayaan Kepada Penguasa Bumi dan Kelestarian Hutan

Dalam masyarakat Jawa umumnya, dan khususnya di daerah penelitian masih kuat memegang tradisi-tradisi yang berlaku secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya. Soehardi (1982:136), menyatakan tradisi yang dilaksanakan masyarakat Jawa seringkali tidak dapat diterima akal namun selalu dihubungkan dengan kekuatan di luar manusia, atau disebut kekuatan *supernatural*. Masyarakat Jawa dalam kepercayaan tertentu yang dihubungkan dengan kekuatan *gaib* kesemuanya ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan sebagian warga masyarakat membuat dan memberi *sesaji* pada pohon dan tempat tertentu yang dikeramatkan. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang beranggapan pohon dan tempat yang dikeramatkan terdapat penunggunya, yaitu disebut *sing mbau rekso*, untuk menjaga penghuni pohon dan tempat yang keramat tidak marah dan menunggu, sebagian masyarakat memberi *sesaji* dan membakar kemenyan pada waktu tertentu.

Sekalipun penduduk di daerah penelitian yang bermukim dekat hutan tidak banyak yang mengkramatkan pohon dan tempat tertentu, masih terdapat sebagian masyarakat melakukan praktek membuat *sesaji*, dimaksudkan untuk memohon kepada penunggu tidak mengganggu dan akan memberikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tidak membuat *sesaji*, tidak berani berbuat sesuatu yang melanggar di tempat atau sekitar pohon yang dikramatkan. Misalnya adanya kepercayaan seperti itu, anggota masyarakat *tabu* mengambil kayu dan rumput disekitar pohon jati tadi kerdil di dusun Sangkrek dan gunung Roto di dusun Tejogan. Pantangan-pantangan ini secara turun temurun dipahami warga masyarakat bahkan tidak jarang pada tempat yang dianggap keramat setiap hari Jum'at Kliwon dan Selasa Kliwon, digunakan untuk menyelenggarakan upacara kecil dan membakar kemenyan. Bila pantangan-pantangan tersebut dilanggar akan mengakibatkan roh halus atau penguasa bumi yang menunggu pohon atau berdiam di tempat tertentu marah, seperti terjadinya tanah longsor, tanaman pangan dalam hutan dan lahan milik rusak dan kekeringan. Selain itu, pelanggaran terhadap pantangan yang turun temurun diakui warga masyarakat, akan membawa akibat terhadap menurunnya tingkat kemakmuran penduduk.

TABEL IV.15
SIKAP RESPONDEN TERHADAP PENGUASA BUMI/
SING MBAU REKSO
DI DESA HARGOREJO, TAHUN 1996

No.	Sikap Responden	Jumlah	Persentase
1.	Kemakmuran masyarakat di kawasan hutan manusia harus menghormati kepada sing mbau rekso.	21	35,00
2.	Kemakmuran masyarakat sangat ditentukan oleh aktivitas manusia dan hormat kepada sing mbau rekso.	28	46,67
3.	Kemakmuran dapat tercapai dengan bekerja dan taat beragama	9	15,00
4.	Tidak memberi tanggapan	2	3,34
J u m l a h		60	100,00

Sumber : Data primer, 1996.

Dari 60 responden yang disurvei di Desa Hargorejo mendapatkan bahwa sebagian besar berpendapat bahwa tingkat kemakmuran masyarakat di sekeliling hutan salah satunya ditentukan oleh sikap penduduk terhadap penguasa bumi atau *sing mbau rekso*, sebanyak 47 orang (78,34 persen). Disusul 9 orang (15,00 persen) berpendapat kemakmuran dapat dicapai dengan bekerja dengan disertai taat beragama dan sisanya sebesar 3,34 persen tidak berpendapat bahwa kemakmuran perlu menghormati dan memelihara hubungan yang baik dengan penguasa bumi, terbagi menjadi sebesar 28 responden (46,67 persen) menyatakan kemakmuran masyarakat ditentukan oleh aktivitas ekonomi dan hormat kepada sing mbau rekso dan sebanyak 21 responden (35,00 persen) berpendapat kemakmuran masyarakat dapat diraih dengan menghormati penguasa bumi.

Dengan demikian masyarakat di daerah penelitian sebagian besar masih percaya bahwa kemakmuran ditentukan oleh sikap manusia yang selalu menjaga hubungan baik dengan penguasa bumi. Kepercayaan adanya *sing mbau rekso* dalam kehidupan sehari-hari dicerminkan oleh tindakan yang selalu menjaga keselarasan dan keseimbangan dengan alam sekitar/hutan dikaitkan dengan

kekuatan supernatural. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan upacara khusus, seperti memberi sesaji dan berdoa kepada tempat yang keramat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan penduduk melakukan upacara ritual tersebut mempunyai implikasi sangat positif terhadap pemeliharaan lingkungan hidup, khususnya yang menyangkut lingkungan hutan.

D. KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUTAN

Berbagai tahapan dalam proses perkembangan kebudayaan menunjukkan bagaimana acara manusia mencari hubungan yang paling tepat dengan daya-daya kekuatan yang ada disekitarnya. Dalam alam pikiran mistis daya-daya kekuatan goib itu dijadikan sesuatu yang dapat diraba-raba, karena manusia bisa mengambil bagian atau berpartisipasi dalam kekuatan tersebut, misalnya pada upacara, berkorban, tarian-tarian, dan sebagainya (Peursen, 1976 : 92). Dengan demikian manusia didalam kehidupannya berusaha mencari keseimbangan antara dirinya dengan alam sekitarnya. Namun demikian kecenderungan mencari keselarasan dengan lingkungan, bukan berarti manusia tidak mau mengubah sama sekali. Dalam menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam sekitarnya, masyarakat (Jawa) memiliki kepercayaan tertentu yang berhubungan dengan kekuatan supernatural (Koentjaraningrat, 1974 : 221).

Adanya kekuatan diluar kemampuan akal manusia (supernatural) tersebut, sampai saat sekarang ternyata masih dipercayai olah warga masyarakat. Di daerah penelitian sebagian warga masyarakatnya masih percaya dengan adanya kekuatan goib itu. Mereka percaya bahwa alam itu tidak hanya dihuni oleh manusia dan makhluk yang kasat mata lainnya, namun dihuni pula oleh makhluk halus (tidak kasat mata). Makhluk yang tidak kasat mata itu dipercayai tinggal di sekitar tempat tinggal manusia, misalnya hutan, pohon, batu, jembatan, jurang, perempatan jalan, sumur dan lain sebagainya. Makhluk halus tersebut antara lain : leluhur, dhanyang, lelembut, dan sejenisnya.

1. Kepercayaan Adanya Leluhur

Leluhur adalah roh halus yang diyakini berasal dari orang yang meninggal dunia. Setelah seseorang meninggal dunia rohnya akan segera menjadi makhluk halus dan melayang-layang. Makhluk tersebut kemudian mencari tempat tinggal, misalnya di hutan, di pohon, jembatan dan lainnya. Bagi orang yang semasa hidupnya selalu berbuat kebajikan dan dihormati oleh masyarakat, serta mempunyai kekuatan batin yang lebih misalnya suka *bertapa* (ahli *tapa* atau *semedi*), mempunyai kesaktian atau kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang

kebanyakan, maka roh dari orang tersebut akan menempati tempat yang oleh masyarakat dianggap lebih terhormat. Orang itu rohnya menjadi leluhur dan dihormati oleh orang-orang yang masih hidup.

Seperti yang diyakini oleh masyarakat Hargorejo, bahwa roh leluhur itu menempati sebuah rumah atau istana yang bagus, walaupun dilihat dengan mata biasa tidak tampak atau hanya sebuah gunung atau hutan, dan lainnya. Menurut informasi yang ada, menyatakan bahwa orang yang kalau semasa hidupnya selalu melakukan kebajikan dan *ahli tapa*, kalau meninggal dunia rohnya akan menjadi makhluk halus yang suka menolong manusia yang masih hidup. Roh itu menempati sebuah gunung atau hutan, atau pohon, yang dianggap sebagai keraton atau istananya. Di gunung Roto/Tugel misalnya, disitu dipercayai sebagai tempat tinggal roh leluhur yang bernama Kyai Mangunwijaya. Kyai tersebut oleh masyarakat setempat diyakini yang menjaga hutan di gunung Roto. Dengan dijaganya gunung itu oleh leluhur diatas, maka orang tidak berani sembarangan, tidak seenaknya berbuat sesuatu yang kurang baik di hutan tersebut.

Selain di gunung Roto di Desa Hargorejo juga masih ada tempat lain yang cukup dikeramatkan oleh masyarakat sekitarnya. Di Dusun Sangrek yang masih wilayah desa tersebut terdapat leluhur yang bernama Pak Banudriyo. Leluhur ini oleh masyarakat setempat sangat dihormati (dikeramatkan), dan dianggap sebagai cikal bakal dusun tersebut. Cikal bakal Dusun Sangrek ini diyakini tinggal di hutan gunung (bukit) Jeruk. Oleh karena itu gunung itu juga ada salah satu bukit yang mirip Kuncung Semar, maka disebut pula Gunung Kuncung.

Dengan adanya kepercayaan bahwa gunung itu dihuni oleh leluhur, hutan yang ada disitupun relatif aman. Tidak ada orang yang berani mengganggu apalagi merusak tanaman atau hutan di gunung itu. Binatang-binatang yang ada di dalam hutan itupun menjadi aman, tidak terusik oleh kejailan manusia. Kecuali itu binatang atau hewan yang ada di dalam hutan itu dipercayai pula sebagai piaraan roh-roh halus yang tinggal di tempat tersebut, Dengan demikian kepercayaan masyarakat bahwa hutan itu ada yang menunggunya tentunya sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.

2. Kepercayaan Adanya Dhanyang

Dhayang adalah sebutan untuk makhluk halus yang menempati dan menguasai tempat-tempat tertentu, misalnya jurang, mata air, desa, dan sebagainya. Makhluk ini mempunyai sifat yang baik, yaitu mau menolong dan bersahabat dengan manusia. Biasanya Dhayang oleh masyarakat diberi nama sesuai dengan daerah yang dikuasai, misalnya desa, pohon, jembatan, jurang,

dan lain sebagainya. Dhayang ini sering kali dipuji atau dihormati oleh masyarakat, sehingga banyak diantara warga memberikan sesaji (sajen).

Seperti dikatakan oleh informan bahwa di Desa Hargorejo ada tempat yang selalu dikunjungi oleh warga dan diberi sesaji. Tempat tersebut adalah sebuah tonggak kayu jati yang sudah tua dan berada di dekat-dekat makam yang tidak diketahui asal usulnya. Menurut cerita para informan pernah ada orang dari desa lain (Hargowilis) yang ingin memindahkan atau membawa tonggak jati. Tonggak jati itu dengan cara *dipanggul* dibawa pulang ke rumah di Hargowilis. Kurang jelas apa maksud orang tersebut membawa tonggak itu. Akan tetapi yang jelas setelah sampai di rumahya, *ndilalah* (kemasukan makhluk halus). Oleh sebab sakitnya mendadak dan seperti *ora sebaene* atau tidak seperti layaknya orang sakit, maka keluarganya mendatangi orang yang dianggap tua (*wong pinter*) untuk menanyakan keadaan sakit anggota keluarganya. Kata orang tua atau dukun itu, sakitnya dikarenakan kanslupan yang tinggal di tonggak jati. Oleh karena itu orang tua tadi mengusulkan atau menyarankan, supaya sisakit dapat selamat, maka tonggak tersebut harus dikembalikan ke asalnya di Dusun Sangrek, Hargorejo. Sesudah tonggak jati dikembalikan ke tempat asalnya, orang yang sakit langsung sembuh. Mulai saat itulah warga masyarakat mempercayai bahwa di tonggak jati itu ada Dhayangnya dan kemudian banyak warga yang sering memberi sesaji. Adapun sesaji yang biasanya diberikan antara lain : kembang menyan, kembang setaman, nasi golong sejodo. Mereka memberikan sesaji dengan cara *ditembung* atau *dijapani* (diberi doa/mantra).

Dengan adanya peristiwa tersebut di atas, hutan di sekitar Dhayang itu bertempat tinggal tidak ada yang mengganggu. Hutan menjadi relatif *aman* karena masyarakat percaya kalau di sekitar Dhayang itu dirusak, maka *sing mbaurekso* di daerah itu akan memperingatkan bahkan marah. Dalam memberi peringatan kepada manusia yang merusak itu bisa dengan cara orang itu *kaslupan*, ataupun melalui mimpi pada saat tidur.

3. Kepercayaan Adanya Peri

Peri yaitu sejenis makhluk halus yang dianggap berjenis kelamin perempuan. Makhluk ini mempunyai paras yang cantik dan berbau wangi. Akan tetapi meskipun wajahnya cantik dan berbau harum/wangi, punggung dari peri ini berlubang. Untuk menutupi lubangnya yang berbau busuk itu, menggunakan rambutnya yang terurai panjang. Ia gemar menggoda laki-laki yang sedang kesepian untuk diajak mengadakan hubungan badan. Menurut informasi peri ini suka tinggal di tempat-tempat yang sepi atau angker, baik di desa maupun di

hutan. Orang yang digoda oleh peri biasanya akan menyadari kalau tersesat, setelah beberapa lama atau bahkan tertidur di bawah pohon atau jembatan, atau lainnya yang semula dilihatnya sebagai tempat indah atau bagus. Sebagai contoh, pernah di suatu hari ada seorang laki-laki yang baru saja melihat pertunjukkan kesenian di desa tetangga. Di malam yang agak remang-remang karena sinar rembulan yang tidak begitu terang. Ditengah perjalanan ia bertemu seorang wanita cantik jelita. Oleh karena sifat lelaki itu yang suka menggoda wanita, maka ia pun tertarik dengan kejelitaannya. Setelah dapat berdekatan mereka berdua lalu pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh peri tersebut. Lelaki tersebut melihat tempat tinggal itu sangat indah. Setelah beberapa lama mereka bercengkerama, maka lelaki itupun tertidur pulas. Akan tetapi betapa terperanjatnya, setelah terbangun ia tidak mendapati atau melihat wanita itu ada di dekatnya. Ternyata yang ia lihat adalah sebuah pohon jati yang besar di tepi hutan dan jauh dari jalan yang seharusnya dilewati. Kejadian itu kemudian menjadi pergunjungan para warga dan menganggap lelaki itu dibawa oleh peri yang menggodanya. Hal semacam itu pada masa dahulu seringkali terjadi. Namun demikian orang-orang yang kelakuannya baik hampir tidak pernah ada yang digoda. Peri biasanya menggoda atau mengganggu orang-orang yang suka *iseng* atau orang yang mempunyai sifat hidung belang.

Ceritera-ceritera tentang orang yang diganggu oleh makhluk halus tersebut diatas, pada masa sekarang sudah tidak terdengar lagi. Hal itu disebabkan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah, telah merambah sampai ke pelosok pedesaan. Pembangunan yang tidak hanya ditekankan pada segi "fisik" namun juga rohaninya, ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pengetahuan masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat menyebabkan cara berfikir mereka pun jelas lebih rasional dan lebih realitas. Akibat selanjutnya yaitu mereka sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dianggap takhayul. Namun demikian menurut informan terutama yang usianya sudah relatif tua, pada saat sekarang banyak orang yang "sombong". Oleh karena itu mereka bertindak sesukanya, dan kurang menghargai.

4. Percaya adanya Wewe

Wewe adalah makhluk halus yang dianggap mempunyai jenis kelamin wanita. Makhluk ini digambarkan punya payudara yang besar dan menjulur kebawah sampai perut. Berambut panjang yang tidak teratur, serta mengenakan baju yang relatif panjang sampai sebatas perut. Seperti halnya gendruwo, wewe juga dapat menyamar atau mengelabui orang yang akan diculiknya. Orang yang akan diculik oleh wewe biasanya merasa dirinya diajak oleh sahabat, kenalan

atau saudaranya. Orang tersebut merasa diajak ke pasar, tempat keramaian atau yang sudah dikenalnya. Seperti yang dikemukakan oleh informan, bahwa orang yang diculik itu akan mengalami kelainan jiwa atau gangguan psikologis. Apalagi kalau orang tersebut mau makan makanan yang diberi wewe itu, maka orang itu akan menjadi gagu dalam berbicara atau bisu. Sebagai contoh pernah ada kejadian seorang laki-laki yang umumnya sekitar 35 tahun diculik. Menurut ceriteranya ia merasa diajak oleh kakaknya pergi ke tempat saudaranya di desa lain. Oleh karena ia lama tidak pulang, kemudian keluarganya mencarinya ketempat saudara-saudaranya dan kenalannya, namun hasilnya nihil, tidak ketemu. Keluarga percaya kalau ia dibawa wewe, karena itu harus dicari dengan cara lain. Seperti biasanya orang yang hilang dibawa wewe dicari dengan cara memanggil namanya dan membunyikan berbagai jenis peralatan rumah tangga. Tujuannya yaitu supaya orang yang hilang itu sadar dan tahu kalau dirinya sedang dicari, kecuali itu suara gaduh itu untuk membingungkan makhluk yang menculik. Orang tersebut ditemukan di bawah pohon randu alas. Pada pohon itu sudah beberapa kali dilewati dan diselidiki. Setelah ditemukan, ternyata ia sulit untuk berbicara. Beberapa hari kemudian baru ia agak membaik kondisinya, sehingga dapat memberikan keterangan pada saat ditanya oleh orang lain. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa diajak oleh kakaknya ke rumah familinya. Namun setelah sadar ternyata ditemukan di bawah pohon randu.

Kecuali menculik orang dewasa, makhluk halus ini juga suka menculik anak-anak. Menurut informasi kalau yang diculik itu anak-anak, cara membawanya yaitu dengan dijepitkan di bawah pohon, bahkan ada yang ada di atas pohon. Konon salah satu kesukaan makhluk penculik ini adalah menyimpan celana dalamnya. Celana dalam wewe ini dibuat dari robekan kain yang bagi orang biasa sudah tidak terpakai. Menurut kepercayaan masyarakat mempercayainya bila seseorang bisa mendapatkan atau mencuri celana dalam atau pakaian wewe yang sedang dijemur itu, maka ia akan menjadi sakti dan bahkan dapat berkomunikasi dengan makhluk halus.

Kepercayaan warga masyarakat tentang adanya makhluk halus yang disebut wewe ini tentunya sangat bermanfaat bagi pengendalian atau pelestarian lingkungan alam. Orang takut menebang pohon-pohon yang dipercayainya sebagai tempat makhluk halus itu. Dengan tidak ditebangnya pohon-pohon itu, maka paling tidak ikut serta mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan hidup.

Jin merupakan makhluk halus yang berasal dari unsur panas dan warna bermacam-macam. Seperti merah, hijau, hitam dan sebagainya (Triyoga, 1991, 57). Makhluk tersebut dikelompokkan menjadi 2 yaitu, jin yang beriman kepada

Allah serta memeluk agama Islam, dan jin yang masih kafir atau belum beriman kepada Allah.

Jin seperti halnya makhluk-makhluk halus lainnya yaitu bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Ia dapat menyamar atau mengelabui manusia dengan berpura-pura menjadi salah satu anggota keluarga atau famili. Selain itu ia juga mampu masuk kedalam tubuh manusia, sehingga dapat menimbulkan sakit atau bahkan kematian, jin yang mau memasuki tubuh manusia sampai menimbulkan kematian, biasanya adalah yang belum beriman kepada Allah. Sedangkan yang sudah beriman, biasanya suka menolong manusia.

Selain jin itu tinggal di tempat-tempat yang sepi dan angker, misalnya hutan atau gunung yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Makhluk ini banyak pula yang tinggal di dalam desa misalnya di jembatan, tempat air, masjid dan sebagainya. Bagi jin yang beriman, lebih suka tinggal di tempat-tempat ibadah seperti masjid atau mushola (surau). Menurut informasi masjid yang ada di dusun Sangrek juga dihuni jin yang sudah menganut agama Islam. Untuk itu orang tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji di dalam masjid. Apabila ada orang yang melakukan tindakan tidak baik, misalnya tidur di pengimaman (tempat sholat imam), kecuali di masjid banyak pula jin yang suka tinggal di rumah-rumah orang yang taat menjalankan syariat agamanya, misalnya Kyai atau Ulama.

5. Percaya Adanya Lelembut

Lelembut dalam istilah Jawa sering pula disebut demit (Poerwadarminta, 1939 : 270), sedangkan menurut Triyogo (1981 : 56) lelembut adalah jenis makhluk halus yang rendah derajatnya. Ada dua pendapat mengenai asal usul lelembut. Pertama ada yang mengatakan bahwa ini telah ada sejak dunia diciptakanNya. Sementara yang kedua mengatakan bahwa lelembut hidupnya tindakannya tidak terpuji (*jahat*). Makhluk tersebut suka mengganggu manusia, suka merusak, suka membuat sakit dan bahkan mau membunuh. Dengan kata lain, lelembut ini adalah makhluk halus yang tinggi disekeliling manusia dan mempunyai sifat jahat.

Adanya lelembut yang tinggal di sekitar kehidupan manusia ini diyakini pula oleh warga masyarakat daerah penelitian, bahwa itu ada. Menurut para informan, lelembut itu tinggal di hutan, jurang, jembatan, sumur dan sebagainya. Makhluk halus ini kadangkala mau menampakkan diri, untuk menakut-nakuti manusia. Daerah yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk tersebut oleh masyarakat dikatakan *wingit* atau *angker*. Apabila kalau makhluk halus yang tinggal di tempat itu seringkali menampakkan diri atau mengganggu manusia.

Orang yang melewati daerah yang dianggap sebagai tempat tinggal roh halus itu sebaiknya mengucapkan *bismillah* atau minta ijin. Kalau tidak mengucapkannya, maka orang tersebut diganggu atau dimasuki oleh roh jahat itu. Oleh masyarakat setempat orang itu dikatakan *kesendu* atau *kesambet*. Sebagai contoh yaitu orang yang pernah dialami sendiri oleh seorang informan, pada waktu ia masih muda, suatu ketika masuk ke hutan Roto di gunung tugel. Setelah berada di tengah hutan melihat ada ayam banyak sekali. Hewan itu mengelilinginya seolah-olah mau memataknya. Ayam itu dicobanya untuk dipegang, tetapi ternyata selalu gagal. Setelah dirasa sudah cukup lama, kemudian ia pun pulang dan sesampainya di rumah mereka sakit. Waktu sakit, kalau tidur ia selalu bermimpi dikerumuni oleh ayam. Selanjutnya keluarganya mencari *orang tua* atau orang yang dianggap pandai (wong pinter), yang dianggap mempunyai *daya linuwih* atau kesaktian untuk mengobati sakitnya. Ia disuruh minum air putih yang sudah *dijampi-jampi* (diberi mantra) oleh *orang tua* tersebut, tanpa menggunakan sesaji seperti kembang menyan dan sejenisnya. Setelah minum air itu, ia merasa kesehatannya berangsur-angsur pulih kembali.

Menurut informan, orang yang diganggu oleh makhluk halus atau lelembut itu kejadiannya bisa bermacam-macam. Misalnya orang yang mencari jalan keluar dari hutan itu. Atau ada pula orang yang sedang mencari rumput di hutan, kemudian keranjang rumputnya diambil atau disembunyikan oleh lelembut itu, sehingga tidak dapat terlihat oleh pemiliknya. Orang yang mengalami hal tersebut biasanya cepat-cepat pulang ke rumah. Kalau tidak cepat-cepat meninggalkan tempat itu, ia akan mengalami kesulitan keluar dari hutan. Baru pada hari berikutnya kembali lagi ke tempat dimana ia mencari rumput sebelumnya, dan di tempat itulah keranjang miliknya dapat ditemukan lagi.

Dari beberapa informan ada yang mengatakan bahwa roh-roh halus dapat mengganggu ketentraman hidup manusia. Hal ini dapat terjadi karena orang bersangkutan tidak tahu atau lupa akan *unggah-ungguh* (tata krama). Mereka mengatakan bahwa makhluk-makhluk halus itu juga hidup seperti manusia maka di dalam kehidupan bermasyarakat pun punya aturan-aturan atau norma. Dicontohkan oleh informan, bila akan memasuki tempat tinggal orang lain maka harus memberi salam atau permissão kepada pemiliknya. Begitu pula bila manusia akan memasuki tempat tertentu harus memberi salam (mengucapkan "bismillah"). Mengucapkan "bismillah" disini tentunya bukan seperti orang Islam mengawali membaca doa. Akan tetapi yang dimaksud mengucapkan "bismillah" adalah jika orang akan memasuki tempat tertentu harus minta ijin kepada si penghuni ditempat itu, baik penghuni manusia maupun makhluk halus.

Seandainya ada orang yang memasuki tempat lain tapi tidak membaca *bismillah* atau minta ijin, dianggap tidak sopan. Untuk penghuni seringkali menjadi merasa tersinggung dan marah. Demikian pula dunia makhluk halus. Apabila ada orang memasuki daerah yang dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus itu, harus mengucapkan salam, harus mengucapkan *bismillah*. Kalau orang itu tidak memberi salam tersebut, roh atau makhluk halus penghuni tempat itu bisa marah karena merasa tersinggung. Makhluk halus yang tersinggung itu akan mengganggu atau mencelakakan orang yang dianggap tidak sopan. Orang tersebut merasa sakit dan sakitnya ora sebaene (tidak seperti umumnya kalau orang sakit). Sakit karena diganggu oleh makhluk halus, biasanya orang itu dikatakan *kesendu* atau *kesambet*. Cara penyembuhannya seperti dikemukakan dimuka, yaitu dengan memberikan air bening yang sudah diberi mantra oleh seorang yang dipercayai pandai (wong pintar atau dukun)

Atas dasar kepercayaan-kepercayaan masyarakat seperti telah disebutkan dimuka, ternyata memiliki kaitan dengan pelestarian hutan. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap leluhur, danyang, gendruwo dan yang lainnya ini sangat menguntungkan terhadap kelangsungan hidup baik flora maupun fauna yang ada di dalam hutan. Dengan demikian, walaupun tidak disadari oleh warga masyarakat secara langsung adanya usaha pelestarian lingkungan hidup ternyata sudah ada sejak jaman dahulu.

Kearifan-kearifan lokal tersebut diatas sudah disadari oleh nenek moyang kita, yang tujuannya tidak lain adalah supaya ada keseimbangan antara makhluk ciptaan Tuhan, antara manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini terbukti dengan tidak beraninya warga masyarakat mengadakan pengrusakan atau melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tentang masalah lingkungan hidup itu sendiri sebenarnya juga telah diperingatkan oleh Alloh, seperti tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Qoshosh ayat 77 yang artinya kurang lebih *dan carilah apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Alloh telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Alloh tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan.* (Emil Salim, 1983 : 87). Dengan adanya peringatan dari Tuhan itu, sesungguhnya manusia sadar bahwa kerusakan lingkungan akan merugikan manusia itu sendiri. Untuk itu manusia harus bisa memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya tanpa merusak atau mengurangi keseimbangan lingkungan hidup. Namun ironisnya pada saat sekarang dengan adanya perkembangan atau kemajuan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, ternyata lingkungan yang semula relatif baik, ada keselarasan antara manusia

dengan alam sekitarnya, sedikit demi sedikit mulai tidak seimbang. Kemajuan pengetahuan manusia, khususnya yang berbasik pada logika ternyata sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan alam. Hubungan manusia dengan alam yang semula saling menguntungkan (*seimbang*), semakin berubah. Hubungan tersebut cenderung lebih menguntungkan manusia. Kecenderungan itu semakin parah, karena manusia tidak lagi takut dengan apa yang disebut leluhur, dhanyang, lelembut dan sejenisnya. Dengan kata lain kita, manusia memperlakukan alam tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan. Keadaan seperti tersebut terjadi pula di daerah penelitian.

Menurut informasi, sebelum tahun 70-an hutan-hutan di daerah itu banyak mengalami kerusakan. ini dikarenakan oleh penebangan hutan yang tidak terkendali. Akibatnya sumber air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat ikut terpengaruh. Oleh karena ada penggundulan hutan, terjadilah erosi dan selanjutnya berakibat pada sumber air yang sangat berkurang. Baru setelah tahun 70-an ada penghijauan, tetapi inipun belum begitu berhasil. Lapisan tanah sudah terlanjur relatif tandus dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan keseimbangan alam seperti yang diinginkan. Oleh sebab kearifan-kearifan lokal yang ada dan kini mulai ditinggalkan masyarakat pendukungnya, tentunya diperlukan adanya kearifan baru yang lebih diterima. Sikap dan perilaku masyarakat dahulu yang selalu menjaga keseimbangan atau keselarasan dengan lingkungan hidupnya (lingkungan alam), kurang begitu dipahami oleh generasi saat ini. Dengan kata lain masyarakat sekarang tidak takut lagi dengan apa yang disebut leluhur, dhanyang, gendruwo, wewe, dan lainnya. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan diperlukan adanya aturan. Norma atau aturan baru itulah yang mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat dalam mengeksploitasi alam, agar terjaga keseimbangannya.

E. TRADISI MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN HUTAN

Gunung roto dan gunung Jeruk di Desa Hargorejo dianggap sebagai gunung angker. Oleh karena gunung tersebut diyakini ditempati makhluk halus sebagai penjaganya. Makhluk halus yang menempati gunung tersebut mempunyai *trapsilo* atau aturan seperti halnya kehidupan manusia bermasyarakat. Aturan atau *trapsilo* harus ditaati oleh siapa saja yang masuk atau yang ada di dalam hutan (gunung) tersebut. Kalau sampai terjadi pelanggaran maka akan mengakibatkan malapetaka baik orang yang akan memasuki hutan di gunung itu harus minta ijin, harus mengucapkan "bismillah", harus *kulon nuwun* kepada penghuni gunung Jeruk dan gunung Roto.

Walaupun demikian manusia sebagai makhluk yang berbudaya mencoba untuk menetralkan atau mencari hubungan dengan makhluk-makhluk yang disakralkan dan dikramatkan. Hal itu bisa terjadi karena manusia dengan berbagai macam perasaan, seperti takut, ngeri, hormat dan lain sebagainya mendorong untuk berbuat sesuatu yang bertujuan mencari hubungan dengan makhluk goib yang sering kali juga dianggap sebagai pelindung desa. Salah satu perbuatan manusia untuk mencari hubungan dengan makhluk halus itu adalah dengan acara upacara bersih desa. Di Hargorejo warga masyarakatnya masih percaya bahwa desa tersebut ada yang *mengayomi* atau melindunginya. Makhluk halus yang dianggap melindungi warga desa, sering kali disebut dengan istilah leluhur dan dengan dhanyang. Akan tetapi dengan adanya pembangunan di segala bidang, dewasa ini banyak warga yang kurang menghormati atau bahkan tidak percaya adanya makhluk halus tersebut. Di dalam sub bab ini akan dicoba diuraikan tradisi upacara yang ada di desa Hargorejo, yang tentunya baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelestarian lingkungannya.

1. Upacara Bersih Desa

Upacara bersih desa mempunyai banyak sebutan, misalnya sedekah bumi, rasulan, slametan bumi, suran, dan lainnya. Pemberian nama itu biasanya tergantung dari daerah masing-masing. Namun pada prinsipnya upacara bersih desa adalah upaya manusia untuk mencari keseimbangan atau hubungan dengan makhluk yang tidak kasat mata (goib) dan diyakini sebagai penjaga atau pelindung desa.

Upacara bersih desa di Hargorejo, tidak hanya dilakukan oleh mereka yang bermatapencaharian di sektor pertanian. Akan tetapi upacara ini melibatkan warga masyarakat yang bekerja di sektor lain seperti pamong praja, pegawai maupun pedagang. Pelaksanaan upacara bersih desa dilakukan satu tahun sekali, yaitu jatuh pada awal bulan sura dalam perhitungan kalender jawa.

Maksud diadakan upacara bersih desa adalah suatu ungkapan rasa berterima kasih, rasa syukur kepada yang telah memberikan keselamatan dan juga rejeki terhadap umat manusia. Upacara syukur ditunjukkan antara lain kepada *Sing Gawe Urip utowo Sing Maha Agung* (yang membuat hidup atau Yang Maha Besar/Agung). Kecuali itu upacara ini dipersembahkan pula kepada *Laluhur* atau *Dhayang* desa yang dianggap telah melindungi masyarakat setempat dari gangguan roh-roh jahat.

Upacara Bersih Desa sejak jaman dahulu diadakan oleh masyarakat Hargorejo. Dengan kata lain upacara bersih desa sudah menjadi kebiasaan atau

tradisi yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian upacara tersebut dapat dikatakan sudah mendarah daging dalam masyarakat desa. Menurut informan apabila belum melaksanakan upacara bersih desa rasanya masih ada yang kurang. Mereka merasa bahwa hidup ini belum tentram, kalau tidak diadakan upacara ini. Keadaan ini tentunya ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak kasat mata atau gaib. Oleh karena kebersihan desa ini dirasa cukup menentukan, khususnya di dalam masalah keselamatan hidup, seperti pada saat bekerja mencari kebutuhan mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Perkataan bersih desa menurut informan, mengandung arti kebersihan desa beserta isi dan penghuninya dari gangguan makhluk atau roh jahat, yang biasanya mencari rejeki, misalnya bertani disekitar tempat tinggal maupun yang ada di kawasan hutan dapat berhasil dengan baik. Oleh karena masyarakat mempunyai kepercayaan, bahwa desa tersebut dihuni sebangsa roh halus seperti *lelembut* atau *Sing Mbaurekso* sebagai atau pelindung desa dari gangguan roh jahat diantaranya adalah Kyai Mangunwijaya dan Kyai Banudriyo. Kedua tokoh ini oleh masyarakat setempat dianggap sebagai cikal bakal Desa Hargorejo. Mereka beranggapan kalau tidak mengadakan upacara, misalnya tanaman banyak desa tersebut akan mengalami bencana, misalnya tanaman banyak yang diserang hama, banyak warga sakit, dan sebagainya. Bencana itu oleh masyarakat setempat sering disebut *pengebluk*. Hal itu dikarenakan warga setempat dianggap melalaikan dan tidak menghormati lagi pada leluhurnya atau *Sing Mbaurekso*, yang menjaga desa. Usaha menghindari supaya tidak terjadi bencana atau bahaya yang mengancam warga masyarakat, maka diadakan upacara bersih desa.

Pelaksanaan upacara bersih desa pada umumnya ditempat yang dikeramatkan atau dianggap angker. Hal ini disebabkan tempat bersangkutan oleh masyarakat dianggap sebagai tempat tinggal *Sing Mbaurekso*. Kecuali itu, upacara tersebut dilaksanakan pada hari yang oleh orang Jawa dianggap keramat, yaitu Selasa Kliwon, atau Jum'at Kliwon di bulan Suro. Namun demikian seandainya di bulan Suro terdapat kedua hari tersebut, maka akan dipilih satu saja. Menurut informan pelaksanaan upacara bersih desa lebih diutamakan diselenggarakan pada hari Jum'at Kliwon. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa hari Jum'at dianggap sebagai hari baik atau keramat yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hari yang lain.

Pada upacara bersih desa di Hargorejo saat pelaksanaan tidak diiringi dengan kesenian. Masyarakat peserta upacara biasanya datang ke tempat pelaksanaan pada sore hari, yaitu sekitar pukul 16.00, dengan membawa nasi beserta lauk pauknya. Kemudian duduk bersila sambil mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh perangkat desa setempat. Sambutan tersebut berisi tentang

maksud dan tujuan diadakan upacara bersih desa. Kecuali itu di dalam sambutan diselingi pula dengan pesan-pesan pembangunan seperti tidak boleh menebang pohon di hutan secara sembarangan karena dapat mengakibatkan tanah menjadi gundul atau tandus, yang nantinya akan menyengsarakan masyarakat. Upacara ini diakhiri dengan membaca do'a bersama, dan dipimpin oleh orang yang dianggap mampu (biasa modin). Dilanjutkan dengan mengubur kepala kambing di tempat keramat itu. Setelah acara tersebut selesai peserta upacara makan nasi yang dibawa dari rumah secara bersama-sama. Pada malam harinya diadakan pertunjukkan wayang kulit, yang menurut informasi selalu mengambil ceritera yang berkaitan dengan pertanian misalnya Dewi Sri atau Sri Sadono.

Seperti umumnya bersih desa, upacara yang dilakukan di Hargorejo pun menggunakan beberapa sesaji sebagai persyaratannya. Adapun sesaji-sesaji tersebut antara lain :

- Sekul golong sejodo
- goreng-gorengan
- kembang setaman
- kembang menyan
- kinang suruh ayu
- jenang baro-baro
- padi, kelapa, ketela pohon
- kepala kambing

sesaji-sesaji tersebut diletakkan di tempat yang angker atau keramat. Sementara kepala kambing *kendit* dengan dibungkus kain putih dipendam (dikubur) di tempat tersebut. Sesaji itu dipersembahkan kepada leluhur desa, karena mereka juga dianggap hidup seperti layaknya manusia. Persembahan sesaji dalam upacara tersebut diyakini akan diterima oleh leluhur (*sing mbau rekso*) yang menunggu desa.

Di desa Hargorejo sebenarnya terdapat beberapa jenis upacara tradisional. Namun rupanya yang cukup tampak berhubungan pelestarian alam secara jelas hanyalah upacara bersih desa. Upacara tradisional selain bersih desa misalnya *baritan*. Upacara ini dimaksudkan untuk menolak atau menjaga tindakan kurang terpuji (jahat) yang dilakukan oleh *balanya* Nyi Roro Kidul. Untuk mengantisipasinya supaya warga masyarakat tidak kedatangan sirelak tersebut, maka mengadakan sesaji dengan menyembelih kambing jantan yang sudah *powel* (tua). Daging kambing dibagi-bagikan kepada mereka yang mengikuti *baritan*. Kepala kambing itu ditanam (dikubur) di perempatan jalan, dimana kambing itu

disembelih. Kulit dan darah kambing dibagikan kepada warga yang mengikuti upacara itu. Kulit dan darah kambing itu oleh mereka ditusuk (dibuat seperti sate) dan diletakkan di pintu depan. Menurut kepercayaan penduduk di daerah penelitian, upacara sirelak, maka setelah tentara Nyi Loro Kidul melihat ada darah, daging, dan tulang tergantung di depan pintu akan membuat takut dan tidak jadi memangsanya atau mengganggu warga masyarakat.

Walaupun upacara-upacara tersebut diatas sudah merupakan tradisi masyarakat setempat, akan tetapi pada akhir-akhir ini rupanya tradisi itu semakin mengalami penurunan. Dengan kata lain frekuensi dari pelaksanaan upacara itu semakin jarang dilakukan. Sudah beberapa tahun belakangan ini Masyarakat Desa Hargorejo tidak melaksanakan upacara tersebut di atas. Meskipun dari pihak masyarakat sebagian masih ada yang menghendaki supaya upacara bersih desa dilaksanakan, tetapi dari pihak pemerintah desa kurang berkenan (tidak menyetujuinya). Hal ini tidak dikarenakan adanya pertimbangan tertentu, yaitu menyangkut dana untuk pelaksanaan. Oleh karena setiap pelaksanaan selalu diikuti dengan hiburan wayang kulit, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Padahal biaya atau dana yang dibutuhkan diambil dari iuran masyarakat setempat. Dengan pertimbangan bahwa dana yang digali itu diambil dari masyarakat, maka pihak desa mengambil kebijaksanaan mengurangi frekuensi atau tidak mengadakan upacara bersih desa.

2. Nilai Yang Terkandung Dalam Upacara Bersih Desa

Seperti kita ketahui bahwa sesuatu yang dibuat oleh manusia sebagai kebudayaan atau hasil kebudayaan, mempunyai nilai bagi masyarakat pemangkunya atau paling tidak bagi individu yang menciptakannya. Dengan demikian setiap kebudayaan atau hasil kebudayaan baik disadari maupun tidak disadari mempunyai atau nilai bagi manusia. Begitu pula dengan upacara itu secara tidak disadari pemangkunya, ternyata mengandung banyak nilai seperti gotong royong, kesetiakawanan, musyawarah dan sebagainya.

Gotong-royong atau sering disebut kerja bakti biasanya diartikan sebagai bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan kata lain gotong-royong itu merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang ditanggung atau dipikul bersama-sama oleh warga masyarakat setempat. Jadi dapatlah dikatakan bahwa gotong royong adalah suatu jenis tindakan manusia yang ingin memecahkan persoalan hidup secara bersama-sama (Mortijpto, 1996 : 83). Gotong royong yang terjadi di masyarakat pedesaan didasari oleh adanya ikatan satu warga

dengan warga lainnya, berdasarkan hubungan sosial atau relasi sosial antar anggota masyarakat.

Kerjasama atau gotong royong tampak pula di kalangan masyarakat pedesaan pada saat akan atau sedang mengadakan kegiatan bersih desa. Upacara ini biasanya melibatkan warga masyarakat setempat, dan sebelumnya dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya memperbaiki jalan desa, membersihkan sumber air, dan yang lainnya. Menurut para informan, masyarakat Hargorejo sangat menyadari akan kegunaan kerja bakti. Namun demikian mendapat pesan dari kakaknya. Pesan tersebut berbunyi : *Le kowe ajo pisan-pisan ngrusak alas, sebab yen alas iku apik kan iyo kanggo kemakmuran awake dhewe kabeh*. Dengan adanya pesan tersebut ia selalu ingat kalau menebang pohon, baik di pekarangan sendiri maupun di tempat lain berusaha untuk menjaga lingkungan di sekitarnya tidak sampai rusak. Bahkan kalau bisa setelah menebang pohon itu, diganti dengan menanam pohon baru. Hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan agar lingkungan alam ini tidak terjadi rusak dan tetap lestari.

Kecuali nilai gotong royong yang terkandung dalam upacara bersih desa tersebut diatas, masih ada nilai lain yaitu kesetiakawanan. Upacara yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali, ternyata mempunyai peranan yang cukup besar dan berarti untuk menggalang solidaritas dan juga rasa kesatuan dan persatuan warga, ditandai dengan adanya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pada saat akan atau sedang mengadakan status sosial seseorang. Setiap warga mempunyai kesempatan yang sama dan kedudukan yang sama. Oleh karena upacara itu dianggap sebagai masalah bersama, maka tidak hanya kaum pria saja yang terlibat tetapi juga wanitanya. Kaum wanita biasanya bekerja pada bagian yang tidak memerlukan kekuatan fisik. Adanya anggapan bahwa acara itu merupakan masalah bersama, maka dalam melakukan atau mempersiapkan seperti sesaji, pemasangan tarub dan persiapan lainnya dilakukan secara bersama-sama. Hal itu dilakukan karena mereka merasa bahwa pada dasarnya upacara itu adalah untuk kepentingan bersama atau kesejahteraan bagi warga masyarakat desa tersebut.

Disebabkan upacara bersih desa memerlukan pula sarana yang harus ada seperti sesaji dan biasanya disertai kesenian wayang kulit, maka membutuhkan dana yang tidak sedikit seperti tersebut di muka. Untuk mencari dan menentukan besarnya dana yang dibutuhkan, diadakan musyawarah ini memang tidak melibatkan semua warga, tetapi hanya perangkat desa dan para tokoh masyarakat. Dalam menentukan besarnya dana yang dibutuhkan pada pelaksanaan bersih desa disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dari kesepakatan

dan dana yang terkumpul itu, maka acara bersih desa khususnya keseniannya disesuaikan, misalnya tidak menggunakan dhalang Hadi Sugito dari Toyan tetapi dhalang yang berkualitas dibawahnya.

Selain nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, upacara bersih desa juga bisa digunakan sebagai alat pengendalian sosial, sebab dengan adanya kegiatan tersebut menyadarkan masyarakat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia tetapi juga makhluk lain yang tidak kasat mata. Makhluk tersebut diyakini hidup seperti layaknya manusia, sehingga perlu dihormati. Penghormatan terhadap makhluk halus itu, tidak hanya berbentuk sesaji yang dianggap sebagai makanan kesukaannya, namun juga berbentuk menjaga lingkungan hutan yang dipercayai sebagai tempat tinggalnya. Masyarakat percaya kalau lingkungan itu rusak, penghuni ditempat tersebut akan marah. Kemarahan itu bisa mengakibatkan misalnya orang menjadi sakit, panen yang gagal, tanaman diserang hama, dan sebagainya. Dengan demikian warga masyarakat tidak akan berbuat sekehendak hatinya terhadap alam sekitarnya, khususnya hutan.

Dengan demikian adanya upacara bersih desa yang diselenggarakan masyarakat, secara tidak langsung sangat menguntungkan dan mendorong masyarakat untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat atau berfungsi sebagai pengendali sosial. Hal ini menyangkut tindakan anggota masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya lingkungan hutan yang terdapat di sekitarnya.

3. Memudarnya Tradisi di Masyarakat

Sumberdaya alam yang mencakup potensi biotik dan nonbiotik yang meliputi berbagai macam flora baik yang masih liar maupun yang sudah dibudidayakan, seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan rakyat (wana tani) dan yang berupa tanah dengan berbagai kondisi serta sifatnya yang telah dimanfaatkan untuk pertanian, perumahan, perindustrian, dan lainnya. Kecuali itu nyatalah bahwa air yang melimpah di atas dan di dalam tanah, di sungai, di telaga, dan sebagainya merupakan sumberdaya alam yang potensinya dapat diandalkan.

Akan tetapi kiranya timbul sesuatu anggapan bahwa pembangunan dan pengolahan lingkungan hidup terdapat hubungan yang bertolak belakang atau kontroversial. Kesan tersebut muncul akibat sering adanya kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan, namun pada kenyataannya justru mengorbankan lingkungan hidup. Selama ini sadar atau tidak, kita lihat dan barangkali terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dimana secara langsung

atau tidak langsung mengandung resiko kerusakan lingkungan (Ismail, 1990 : 118).

Kerusakan lingkungan, secara tidak langsung diakibatkan oleh pembangunan baik "fisik" maupun sosial budaya. Pembangunan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, khususnya prasarana transportasi seperti jalan, ternyata menyebabkan berubahnya lingkungan sosial, yaitu mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan hubungan antar daerah bertambah lancar. Lancarnya hubungan itu, mengakibatkan arus informasi pun lebih cepat diterima oleh masyarakat. Barang-barang hasil produksi pabrik yang ada di perkotaan sudah masuk ke pelosok pedesaan, ini bisa mengakibatkan mencemaran lingkungan alam.

Arus informasi yang diterima oleh masyarakat desa, tidak dari mereka yang datang atau pulang ke daerahnya. Namun informasi itu pada saat sekarang bisa diterima melalui media elektronik seperti radio, atau televisi, apabila adanya program listrik masuk desa, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pemilihan media elektronik tersebut. Seperti yang dikatakan oleh informan dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, memang kenyataan sebagian besar rumah di desa penelitian menggunakan penerangan listrik ini berkat bantuan atau biaya anggota keluarganya yang merantau ke daerah lain.

Kecuali itu, dengan semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat, maka arus informasi yang masuk di desa itupun lebih mudah diterima. Pemberantasan buta huruf yang dilakukan pemerintah dan relatif sukses, menyebabkan kepercayaan diri masyarakat untuk pergi ke daerah lain ikut pula mengingat Tingkat pengetahuan dan banyaknya arus informasi yang diterima masyarakat, menyebabkan penalaran mereka pun, berubah semakin meningkat. Hal itu ditambahkan oleh informan, pada saat sekarang banyak digiatkan penyuluhan tentang kerohanian, baik yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam atau Katholik. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh informan lain, setiap bulannya walaupun hanya sederhana di Masjid di Dusun Sangrek diadakan pengajian atau ceramah tentang keagamaan. Keadaan tersebut tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan pola pikir masyarakat.

Warga masyarakat terutama generasi mudanya ada kecenderungan tidak begitu tertarik terhadap tradisi yang sudah lama ada di masyarakat, misalnya persembahan sesaji kepada Laluhur atau Dhyang, dan lainnya. Seperti dikatakan oleh beberapa informan, para pemuda sekarang banyak yang sombong, para pemuda kini tidak lagi menghormati tradisi, tidak mau menghormati atau

menghargai lingkungan alam, sehingga berbuat sekehendak hatinya. Lingkungan alam sekarang oleh manusia diperlukan secara tidak adil semuanya. Akibat alam mengalami kerusakan keseimbangan lingkunganpun mengalami pergeseran. Alam mengalami kerusakan, akibat eksploitasi yang hanya menguntungkan manusia.

Dengan demikian meningkatnya pendidikan dan semakin deras arus informasi yang masuk sampai ke pelosok pedesaan menjadikan tingkat penalaran masyarakat pun bertambah baik. Salah satu konsekuensi dari membaiknya penalaran itu, ditambah dengan kesadaran untuk menjalankan syariat agamanya, terutama agama Samawi, menyebabkan tradisi yang sudah lama ada di masyarakat pemangkunya mulai pudar. Kearifan-kearifan lokal atau tradisional yang lama dibangun oleh masyarakat setempat. Manusia cenderung melihat sosial ekonominya saja. Dengan demikian apa yang dianggap lebih menguntungkan bagi dirinya atau kelompoknya, maka itulah yang dikerjakan dan dengan embel-embel pembangunan seperti tersebut diatas. Pada hal kalau kita telusuri lebih mendalam kearifan tradisional yang sudah lama dibentuk oleh masyarakat setempat ternyata lebih bijaksana. Oleh karena bagaimanapun kearifan itu mempertimbangkan lingkungan hidup yang sebenarnya sangat dibutuhkan manusia. Jadi dengan kata lain masalah lingkungan hidup sebenarnya lebih cenderung tercakup dalam dimensi manusia sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai manusia biasa lebih toleran terhadap pengendalian nafsu penguasaan alam serta pemenuhan keinginan dalam mengeksplotasi sumberdaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pembangunan lingkungan hidup pada umumnya dan khususnya hutan merupakan masalah yang penting dan mendesak dilakukan. Hal ini disebabkan pembangunan nasional secara keseluruhan agar dapat berjalan terus-menerus di waktu mendatang dibutuhkan keadaan yang stabil, dinamis dan kondusif. Dalam rangka menciptakan kondisi seperti itu, program pembangunan harus memperhatikan dan memperhitungkan aspek kelestarian lingkungan hidup. Sebaliknya pembangunan tanpa dilandasi kemauan melestarikan lingkungan atau mengabaikan kelestarian lingkungan seperti tanah, udara, air dan hutan akan mengakibatkan melapetaka baru bagi manusia. Dengan demikian pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan menempati peran yang penting, karena merupakan salah satu cara yang dapat meletakkan dasar landasan yang kokoh dalam tahap pembangunan seterusnya. Di samping itu, pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil-hasilnya dan stabilitas, melainkan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sebab aspek lingkungan hidup berhubungan langsung secara timbal-balik dengan kehidupan penduduk.

Hubungan antara penduduk dengan lingkungan hidup, dalam hal ini sumberdaya hutan dapat diterlusrui melalui aktivitas formal dan informal petani dalam kawasan hutan. Kegiatan penduduk/petani yang bersifat formal dalam hutan dapat berujud kegiatan usaha tani yang proporsinya sebesar 76,66 persen dan sisanya sebesar 23,44 persen. Tingginya proporsi petani di daerah penelitian yang melkukan kegiatan usaha tani dalam kawasan hutan, disebabkan pendapatan petani dari kegiatan pertanian lahan milik, belum mencukupi kebutuhan keluarganya, akibatnya mendorong petani membuka pertanian dalam hutan. Selain itu, didukung oleh pemerintah melalui Perhutani membuka hutan untuk aktivitas pertanian penduduk disekitar hutan. Kesempatan yang memberi peluang lapangan baru bagi petani memperoleh respon positif dari petani, dan oleh pihak Perhutani mewajibkan petani di kawasan gutan untuk menjaga danmerawat tanaman hutan.

Hubungan antara penduduk dengan hutan di daerah penelitian sangat erat, yang ditunjukkan oleh tingginya curahan jam kerja rata-rata dalam kawasan hutan, baik kegiatan usaha tani, pencarian kayu bakar dan pencarian

rumpun yang dilakukan kepala keluarga. Untuk petani yang mengerjakan lahan dalam kawasan hutan luas memiliki rata-rata curahan jam kerja lebih tinggi daripada yang pengolahan lahan, menanam dan sebagainya.

Kegiatan penduduk khususnya petani yang melakukan usaha pertanian dalam kawasan hutan umumnya menanam jenis tanaman pangan yang meliputi kacang tanah, jagung dan ketela pohon. Hal ini berkaitan jenis tanaman tersebut tidak akan merusak tanaman kehutanan yang menjadi program pemerintah. Dengan demikian adanya kesempatan seperti ini akan memberi keuntungan kepada petani, yaitu menaikkan tingkat pendapatan keluarga dan sekaligus menjaga dan merawat tanaman hutan. Selain melakukan usaha pertanian, ternyata sebagian besar penduduk melakukan pencarian kayu bakar dalam hutan sebanyak 51 responden, yang mempunyai rata-rata jam kerja selama 86,71 jam per 6 bulan. Kegiatan ini banyak dilakukan karena pada umumnya petani hanya memiliki lahan sempit, akibatnya kebutuhan kayu bakar tidak terpenuhi, sehingga mendorong petani mencari kayu bakar dalam kawasan hutan.

Hubungan antara penduduk dengan hutan di daerah penelitian sangat erat, yang ditunjukkan oleh tingginya curahan jam kerja rata-rata dalam kawasan hutan, baik kegiatan usaha tani, pencarian kayu bakar dan pencarian rumput yang dilakukan kepala keluarga. Untuk petani yang mengerjakan lahan dalam kawasan hutan luas memiliki rata-rata curahan jam kerja lebih tinggi daripada yang mengolah lahan sempit. Hal ini dapat terjadi karena bagi petani yang menggarap lahan luas relatif banyak membutuhkan waktu dibandingkan dengan yang menggarap lahan sempit, seperti pengolahan lahan, menanam dan sebagainya.

Kegiatan penduduk khususnya petani yang melakukan usaha pertanian dalam kawasan hutan umumnya menanam jenis tanaman pangan yang meliputi kacang tanah, jagung dan ketela pohon. Hal ini berkaitan jenis tanaman tersebut tidak akan merusak tanaman kehutanan yang menjadi program pemerintah. Dengan demikian adanya kesempatan seperti ini akan memberi keuntungan kepada petani, yaitu menaikkan tingkat pendapatan keluarga dan sekaligus menjaga dan merawat tanaman hutan. Selain melakukan usaha pertanian, ternyata sebagian besar penduduk melakukan pencarian kayu bakar dalam hutan sebanyak 51 responden, yang mempunyai rata-rata jam kerja selama 86,71 jam per 6 bulan. Kegiatan ini banyak dilakukan karena pada umumnya petani hanya memiliki lahan sempit, akibatnya kebutuhan kayu bakar dalam kawasan hutan.

Hasil hutan non kayu yang sangat penting bagi masyarakat disekitar kawasan hutan berupa rumput alang-alang dan ramban untuk mencukupi makanan ternak. Dari 60 responden terdapat dan ramban untuk mencukupi makanan ternak. Dari 60 responden terdapat 49 responden yang mencari rumput di dalam kawasan hutan, dan rata-rata curahan jam kerjanya selama 125,11 jam per 6 bulan. Aktivitas ini banyak dilakukan penduduk terbatas pada musim penghujan, karena pada musim kemarau rumput banyak yang mati. Kebutuhan rumput pada musim kemarau diperoleh dari luar desa, yang dilakukan bersama-sama dengan tetangga. Kesemuanya ini dilakukan karena kebutuhan rumput dan ramban dalam lahan milik sendiri tidak dapat memenuhi, dan mendorong petani memperoleh dari dalam hutan dan luar desa.

Pada umumnya masyarakat di daerah penelitian dan khususnya dikawasan hutan, memandang hutan milik pemerintah sebagai lahan milik pemerintah yang ditanami tanaman keras dan tanaman liar yang hasilnya menjadi milik negara dan penduduk tidak boleh merusak, yang proporsinya sebesar 45%. Berangkat dari pandangan ini, penduduk menyadari bahwa sumberdaya hutan tidak boleh merusak, diambil kayu atau merusak agar tetap lestari. terjaminnya kelestarian hutan oleh masyarakat dipercayai akan banyak memberikan manfaat, seperti kebutuhan lahan, menyimpan air dan mencegah terjadinya tanah longsor.

Selain itu, umumnya masyarakat disekitar hutan di Desa Hargorejo sangat mendukung program rehabilitasi dan penghijauan yang digalakkan pemerintah. Hal ini dengan pertimbangan program tersebut dapat menyuburkan lahan pertanian, tidak saja dalam kawasan hutan, namun juga mencakup lahan disekitarnya milik penduduk. Dengan demikian penduduk sadar bahwa kelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dikawasan hutandan pemerintah/perhutani. Untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan perlu dilakukan secara gotong-royong antar sesama penduduk disekitar hutan. Disamping itu masyarakat umumnya dalam mengupayakan lestarnya hutan berpedoman kepada agama, kepercayaan dan tradisi yang berlaku secara turun temurun di dalam masyarakat. Dengan demikian pedoman yang bersumber pada agama, kepercayaan dan tradisi tersebut mengandung nilai-nilai yang penting untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lestari.

B. SARAN

Banyaknya penduduk dikawasan hutan yang terlibat dalam kegiatan pertanian lahan kering dalam kawasan hutan, memberikan petunjuk bahwa kegiatan tersebut sangat menguntungkan, baik aspek pendapatan petani maupun

aspek ekologi/kelestarian hutan. Hal ini perlu diteruskan untuk masa mendatang, karena selain menyangkut aspek tersebut, terciptanya lingkungan / hutan yang lestari akan cepat terwujud. Kegiatan yang melibatkan penduduk hendaknya mencakup lahan yang relatif subur, namun hendaknya mencakup lahan yang kurang subur dan sangat memungkinkan untuk kegiatan pertanian, seluruh kawasan hutan di Desa Hargorejo.

Sekalipun jumlah penduduk yang masih percaya dan melakukan tradisi tertentu semakin menurun, ternyata kegiatan tersebut mempunyai nilai positif untuk mendukung upaya melestarikan lingkungan hidup/hutan. Kiranya untuk masa mendatang nilai tersebut tetap relevan untuk dijadikan landasan menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan alam dan perlu disebar untuk daerah lain yang memiliki hutan yang rusak kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous

- 1982 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kantor Menteri Negara Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.

Bintarto, R.

- 1983 *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Yogyakarta.

Biro Pusat Statistik

- 1990 *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*, Kantor Statistik DIY, Yogyakarta.

Biro Pusat Statistik

- 1991 *Luas Penggunaan Lahan dan Alat-alat Pertanian Propinsi DIY*, Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dames, TWG

- 1956 *Soils Map East Central Java*, Pusat Penelitian Tanah, Bogor.

Daldjuni, N.

- 1978 *Manusia Penghuni Bumi*, Alumni Bandung.
1983 *Penanggalan Pertanian Jawa Pranotomongso: Peran Bioklimatologi dan Fungsi Sosialkulturalnya*. Proyek Javanologi, Yogyakarta.

Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa

- 1975 *Petunjuk Pengolahan Data dan Proses Penyusunan Klasifikasi Tipe desa Indonesia*, Pembangunan Masyarakat Desa, Jakarta.

Djayahadikusumo, Sumitro

- 1994 *Pengembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Indonesia University, Jakarta.

Dove. M.R. dan Sugeng Martopo

- 1987 *Manusia dan Alang-alang di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Geertz, G.

- 1983 *Involusi Pertanian*, Bhatara Karya aksara, Jakarta.

Indrakusuma, A.D.

- 1974 *Pengantar Ilmu Pendidikan*, IKIP Malang, Malang.

Ismail

- 1990 *Wawasan Jatidiri Dalam Pembangunan Daerah*, Eifhar dan Dahara Prize, Semarang.

Kamajaya

- 1992 *1 Suro Tahun Baru Jawa Perpaduan Jawa Islam*, Jawanologi, Yogyakarta.

Leuhery. D.

- 1989 *Bentuk-Bentuk Hutan Kemasyarakatan dan Interaksi Penduduk Dengan Hutan di Lereng Selatan Merapi*, Tesis Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Majlis Permusyawaratan Rakyat

- 1993 *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Binasiswa, Surabaya.

Mantara, IB. dan Kasto

- 1989 Penentuan Sampel, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (Ed.): *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Moentjaraningrat

- 1974 *Beberapa pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
1980 *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
1990 *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moekiyat

- 1981 Menaksir Masa Bero Perladangan Berpindah-pindah di Kalimantan Timur, dalam Sambas Wirakusumah (Ed.): *Citra dan Fenomena Hutan Tropika Humida Kaltim*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Moeripto, dkk.

- 1997 *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Pendukungnya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta.

Mulder, Neils

- 1977 *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Munir, Rozi

- 1982 Migrasi, dalam Lembaga Demografi (Ed.): *Dasar-Dasar Demografi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Murniatmo, G.

Pola Penguasaan, Pemilikan dan Pembangunan Tanah Secara Tradisional di daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta.

Peursen, V.

- 1976 *Strategi Kebudayaan*, Kanisius dan BPK. Gunung Mulia, Jakarta.

Porwodarminto, WJS.

1939 *Baoesatro Djowo*, NV. Groningen, Batavia.

Pranowo, Andoyo Adi.

1985 *Manusia dan Hutan: Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung Merapi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ramli, A.

1994 *Perilaku Migrasi dan Matapencaharian Masyarakat Terbelakang Suku Saksi di Lingkungan Hutan Ke Mandau Propinsi Riau*, Tesis Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Salim, E.

1986 *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.

Sandi, I Made

1977 *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Siwinarti

1996 *Pentingnya Mencintai dan Melestarikan Hutan dan Lingkungan alam, Desa Kita, Nomor 63/Th. X/DK-Juni, Direktorat Pembangunan Desa Prop. Jateng.*

Soedjatmoko

1983 *Dimensi Manusia dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

1989 *Metode dan Proses Penelitian*, dalam Masri Singaribun dan Sofian Efendi (Ed.): *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Soehardi

1982 *Pembudayaan Air, Tanah dan Lingkungan*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada.

Soejani, N.

- 1987 *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sumintarsih, dkk.

- 1994 *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan Dalam Hubungannya Dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta.

Sumarwoto, O.

- 1978 *Ekologi Desa: Lingkungan Hidup dan Kualitas hidup*, LP3ES, Jakarta.

Suparlan, Parsudi

- 1983 *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya: Perspektif Antropologi*, dalam M. Soerjani dan B. Samad (Ed.): *Manusia dalam Keresasian Lingkungannya*, Indonesia University, Jakarta.

Suseno, Franz Magnis.

- 1984 *Etik Jawa: Sebuah Analisa Filsafat Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*, PT. Gramedia, Yogyakarta.

Supandi

- 1985 *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.

Triyoga, Lucas Sasongko

- 1991 *Manusia Jawa dan Gunung Merapi, Persepsi dan Sistem Kepercayaanannya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Wibowo, H.J.

- 1996 *Sistem Pengetahuan Tradisional Dalam Bidang Matapencaharian di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta.

**Lampiran I. DAFTAR RESPONDEN
DI DESA HARGOREJO, 1996**

No.	N A M A	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Dusun
1.	Toharuddin	50	SD	Petani	Sangrek
2.	Masduki	62	TS	Petani	Sangrek
3.	Somowiyadi	55	SD	Petani	Sangrek
4.	Muhammad Rois	60	TS	Petani	Sangrek
5.	Sarijo	40	SD	Petani	Sangrek
6.	Jopremono	60	TS	Petani	Sangrek
7.	Ali Mursid	45	SD	Petani	Tejogan
8.	Amat	60	TS	Petani	Tejogan
9.	Tomowiyadi	62	TS	Petani	Tejogan
10.	Syarifudin	56	SD	Petani	Sangrek
11.	Burhanuddin	44	SMP	Petani	Tejogan
12.	Kasan Mursidi	55	SD	Petani	Tejogan
13.	Nitiwiyono	60	SD	Petani	Sangrek
14.	Dullah Afandi	45	SD	Petani	Sangrek
15.	Kabib	40	SD	Petani	Sangrek
16.	Kamijo	35	SMP	Petani	Sangrek
17.	Wagiran	40	SMP	Petani	Tejogan
18.	Wahidin	38	SD	Petani	Tejogan
19.	Parjono	34	SMP	Petani	Tejogan
20.	Mujiraharjo	46	SD	Petani	Sangrek
21.	Sutowiyono	56	SD	Petani	Sangrek
22.	Partoikromo	60	SD	Petani	Sangrek
23.	Zaini	36	SD	Petani	Tejogan
24.	Watono	36	SD	Petani	Tejogan
25.	Kromodiyun	56	SD	Petani	Tejogan

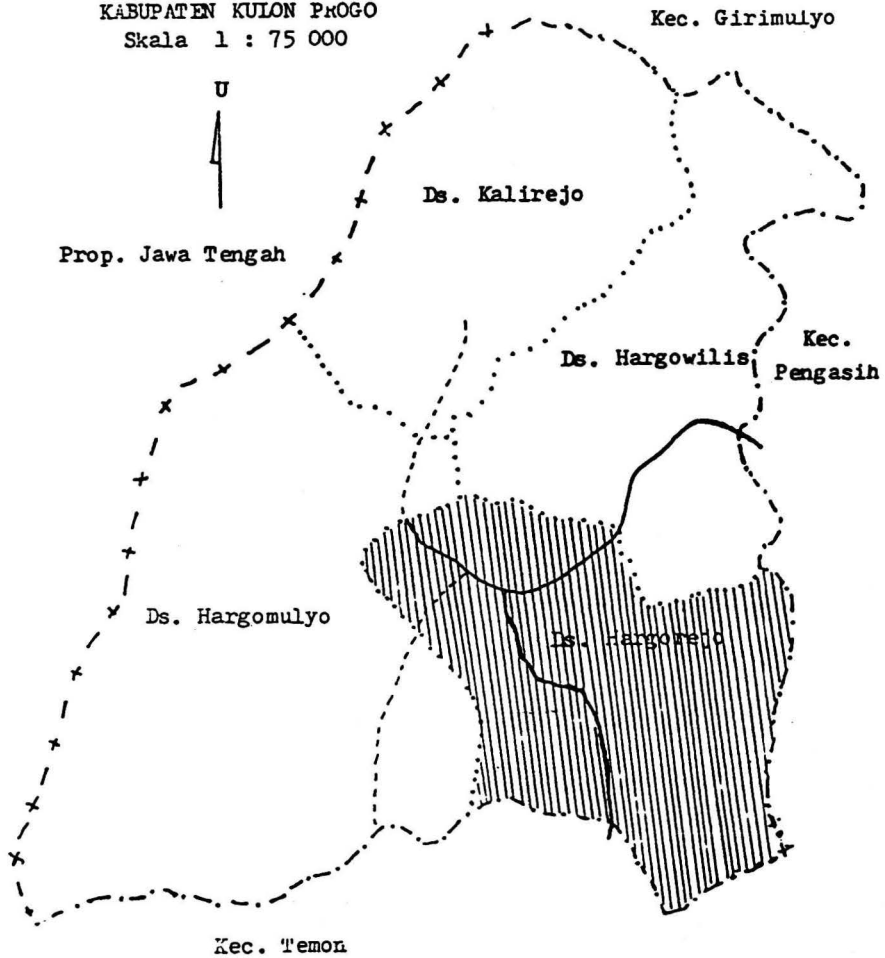
No.	N A M A	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Dusun
26.	Sutoikromo	65	SD	Petani	Tejogan
27.	Maryono	35	SD	Petani	Tejogan
28.	Atmowiyono	55	SD	Petani	Sangrek
29.	Budiwiyono	62	SD	Petani	Sangrek
30.	Wito Suprayitno	40	SD	Petani	Tejogan
31.	Darmowiyono	60	SD	Petani	Tejogan
32.	Sahit Khamdani	40	SD	Petani	Sangrek
33.	Aminuddin	37	SMP	Petani	Sangrek
34.	Rusman	32	SD	Petani	Sangrek
35.	Mulyoikromo	50	SD	Petani	Sangrek
36.	Irfanudin	37	SD	Petani	Tejogan
37.	Muhajir	36	SD	Petani	Tejogan
38.	Subroto	34	SD	Petani	Tejogan
39.	Atmowiyadi	60	SD	Petani	Sangrek
40.	Resowiyono	50	SD	Petani	Sangrek
41.	Hadimustofa	37	SD	Petani	Sangrek
42.	Hadiwiyanto	36	SD	Petani	Sangrek
43.	Sutrisno	45	SMP	Petani	Tejogan
44.	Ciptosuprpto	60	SD	Petani	Sangrek
45.	Supriyo	42	SD	Petani	Tejogan
46.	Tukidi	34	SD	Petani	Sangrek
47.	Martorejo	52	SD	Petani	Sangrek
48.	Yatimah	31	SD	Petani	Sangrek
49.	Sumarto	33	SD	Petani	Sangrek
50.	Sudiyah	55	SD	Petani	Tejogan
51.	Joparto	58	SD	Petani	Sangrek
52.	Surinem	46	SD	Petani	Tejogan
53.	Sastrosuwito	60	SD	Petani	Tejogan

No.	N A M A	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Dusun
54.	Marto Iswandi	46	SD	Petani	Tejogan
55.	Kertowiyono	50	SD	Petani	Sangrek
56.	Dulmanan	52	SD	Petani	Sangrek
57.	Resowiyono	48	SD	Petani	Sangrek
58.	Mulyotani	64	SD	Petani	Sangrek
59.	Ngatijan	43	SD	Petani	Tejogan
60.	Samijo	32	SD	Petani	Sangrek

**Lampiran II. DAFTAR INFORMAN
DI DESA HARGOREJO, 1996**

No.	N A M A	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Dusun
1.	Puji Hartono	49	SD	Petani	Sangrek
2.	Mulyoikromo	70	TS	Petani	Tejogan
3.	Wongsoatmo	75	TS	Petani	Tejogan
4.	Jayan	31	SLTA	Petani	Sangrek
5.	Atmowiyono	50	SD	Petani	Sangrek
6.	Partowiyono	65	TS	Petani	Tejogan
7.	Ibrahim Asmoro	48	SD	Petani	Sangrek
8.	Amat Dardjo	65	TS	Petani	Selo Barat
9.	Pawiro Semadi	58	TS	Petani	Tejogan
10.	Suprayitno	56	Sar. Mud.	Kades	Selo timur

PETA KECAMATAN KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO
Skala 1 : 75 000



LEGENDA

- + - - - + Batas Propinsi
- . - - - Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Aspal
- - - - - Jalan Batu
-  Lokasi Penelitian

Sumber: Peta Wilayah Propinsi
Daerah Istimewa Yogya-
karta Skala 1:100.000



Foto 1. Bentuk hutan produksi di Gunung Jeruk

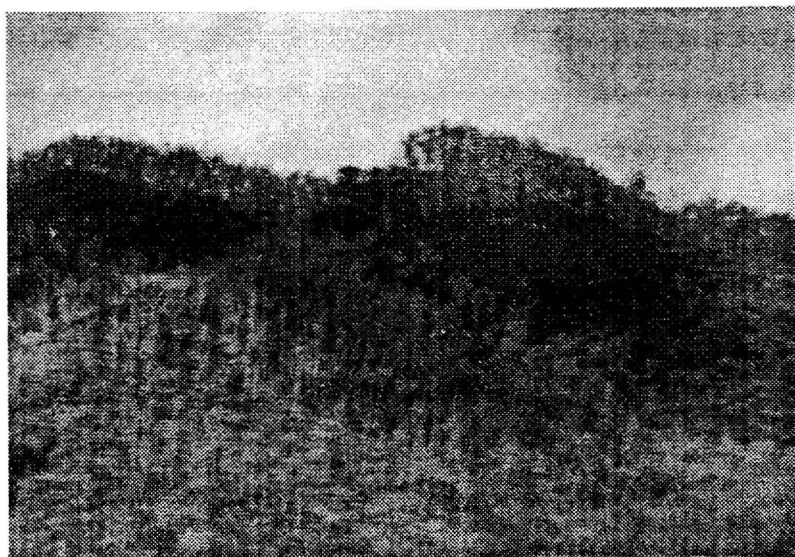


Foto 2. Hutan produksi di Gunung Roto



Foto 3. Bentuk terasering dalam kawasan hutan



Foto 4. Bentuk lahan pertanian dalam kawasan hutan



Foto 5. Petani sedang tabur benih jagung di lahan dalam hutan



Foto 6. Bentuk wanatani/lahan milik dihutankan



Foto 7. Aktivitas petani dalam kawasan hutan



Foto 8. Jenis kayu bakar dari hutan



Foto 9. Aktivitas penduduk mengambil legen dari pekarangan



Foto 10. Kegiatan pembuatan gula kelapa, mendorong pengambilan kayu bakar dalam kawasan hutan

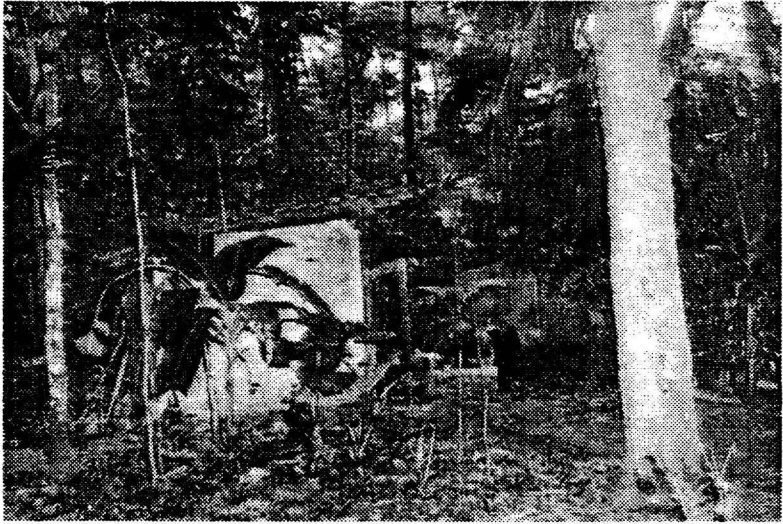


Foto 11. Sumber air bersih di lembah Gunung Jeruk



Foto 12. Jenis tanaman jati, sonokeling dan kelapa hutan wanatani



Foto 13. Jenis tanaman yang beragam hutan wanatani



PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH DALAM UPAYA PELESTARIAN L



Perpustakaan
Jenderal K

304.28

SUM

p

UP
DIY